LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Instagram
dispusipjakarta

Website
www.dispusip.jakarta.go.id

KATA PENGANTAR

Nasruddin Djoko Surjono
Kepala Dispusip

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan pertanggungjawaban pencapaian kinerja untuk pelaksanaan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Penetapan Kinerja Tahun 2025. LKIP disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP tahun 2025 ini diuraikan capaian pelaksanaan sasaran, program dan realisasi anggaran pada tahun 2025, perbandingan capaian sasaran dan program tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, serta capaian pelaksanaan sasaran dan program terhadap target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Disampaikan pula mengenai analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program beserta solusinya serta prestasi pada tahun 2025.

Diharapkan LKIP ini menjadi bahan penilaian terhadap kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Provinsi DKI Jakarta, serta dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Jakarta, 31 Januari 2026
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta

Nasruddin Djoko Surjono
NIP 197306201999031002

DAFTAR ISI

kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
Ikhtisar Eksekutif vi

BAB I Pendahuluan 2
A. Latar Belakang 2
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat 2
C. Kedudukan Organisasi 3
D. Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5
E. Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6
F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 16
G. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 18

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 20
A. Perencanaan Strategis 20
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 24
C. Target Kinerja dan dan Alokasi Anggaran Tahun 2025 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 42
A. Capaian Kinerja Organisasi 42
B. Analisis Capaian Kinerja 44
C. Realisasi Anggaran 130

BAB IV PENUTUP 143
A. Kesimpulan 143
B. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 2026 144
Lampiran 209
Dokumentasi Penghargaan 217

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Indikator Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 VI
Tabel 2. Jumlah Kendaraan Pusling Dan Lasiga Dispusip 9
Tabel 3. Anggaran Tahun 2025 15
Tabel 4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024 16
Tabel 5. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan 22
Tabel 6. Program Dan Target Kinerja Dinas Perpustakaan 23
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2025 24
Tabel 8. Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Program 26
Tabel 9. Target Kinerja Dan Anggarantahun 2025 28
Tabel 10. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 42
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 - 2025 43
Tabel 12. Jumlah Responden Nilai Budaya Literasi Berdasarkan 44
Tabel 13. Indikator Penyusun Budaya Literasi 44
Tabel 14. Uplm Dan Iplm Dki Jakarta Tahun 2024 Dan 2025 48
Tabel 15. Rekapitulasi Data Uplm Per Kabupaten/Kota 49
Tabel 16 IPLM Berdasarkan Perhitungan Perpusnas RI 51
Tabel 17. Realisasi Pengadaan Buku Tahun 2025 53
Tabel 18. Fase TKM DKI Jakarta 55
Tabel 19 Nilai TKM Perhitungan Perpusnas Tahun 2025 58
Tabel 20. Hasil Akreditasi Perpustakaan Umum 59
Tabel 21. Pembinaan Perpustakaan 62
Tabel 22. Daftar Penerbit Aktif Menyerahkan KCKR Tahun 2025 71
Tabel 23. Daftar Koleksi Budaya Etnis Nusantara Yang Diolah Dan Dilakukan Penyiangan Tahun 2025 73
Tabel 24. Perbandingan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan 75
Tabel 25. Survey Kepuasan Layanan Kearsipan Tahun 2025 77
Tabel 26. Tingkat Ketersediaan Arsip Tahun 2025 79
Tabel 27. Data Indikator Program Persentase Lembaga (OPD, BUMD) Yang Mengelola Arsip Sesuai NSPK Tahun 2017 – 2025 81
Tabel 28. Daftar Hasil Audit Perangkat Daerah Tahun 2025 83
Tabel 29. Daftar Hasil Audit Bumd Tahun 2025 85
Tabel 30. Pengelolaan Arsip Statis Tahun 2025 88
Tabel 31. Penetapan Arsip Statis Tahun 2025 89
Tabel 32. Daftar Preservasi Arsip Statis NSPK Tahun 2025 90
Tabel 33. Risiko Sasaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 101
Tabel 34. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2025 Berbanding Dengan Target Renstra 2023-2026 108
Tabel 35. Indeks Daya Saing Daerah 110
Tabel 36. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 111
Tabel 37. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Dan Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja 125
Tabel 38. Perbandingan Indikator Nilai Budaya Literasi Dengan Target Nasional 128
Tabel 39. Perbandingan Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 129
Tabel 40. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Dibandingkan Provinsi Lain 129
Tabel 41. Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program 131
Tabel 42. Realisasi Belanja Dan Target Kinerja Anggaran Tahun 2025 132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dispusip 5
Gambar 2. Infografis Jumlah Pegawai 6
Gambar 3.Gedung Dan Sarana Perpustakaan Cikini 7
Gambar 4. Sarana Penyimpanan Arsip Dan Laboratorium Kearsipan Gedung 8
Gambar 5.Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum 8
Gambar 6. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik E-Office 10
Gambar 7. Jaklitera 11
Gambar 8. Sistem Informasi Perpustakaan Inlis Lite 11
Gambar 9. Sistem Informasi Aplikasi Perpustakaan Jakarta (Siapjak) 12
Gambar 10. Tahapan Proses Pengelolaan Arsip Dinamis (Arjuna) 13
Gambar 11. Website Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 13
Gambar 12. Kegiatan Layanan Perpustakaan 14
Gambar 13. Kegiatan Layanan Kearsipan 15
Gambar 14. Anggaran Belanja Operasi Dan Belanja Modal 16
Gambar 15. Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Program 26
Gambar 16. Nilai Budaya Literasi Berdasarkan 45
Gambar 17. Nilai Budaya Literasi Per Jenis Kelamin 46
Gambar 18. Nilai Budaya Literasi Per Jenis Pekerjaan 47
Gambar 19. Grafik Perbandingan Uplm Tahun 2024 Dan 2025 49
Gambar 20. Nilai Iplm Kabupaten / Kota di DKI Jakarta Tahun 2024 Dan 2025 50
Gambar 21. Aktivitas Perpustakaan 52
Gambar 22. Koleksi Perpustakaan 53
Gambar 23. Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) 54
Gambar 24. Skor Tkm Berdasarkan Kota/Kabupaten Administrasi 55
Gambar 25. Nilai Tkm Berdasarkan Pendidikan 56
Gambar 26. Nilai Tkm Berdasarkan Usia 56
Gambar 27. Nilai Tingkat Kegeramaran Membaca 57
Gambar 28. Sertifikat Akreditasi Perpustakaan 59
Gambar 29. Sertifikat Penerapan Iso 9001:2015 61
Gambar 30. E-Resources Pada Jaklitera 63
Gambar 31. Event Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin 63
Gambar 32. Immersive Studio Perpustakaan Jakarta Dan Pds Hb Jassin 64
Gambar 33. Kegiatan Ikra 65
Gambar 34. Roadshow Workshop Membaca Di Satuan Pendidikan 66
Gambar 35. Baca Jakarta 1 66
Gambar 36. Wisata Literasi 67
Gambar 37. Festival Literasi Rusun 67
Gambar 38. Lomba Hanjaba Tingkat Provinsi 68
Gambar 39. Serah Terima Rak Dan Buku Untuk 68
Gambar 40. Arya Cetak Dan Karya Rekam Yang Menjadi 69
Gambar 41. Naskah Kuno 70
Gambar 42. Jumlah Koleksi KCKR s.d Tahun 2025 70
Gambar 43. Penghargaan Penerbit 71
Gambar 44. Katalog Induk Dan Bibliografi 72
Gambar 45. Foto Naskah Kuno Barang Rahsia Dari Astana Konstantinopel. 73
Gambar 46. Grafik Nilai Hasil Pengawasan Tahun 2020-2025 76

Gambar 47. Gerakan Sadar Tertib Arsip Tahun 2025 86
Gambar 48. Optimalisasi Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah..... 86
Gambar 49. Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah dan BUMD 87
Gambar 50. Layanan Arsip Keluarga 87
Gambar 51. Pameran Seni Berbasis Arsip Dengan Tema “Lo Jual Gue Beli” 90
Gambar 52. Sarana dan Prasarana Disabilitas 95
Gambar 53. Pelatihan Sensitivitas Disabilitas 95
Gambar 54. Integrasi Naskah Dinas Pada Aplikasi Arjuna Dengan Aplikasi E-Office..... 96
Gambar 55. Laporan Capaian Data Kumulatif..... 97
Gambar 56. Laporan Peningkatan Penggunaan Produk 99
Gambar 57. Rumus Perhitungan Persentase Realisasi Belanja..... 100
Gambar 58. Perbandingan Nilai Budaya Literasi..... 109
Gambar 59. Perbandingan Hasil Pengawasan..... 109
Gambar 60. Perbandingan Iplm Tahun 2021 - 2025 109
Gambar 61. Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Arsip 110
Gambar 62. Grafik Perbandingan Nilai Budaya Literasi Dengan Target Nasional 128
Gambar 63. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Dibandingkan Provinsi Lain 130
Gambar 64. Grafik Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 131

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja yang dijabarkan dalam sasaran strategis yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian kinerja tujuan, sasaran dan program pada tahun 2025 yang dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya dan target akhir RPD Tahun 2023-2026. Dari hasil evaluasi tujuan, sasaran dan program yang dilaksanakan sangat baik dan baik untuk pencapaian indikator kinerjanya. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap realisasi 11 (Sebelas) target kinerja tersebut disimpulkan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 6 Target
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 5 Target

Rincian realisasi target kinerja pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Realisasi Indikator Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator KInerja	Tahun 2025			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat	Nilai Budaya Literasi	Nilai	72.09	78.76	109.25%
2	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Penyelenggaraan Layanan Arsip yang Akuntabel	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	93.11	94.36	101.34%
3	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19.91	19.96	100.25%
4	Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Kearsipan Daerah, Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan, Akuntabilitas Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan	Nilai	93.61	93.73	100.13%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator KInerja	Tahun 2025			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
	Kearsipan yang Diawasi dan Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan					
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	100	93.75	93.73%
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3.25	4	123.08%
7	Peningkatan Penggunaan Peroduk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	80-100	84.85	100%
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Persen	100	100	100%
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100%
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	71	88.20	124.22%
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%

Kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2025 dengan anggaran pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebesar Rp324.969.289.485 dengan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp291.409.904.626 atau 89,67%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud, Tujuan, dan Manfaat

C. Kedudukan Organisasi

D. Isu Strategis Perangkat Daerah

E. Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

F. Tindaklanjut Hasil Evaluasi

G. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, salah satu kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota adalah menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan di daerah serta menyelenggarakan layanan perpustakaan dan kearsipan. Untuk menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan Kearsipan di Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Arsip Daerah.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan daerah, maka dibentuklah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. maka disusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran target kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud penyusunan LKIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selaku entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja yang menggambarkan pencapaian kinerja dari

target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan penyusunan LKIP sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggungjawaban kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang terukur kepada pemberi mandat (Gubernur Provinsi DKI Jakarta) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Memberikan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. Memberikan rumusan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Manfaat penyusunan LKIP sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja yang telah dicapai sejauh mana anggaran dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi dalam pengambilan kebijakan pimpinan bagi perbaikan kinerja tahun berikutnya.

C. Kedudukan Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1. Tugas
   Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan daerah.

2. Fungsi
   a) penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   b) pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   c) perumusan dan pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   d) pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan perpustakaan dan kearsipan daerah;
   e) perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
   f) perencanaan, pelayanan, pengembangan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi perpustakaan dan kearsipan;
   g) pembinaan perpustakaan dan arsip terhadap perangkat daerah;
   h) pelaksanaan retensi arsip dan/atau buku;
   i) pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional tertentu pustakawan dan Arsiparis;
   j) pengelolaan teknologi sistem informasi serta transformasi

digital perpustakaan dan kearsipan;
k) pemeliharaan, perawatan dan pelestarian dokumen sastra HB Jassin;
l) penggalian dan penelusuran arsip dan bahan perpustakaan;
m) penyelenggaraan hubungan kerja sama di bidang perpustakaan dan kearsipan
n) pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang perpustakaan dan kearsipan;
o) pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan daerah;
p) pemasyarakatan perpustakaan dan kearsipan;
q) akuisisi, penyusunan naskah sumber dan penyimpanan arsip;
r) pembinaan perpustakaan yang dikelola masyarakat termasuk perpustakaan keagamaan;
s) penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
t) pelaksanaan kesekretariatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
u) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
v) pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

3. Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

a) Sekretariat Dinas, terdiri atas :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan;
   3) Sub Bagian Sarana dan Prasarana.
b) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
c) Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan;
d) Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan;
e) Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
f) Bidang Teknologi Informasi;
g) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota, terdiri atas:
   1) Subbagian Tata Usaha;
   2) Seksi Perpustakaan; dan
   3) Seksi Kearsipan.
h) Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin, terdiri atas Subbagian Tata Usaha; dan
i) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

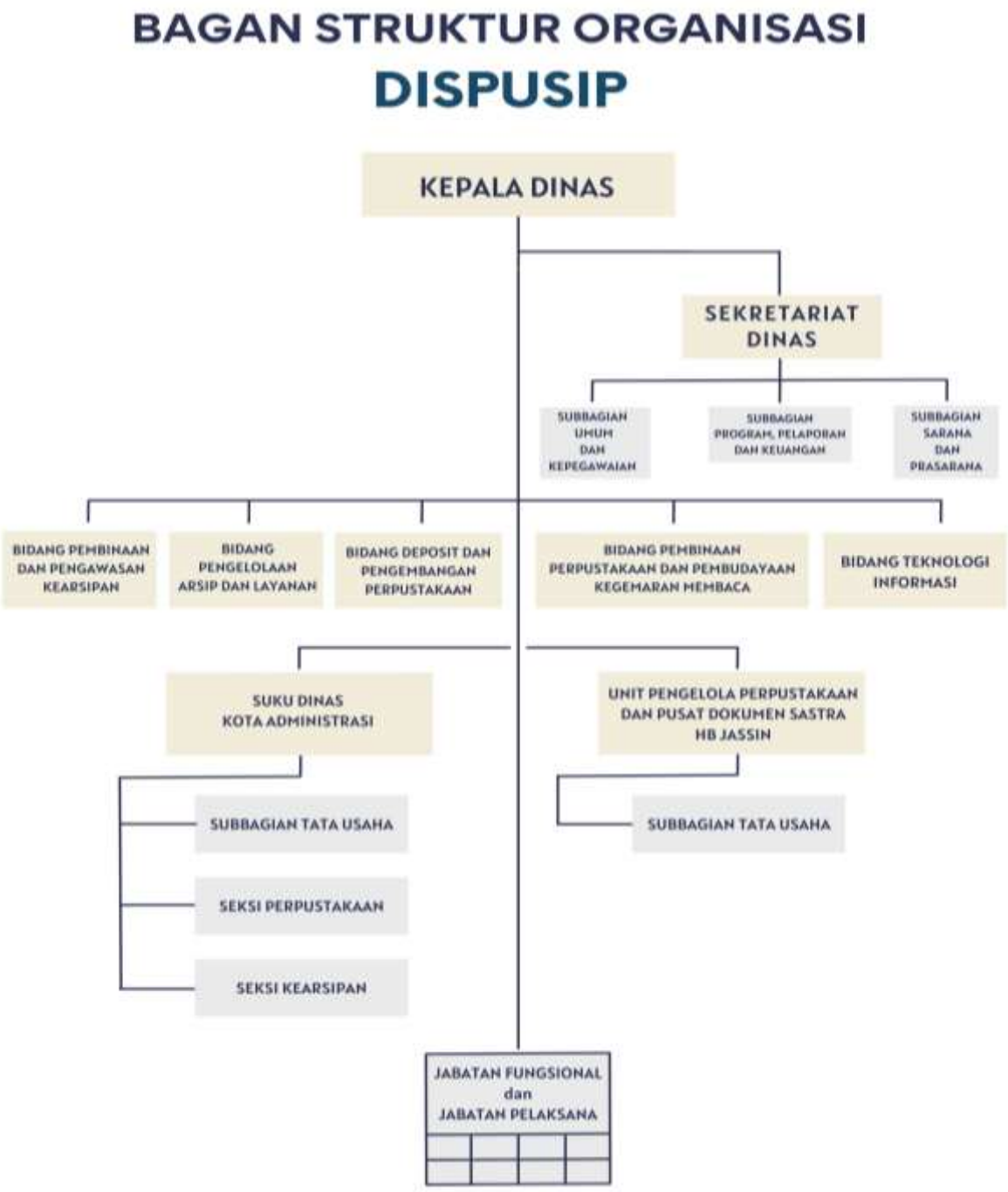

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dispusip

D. Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Isu-isu strategis di bidang perpustakaan adalah peningkatan budaya literasi dan pembangunan literasi masyarakat melalui kegemaran membaca, inovasi, kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter dengan pengembangan budaya gemar membaca, pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi, peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kedua, penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi,

mencakup pengembangan mitra perpustakaan, pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi.

Pada urusan kearsipan adalah kesadaran Pencipta Arsip atas penyelenggaraan kearsipan dan pembinaan pengelola kearsipan menjadi bagian integral dari tata kelola Pemerintahan yang baik dan pemajuan kebudayaan. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pemerintah yang baik serta berwibawa, maka mengharuskan untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan kearsipan pada birokrasi pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Dengan demikian kedua birokrasi penyelenggara kearsipan tersebut mampu menjamin ketersediaan arsip dinamis dan statis yang autentik dan reliabel untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

E. Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 adalah 238 orang yang terdiri dari :

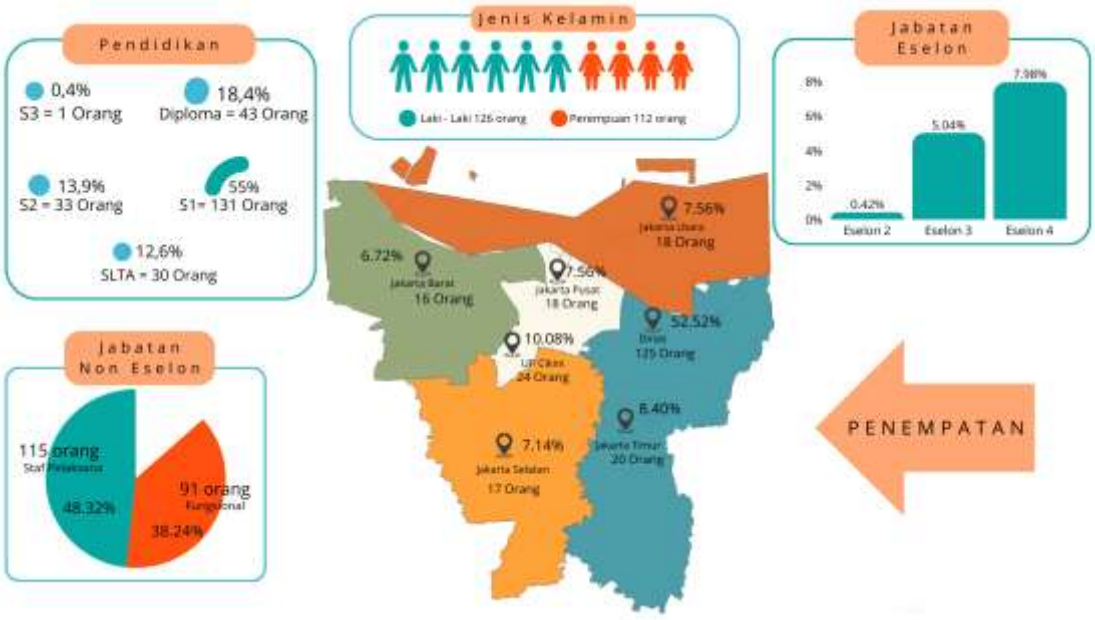

Gambar 2. Infografis Jumlah Pegawai

2. Sarana dan Prasarana

a. Gedung dan Ruangan Perpustakaan

Gedung perpustakaan di Provinsi DKI Jakarta akan terus ditingkatkan fungsinya seiring dengan pengembangan perpustakaan, dengan standar ruangan dan fasilitas perpustakaan sebagai berikut :

1) Ruang Baca
2) Ruang Koleksi
3) Ruang Referensi
4) Ruang KCKR
5) Ruang Anak
6) Ruang Layanan Sirkulasi
13) Ruang Koleksi Khusus
14) Ruang Komputer/Server
15) Ruang Pengolahan Bahan Pustaka
16) Aula
17) Tempat Ibadah
18) Ruang Kantor

7) Anjungan Sirkulasi Mandiri
8) Ruang Permainan Anak
9) Ruang Pameran
10) Ruang Diskusi
11) Ruang Layanan Internet
12) Ruang Audio Visual
19) Ruang Komunitas
20) Ruang Co-Working Space
21) Mini Teater
22) Toilet

Gambar 3.Gedung dan Sarana Perpustakaan Cikini

b. Gedung dan Ruangan Kearsipan

Untuk menunjang layanan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah memiliki Depo Arsip Statis, yang digunakan untuk :

1) Lantai I, terdiri dari ruang simpan arsip tahan api, dan Laboratorium Kearsipan
2) Lantai II s.d. VII terdiri dari ruang simpan arsip
3) Lantai VIII terdiri dari ruang simpan arsip tahan api
4) Peralatan dan perlengkapan kearsipan antara lain: Ruang simpan arsip tahan api; Lemari simpan arsip (roll opack); Lemari simpan arsip lextivier; kardex; Penghancur dokumen; Dehumidifier; Microfilm; dan alat penetralisir/pengukur kelembaban udara.

Gambar 4. Sarana Penyimpanan Arsip dan Laboratorium Kearsipan Gedung

c. Lokasi gedung perpustakaan dan kearsipan
   1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, (Perpustakaan Khusus dan Depot Arsip Pulomas) Jl. Perintis Kemerdekaan No.1, Pulogadung - Jakarta Timur.
   2) Perpustakaan Jakarta Cikini dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin, Komplek Taman Ismail Marzuki Jl. Cikini Raya No. 73 - Jakarta Pusat.
   3) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Pusat Jl. Tanah Abang I, Kebon Jahe – Jakarta Pusat.
   4) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Utara Jl. Logistik, Simpang Lima Semper – Jakarta Utara.
   5) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Barat Jl. Tanjung Duren Barat No. 23 – Jakarta Barat.
   6) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Selatan Jl. Gandaria Tengah V/3 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan.
   7) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Timur Komplek Pendidikan Rawa Bunga Jatinegara– Jakarta Timur.

Gambar 5.Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur

1. Koleksi

   a. Koleksi Perpustakaan

      Sampai dengan tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta memiliki koleksi sebanyak 1.570.957 eksemplar, yang terdiri dari buku konvensional dan buku digital yang terbagi menjadi iJakarta dan Spot Baca.

   b. Koleksi Kearsipan

      Arsip/dokumen penting daerah yang berhasil dihimpun dan disimpan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2025 sebanyak 641.776 arsip berupa arsip Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan arsip titipan.

2. Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasinal Khusus (Perpustakaan Keliling dan Layanan Arsip Keluarga)

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Pusling dan Lasiga Dispusip

No.	SKPD/UKPD	Mobil Pusling (KDOK)				Mobil Lasiga (KDOK)			
		B	RR	RB	Jumlah	B	RR	RB	Jumlah
1	Dinas					1			1
2	Sudin Pusip Pusat	12			12	1			1
3	Sudin Pusip Utara	10		3	13				
4	Sudin Pusip Barat	14		2	16	1			1
5	Sudin Pusip Selatan	7	5		12				
6	Sudin Pusip Timur	14		2	16				
7	UP Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin	1			1				
	TOTAL	**58**	**5**	**7**	**70**	**3**			**3**

Keterangan:
B = Baik
RR = Rusak Ringan
RB = Rusak Berat

3. Aplikasi

a. Aplikasi E-Office

Pada tahun 2018 tata kelola persuratan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan responsif telah dilakukan melalui penerapan aplikasi naskah dinas elektronik (e-office) surat masuk guna mewujudkan paradigma pemerintahan e-government dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Uji Coba dan Persiapan Pelaksanaan Tata Kelola Persuratan Melalui Aplikasi Layanan e-Office. Tahun 2025, layanan E-office membantu menciptakan arsip dari surat masuk maupun keluar di aplikasi sehingga ketercapaian arsip aktif yang berhasil dibuatkan daftar arsip aktifnya mencapai 34.56%.

Gambar 6. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik E-Office

b. Aplikasi Jaklitera

Dalam upaya peningkatan layanan perpustakaan seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dan mengakomodir trend perkembangan layanan yang booming sejak era pandemi di mana layanan pembelian online semakin berkembang sehingga menjadi gaya hidup masyarakat Jakarta saat ini. Pengembangan aplikasi layanan perpustakaan melalui rekayasa sistem informasi di mana layanan peminjaman dan pengembalian buku dilakukan seperti proses transaksi pembelian barang di market place. Pemustaka dapat meminjam buku yang ada di daftar koleksi di seluruh perpustakaan yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan dapat mengembalikan di lokasi yang sesuai kebutuhan pemustaka dan ke depannya pemustaka dapat meminjam dan mengembalikan buku dengan memanfaatkan jasa ojek online.

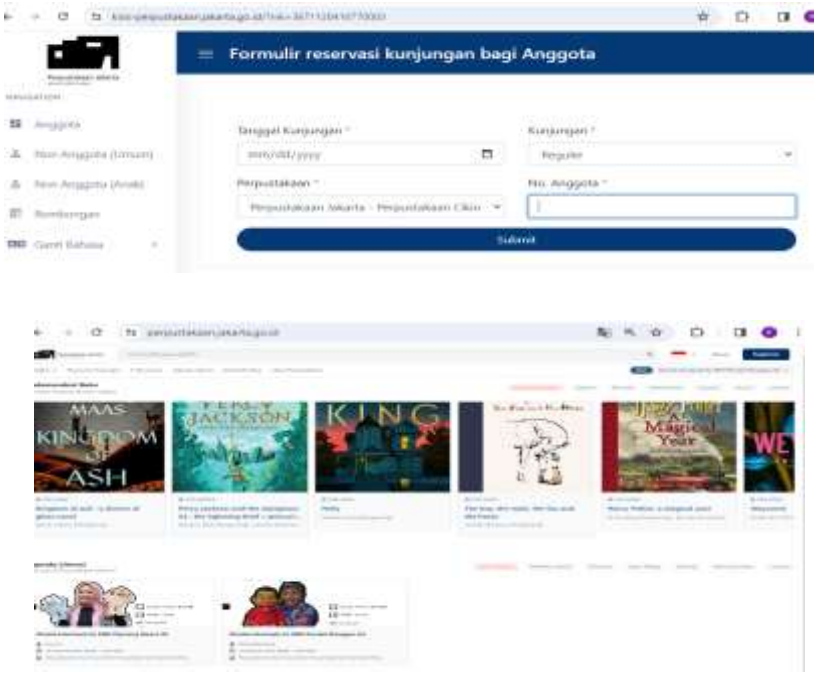

Gambar 7. Jaklitera

c. Aplikasi Inlislite

Aplikasi Inlis adalah aplikasi pengelolaan perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional RI (Perpustakaan Nasional RI) sejak tahun 2011. Inlis dikembangkan sebagai perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan sekaligus mengembangkan perpustakaan digital/mengelola dan melayankan koleksi digital. Integrasi sistem informasi perpustakaan ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menelusuri koleksi yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, baik dari ketersedian sampai lokasi keberadaannya secara online. Selain itu, penerapan INLIS Lite ini juga menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari Indonesia OneSearch atau IOS, yaitu sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia.

Gambar 8. Sistem Informasi Perpustakaan INLIS Lite

d. Aplikasi Siapjak

Sistem Informasi Akreditasi Perpustakaan Jakarta (SiapJak) sebagai jawaban atas kebutuhan layanan untuk mengakomodir kebutuhan pembinaan perpustakaan yang komprehensif, yang bertujuan sebagai salah satu penentu arah kebijakan yang berhubungan dengan manajemen perpustakaan yang meliputi pendataan, akreditasi, pelaporan dan pembinaan perpustakaan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Di samping itu Dispusip sebagai lembaga pembina perpustakaan dan juga sebagai lembaga akreditasi perpustakaan daerah mempunyai kewajiban untuk mendorong lembaga binaannya untuk mencapai standar perpustakaan yang ideal sebagaimana diamanatkan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, bahwa penyelenggara perpustakaan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta wajib mendaftarkan perpustakaannya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Gambar 9. Sistem Informasi Aplikasi Perpustakaan Jakarta (Siapjak)

e. Aplikasi Arjuna

Untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan arsip dinamis yang terintegrasi sejak penciptaan sampai dengan penyusutan sebagaimana ketentuan undang-undang, diperlukan pengembangan aplikasi kearsipan dinamis untuk melengkapi fungsi aplikasi eOffice yang saat ini baru mengakomodir penciptaan naskah dinas saja dan belum dilengkapi dengan fungsi lainnya yaitu pemanfaatan, pengelolaan dan penyusutan. Pengembangan aplikasi kearsipan dinamis dengan nama Arjuna yang terintegrasi dengan aplikasi e-Office. Untuk itu Dispusip telah mengirimkan surat ke Diskominfotik pada tanggal 13 April 2024 dengan nomor e-0314/KA. 05.00 perihal - Pengembangan Aplikasi Kearsipan.

Gambar 10. Tahapan Proses Pengelolaan Arsip Dinamis (Arjuna)

f. Website Dispusip

Website ini berisikan berbagai informasi terkait perpustakaan dan kearsipan, alamat dan kontak, berita terkini, tutorial, artikel & opini, event & kalender serta tautan ke media sosial milik Dispusip.

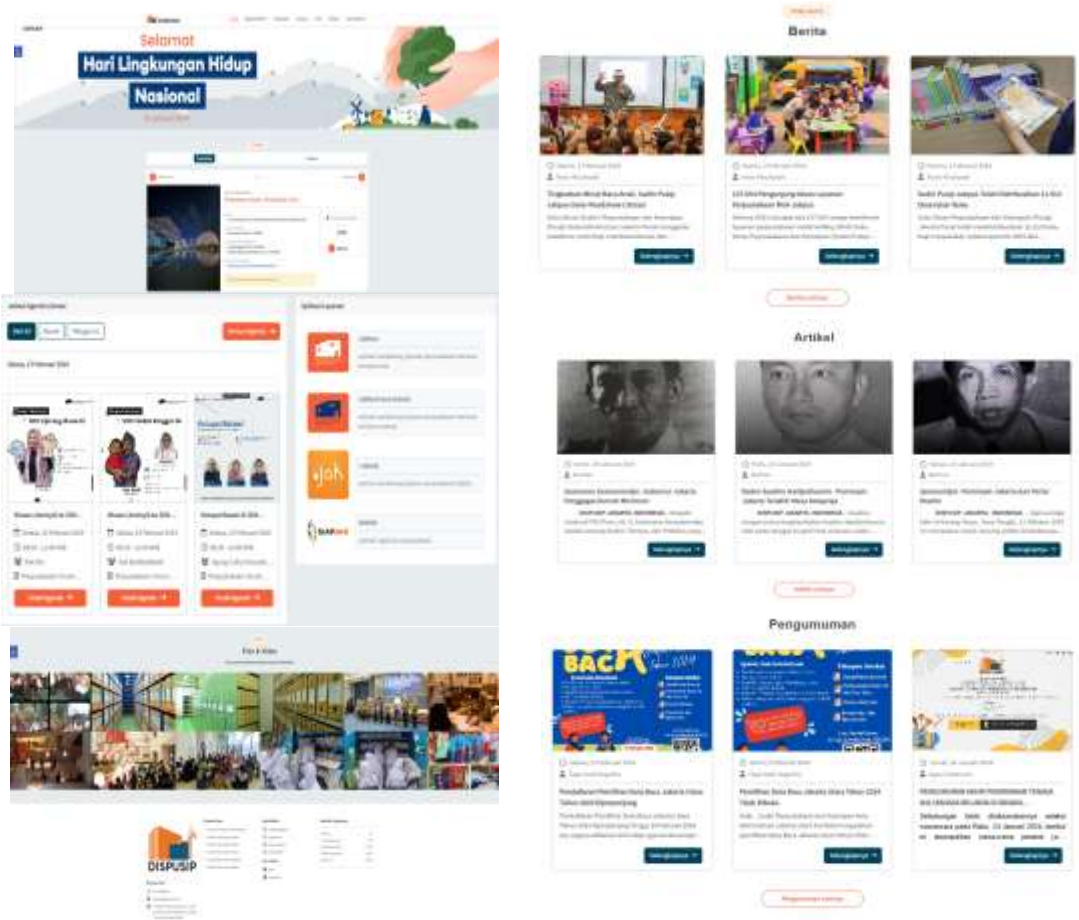

Gambar 11. Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

4. Layanan

a. Layanan Perpustakaan

Untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan informasi bagi masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyediakan berbagai layanan perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui Perpustakaan Umum Tingkat Provinsi maupun Perpustakaan Tingkat Kota baik secara luring ataupun daring:

1) Layanan Membaca di Tempat
2) Layanan Bercerita
3) Bimbingan Pemustaka
4) Layanan paket peminjaman koleksi
5) Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR)

Gambar 12. Kegiatan Layanan Perpustakaan

b. Layanan Kearsipan

Berdasarakan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2010 tentang Prosedur Pelayanan Kearsipan, ruang lingkup pelayanan arsip di Provinsi DKI Jakarta meliputi:

1) Layanan konsultasi dan pendampingan/asistensi penataan arsip
2) Layanan pemanfaatan Arsip Statis
3) Layanan penggandaan Arsip
4) Sosialisasi Penyelamatan, Pemanfaatan, dan Informasi Arsip
5) Layanan penataan arsip
6) Penyediaan akses arsip statis
7) Layanan digitalisasi arsip

Gambar 13. Kegiatan Layanan Kearsipan

5. Anggaran dan Sumbernya

Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Pada penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp321.334.548.872 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp276.073.436.690 dan Belanja Modal Rp45.261.112.182 Untuk Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp324.969.289.485 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp276.349.677.089 dan Belanja Modal Rp48.619.612.396.

Tabel 3. Anggaran Tahun 2025

NO	SKPD/UKPD	PENETAPAN APBD			PERUBAHAN APBD		
		Keg.	Sub Keg.	Anggaran (Rp)	Keg.	Sub Keg.	Anggaran (Rp)
Belanja Operasi & Belanja Modal							
1	Dinas	15	43	213,873,340,885	15	43	215,350,135,266
2	Sudin Jakpus	9	25	11,676,424,411	9	25	11,108,979,872
3	Sudin Jakut	9	25	15,770,783,294	9	25	14,193,923,375
4	Sudin Jakbar	9	25	15,787,812,471	9	25	15,234,017,571
5	Sudin Jaksel	9	25	12,342,316,622	9	25	13,006,839,451
6	Sudin Jaktim	9	25	14,836,982,507	9	25	15,453,285,760
7	UP Perpus Jakarta	7	18	37,046,888,682	7	18	40,622,108,190

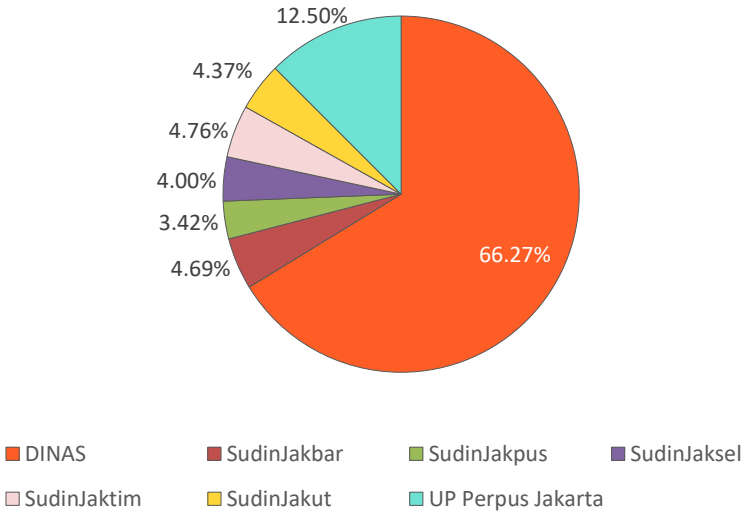

Gambar 14. Anggaran Belanja Operasi dan Belanja modal sesuai PD/UKPD Tahun 2025

F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memperoleh nilai 85,75 dengan predikat A. Terdapat beberapa rekomendasi dari Inspektorat guna perbaikan SAKIP Dispusip pada tahun berikutnya.

Tabel 4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip
1	Agar perangkat daerah menunjukkan upaya – upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa : b. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai c. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART d. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (on the right track), menantang, dan realistis e. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	a. Indikator tujuan Dispusip mengacu pada salah satu dimensi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yaitu Budaya Literasi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas dan BPS. Untuk indikator sasaran mengacu pada Rencana Strategis dari Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional yang merupakan penanggungjawab urusan. b. Dalam Indikator Ini Telah Memenuhi Kriteria SMART. Mulai dari indikator tidak multitafsir, terdapat target dan formula pengukuran target, kemudian

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip
		indikator juga mendukung rencana strategis Dispusip dan yang terakhir indikator juga menyebutkan batas kapan akan tercapai. c. Dengan menerapkan kriteria SMART kinerja bisa dicapai. Pengumpulan capaian kinerja sudah menggunakan aplikasi eMonev. d. Dispusip melakukan rapat koordinasi terkait monitoring evaluasi kinerja dan anggaran setiap bulan untuk menganalisis progres kinerja, inventarisasi permasalahan dan hambahatan dalam pencapaiannya, untuk perbaikan dan peningkatan kinerja sebelumnya agar lebih baik kedepannya.
2	Agar perangkat daerah menunjukkan upaya – upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa : a. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja. c. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	a. Upaya – upaya Dispusip dalam pengumpulan dokumen kinerja sudah memanfaatkan aplikasi yaitu e-Monev dan kertas kerja untuk memberikan masukan dan koreksi sebelum diupload ke e-monev. b. Sebagai tindak lanjut evaluasi pengukuran kinerja telah dilakukan setiap triwulan pada sistem emonev. Untuk pelaporan kinerjanya sesuai dengan Insekda nomor e-0028 tahun 2025 tentang pelaksanaan pelaporan evaluasi hasil rencana kerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2025. c. Dalam penganggaran dinas perpustakaan dan kearsipan mengacu pada target kinerja yang akan dicapai, agar anggaran tetap efisien.
3	Agar perangkat daerah menunjukkan upaya – upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa dokumen pelaporan kinerja belum dipertahankan selama 1 tahun.	Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dispusip dalam mempertahankan prestasi yang telah diraih selama 1 tahun yaitu melaksanakan penyediaan dan pengembangan koleksi perpustakaan secara berkelanjutan, baik fisik maupun digital, menyelenggarakan kegiatan literasi dan promosi perpustakaan secara rutin untuk menjaga partisipasi

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip
		dan minat masyarakat, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan kearsipan dan pengelolaan perpustakaan.
4	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	Sudah dilakukan evaluasi akuntabilitas secara berjenjang melalui pelaporan kinerja triwulan dengan eMonev dan eTPP dimana atasan memvalidasi capaian kinerja sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan.

G. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB I Pada bagian awal laporan disampaikan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disertai dengan maksud, tujuan dan manfaat penyusunan laporan, kedudukan organisasi serta isu strategis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bab I juga menyajikan informasi sumber daya yang dimiliki dan sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II Selanjutnya, Bab II menyajikan informasi terkait Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2025, informasi mengenai target kinerja serta penganggaran disajikan secara lebih rinci di dalamnya untuk menginformasikan penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan. pada tahun 2025.

BAB III Evaluasi terhadap kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disajikan pada Bab III, mencakup capaian kinerja terhadap tujuan/sasaran, program, perjanjian kinerja, analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja disampaikan di dalamnya. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas terkait anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2025.

BAB IV Pada bab terakhir ini, kesimpulan atas kinerja dan akuntabilitas serta Rencana Aksi, Kriteria Keberhasilan dan Hasil Yang Diharapkan pada Indikator KInerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disajikan sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

C. Rencana Anggaran Tahun 2025

D. Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Tahun 2025

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dimana tidak terdapat visi dan misi Kepala Daerah terpilih, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasaran menggunakan pendekatan yang berbeda. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD Tahun 2023-2026 yang mempertimbangkan antara lain : Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta 2005-2025; Agenda Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dan Isu-isu strategis 2023-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya yaitu: dimensi lingkungan bangun (*built environment*), dimensi perekonomian (*economic)*, dimensi manusia (*human*), dan dimensi pemerintahan (*governance*). Keempat dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 adalah JAKARTA: KOTA UNTUK SEMUA, yang merupakan konsep kota yang seimbang dan mempromosikan inklusivitas dimana semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota (*right to the city*) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, untuk urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan ditempatkan pada :

1. Tujuan

a. Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

Perekonomian inklusif merupakan suatu kondisi perekonomian yang menjamin akses dan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh warga tanpa terkecuali dengan mengedepankan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Jakarta.

Kata kunci ini kemudian diturunkan menjadi sasaran ‘tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah’. Kata kunci selanjutnya yaitu terkait daya saing, mengadopsi *global competitiveness index* berupa kapasitas dan potensi Jakarta bersaing dengan kota global lainnya untuk menarik talenta sumber daya manusia terbaik dan mitra-mitra pembangunan

lainnya. Kata kunci ini kemudian dirumuskan menjadi sasaran 'Menguatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi'. Kata kunci berikutnya terkait penghidupan layak adalah suatu kondisi dimana tersedianya peluang untuk bekerja, baik melalui ketersediaan lapangan pekerjaan, terbukanya kesempatan untuk berwirausaha, maupun resiliensi tenaga kerja terhadap tantangan. Untuk mencapai hal tersebut dirumuskan sasaran 'Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja'. Kata kunci terakhir yaitu pemerataan kesejahteraan, hal ini sejalan dengan konsep RPD berupa kota yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap memperhatikan dan tidak meninggalkan golongan miskin dan rentan, sehingga dirumuskan sasaran 'Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial. Keberhasilan pencapian tujuan ini dilakukan pengukuran melalui Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk. Hasil pengukuran indeks ini diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

b. Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: a. Manajemen Perubahan, b. Penguatan pengawasan, c. Penguatan akuntabilitas, d. Penataan Organisasi, e. Penataan tatalaksana, f. Penataan manajemen SDM, g. Deregulasi Kebijakan, h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk mengukur keberhasilan sasaran Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas melalui Indeks Reformasi Birokrasi.

2. Sasaran

a. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi
Indeks Daya Saing Daerah merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Indeks ini menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, dengan 23 Dimensi dan 90 indikator. Indeks Daya Saing Daerah diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Untuk mengukur keberhasilan kinerja diukur melalui Indeks Daya Saing Daerah.

b. Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil

pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM. Pengukuran kinerja melalui Indeks Kepuasan Masyarakat.

3. Strategi

Untuk pencapaian kinerja, maka strategi yang dilaksanakan untuk Urusan Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya literasi
b. Melakukan pendataan, pengolahan, preservasi, pengalihmediaan, dan/atau akuisisi naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan
c. Pelayanan dan pemanfaatan arsip autentik, pengelolaan data dan informasi kearsipan serta penguatan strategi dan sistem pelayanan

4. **Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan serta Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Untuk mendukung tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, maka dijabarkan melalui Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Renstra) Tahun 2023-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Tujuan dan Sasarannya sebagai berikut :

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target KInerja			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat	Nilai Budaya Literasi	Nilai	71,3	71,4	71,5	71,6
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Penyelenggaraan Layanan Arsip yang Akuntabel	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	80,82	81,32	81,82	82,32
3.	Meningkatnya Pembangunan	Indeks Pembangunan	Indeks	19,51	19,71	19,91	20,2

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target KInerja			
				2023	2024	2025	2026
	Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Literasi Masyarakat					
4.	Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Kearsipan Daerah, Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan, Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan yang Diawasi dan Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan	Nilai	77	78	79	80

Tabel 6. Program dan Target Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target KInerja			
				2023	2024	2025	2026
1	Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persentase	24,8	25	25,25	25,5
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0588	0,0625	0,0667	0,0714
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0003	0,0004	0,0005	0,0006
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Persentase	7,4	9,9	12,4	14,9
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	72,61	72,9	73,21	73,51
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Capaian Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang Menjadi Koleksi Daerah	Persentase	25	27,5	30	32,5
		Persentase Capaian Naskah Kuno Milik Daerah Yang Dilestarikan	Persentase	10	20	30	40

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target KInerja			
				2023	2024	2025	2026
3	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan	Persentase	36,91	39,36	42,41	45,45
		Persentase lembaga (OPD.BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK	Persentase	61,11	74,07	87,03	100
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SASARAN STRATEGIS				
1	Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat	Nilai Budaya Literasi	72,09	Nilai
2	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Penyelenggaraan Layanan Arsip yang Akuntabel	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	93,11	Nilai
3	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,91	Indeks

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
	Kegemaran Membaca Masyarakat			
4	Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Kearsipan Daerah, Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan, Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan yang Diawasi dan Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan	93,61	Nilai
SASARAN RELEVAN LAINNYA				
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	Persentase
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	Nilai
7	Peningkatan Penggunaan Peroduk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100	Persentase
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100	Persentase
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	Persentase
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	Persentase
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil	100	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
	pemeriksaan eksternal (BPK)	pemeriksaan eksternal (BPK)		

B. Rencana Anggaran Tahun 2025

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran APBD Tahun 2025 sebesar Rp 321,334,548,872 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp276,073,436,690 dan Belanja Modal Rp45,261,112,182 Sedangkan untuk anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp324,969,289,485 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp276.349.677.089 dan Belanja Modal Rp48.619.612.396. Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2025, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8. Anggaran Tahun 2025 berdasarkan Program

No.	Program	Keg.	Subkeg.	Penetapan APBD	Perubahan APBD
1	Program Pembinaan Perpustakaan	2	14	89.364.107.092	93.440.124.016
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	4	8	1.154.952.419	876.551.810
3	Program Pengelolaan Arsip	3	4	32.299.281.435	26.787.019.705
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6	17	198.516.207.926	203.865.593.954
TOTAL		**15**	**43**	**321.334.548.872**	**324.969.289.485**

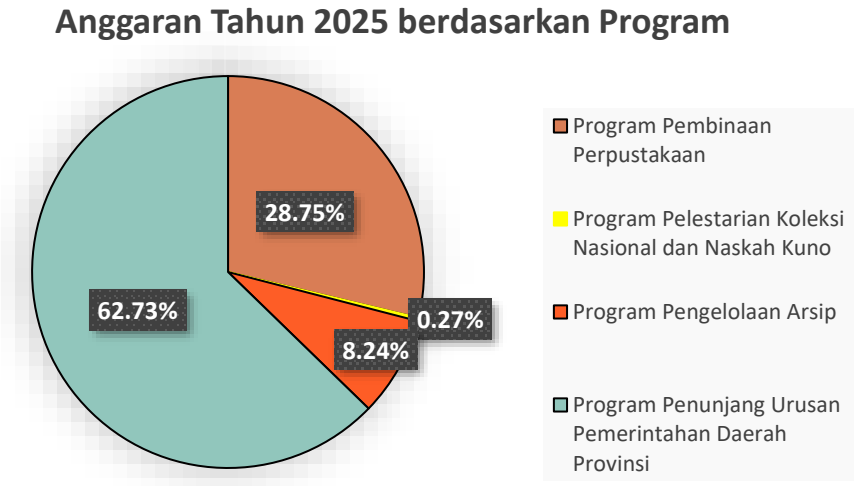

Gambar 15. Anggaran Tahun 2025 berdasarkan Program

C. Target Kinerja dan dan Alokasi Anggaran Tahun 2025

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki 4 program, yaitu Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, Program Pengelolaan Arsip, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri atas : 15 Kegiatan dan 43 Sub kegiatan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi dan Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 9. Target Kinerja dan AnggaranTahun 2025

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran (Penetapan)		Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan)	
				K	Rp	K	Rp
1	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN LITERASI DAN KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19.91		19.96	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				89,364,107,092		93,440,124,016
		Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persen	34.8		34.8	40,299,065,082
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0.067		0.067	29,034,296,332
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0.001		0.00053	424,011,114
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Persen	12.4		12.4	2,001,473,156
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	73.21		57.23	21,681,278,332
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				68,843,566,894		71,758,845,684

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran (Penetapan)		Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan)	
				K	Rp	K	Rp
		Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A	%	66.67		66.67	
		Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	45		45	
		Persentase tenaga perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai standar nasional perpustakaan	%	81.46		81.46	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan manajemen layanan TIK	Perpustakaan	1	1,968,016,470	1	1,872,487,060
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	7	35,043,212,104	7	38,009,067,700

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran (Penetapan)		Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan)	
				K	Rp	K	Rp
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	Eksemplar	24000	12,167,769,301	24000	12,644,820,285
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	951	1,516,259,156	951	1,459,373,156
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan	233	672,394,617	233	542,100,000
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	5142	569,879,019	5142	389,011,114

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran (Penetapan)		Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan)	
				K	Rp	K	Rp
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	1	336,401,239	1	303,220,108
	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	Perpustakaan	1	145,158,941	1	114,290,214
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	132458	16,389,476,047	132458	16,389,476,047
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	2	35,000,000	2	35,000,000
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca	%	10.1	20,520,540,198	10.1	21,681,278,332
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	235	8,535,387,764	235	7,260,987,223

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran (Penetapan)		Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan)	
				K	Rp	K	Rp
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Perpustakaan	842	8,811,065,298	874	11,324,883,191
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	180	2,540,042,664	180	2,509,920,664
	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	12	634,044,472	12	585,487,254
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				1.154.952.419		876.551.810
		Persentase Capaian Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang Menjadi Koleksi Daerah	Persen	30		30	
		Persentase Capaian Naskah Kuno Milik Daerah Yang Dilestarikan	Persen	30		30	

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran (Penetapan)		Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan)	
				K	Rp	K	Rp
	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah yang di Lestarikan	%	30	565,466,887	30	346,776,278
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	50000	142,524,198	50000	121,128,198
	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penerbit	10	422,942,689	10	225,648,080
	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	%	100	126,441,920	100	70,941,920
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry	50000	62,622,960	50000	34,522,960
	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	1	63,818,960	1	36,418,960
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	%	30	149,741,952	30	146,907,952

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran (Penetapan)		Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan)	
				K	Rp	K	Rp
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	75	55,872,974	75	54,049,974
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar	50	93,868,978	50	92,857,978
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diselamatkan dan Dikembangkan	%	25	313,301,660	25	311,925,660
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	600	302,823,392	600	301,447,392
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	650	10,478,268	650	10,478,268

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran (Penetapan)		Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan)	
				K	Rp	K	Rp
2	MENINGKATNYA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN DAERAH, KAPABILITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN YANG DIAWASI DAN MENINGKATNYA MUTU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan	Nilai	93.61		93.61	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	198,516,207,926	4	203,865,593,954
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	4	104,321,897,756	4	104,316,897,756
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	235	104,269,649,356	235	104,269,649,356
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	52,248,400	12	52,248,400
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	4	5,171,581,566	4	5,475,227,706

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran (Penetapan)		Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan)	
				K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	792,801,046	10	785,974,045
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	22	1,706,583,984	22	2,514,764,127
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	878,233,261	12	857,480,536
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	84,729,257	8	67,345,905
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	7	1,116,289,969	7	755,713,845
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	68	592,944,049	68	493,949,248
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	11,047,946,352	4	14,213,883,473

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran (Penetapan)		Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan)	
				K	Rp	K	Rp
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	116	11,047,946,352	116	14,213,883,473
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	26,440,033,783	4	26,622,429,666
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	84	9,972,831,159	84	9,759,436,854
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	68	692,038,420	68	692,038,420
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	84	15,775,164,204	84	16,170,954,392
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	51,374,319,343	4	53,093,041,227
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	110	1,282,155,199	110	1,285,627,599

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran (Penetapan)		Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan)	
				K	Rp	K	Rp
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	118	99,093,524	68	57,839,833
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	212	1,165,792,146	212	769,254,635
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	48,827,278,474	11	50,980,319,160
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	100	160,429,126	100	144,114,126
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	160,429,126	3	144,114,126
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				32.299.281.435		26.787.019.705
		Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan	Persen	42.41		42.41	
		Persentase lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK	Persen	87.03		87.03	

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran (Penetapan)		Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan)	
				K	Rp	K	Rp
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) Yang Membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan	Persen	37.35	8,953,020,785	37.35	6,277,386,257
	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Arsip	50000	4,202,446,123	50000	3,834,046,497
	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	324	4,750,574,662	324	2,443,339,760
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Presentase arsip statis yang dikelola	%	79.42	15,024,445,580	79.42	15,024,445,580
	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	18000	15,024,445,580	18000	12,112,728,908
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase simpul jaringan sistem informasi kearsipan yang dikelola	%	100	8,321,815,070	100	8,396,904,540

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran (Penetapan)		Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan)	
				K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	16127	8,321,815,070	16127	8,396,904,540
TOTAL					**321,334,548,872**		**324,969,289,485**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Analisa Capaian Kinerja

C. Realisasi Anggaran

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 diukur dengan membandingkan realisasi setiap indikator kinerja dan target setiap indikator kinerja. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah dijanjikan.

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025 antara Gubernur dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ditetapkan 2 (dua) jenis sasaran yang terdiri dari 11 (sebelas) indikator kinerja :

1. Sasaran Strategis dengan 4 sasaran, 4 target kinerja.
2. Sasaran Relevan Lainnya dengan 7 sasaran, 7 target kinerja.

Tabel berikut merupakan realisasi capaian dari Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025.

Tabel 10. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Nilai Budaya Literasi	Nilai	72.09	78.76	109.25%	
2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	93.11	94.36	101.34%	
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19.91	19.96	100.25%	
4	Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan	Nilai	93.61	93.73	100.13%	
5	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persentase	100	93.75	93.73%	
6	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25	4	123.08%	
7	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase	80-100	84.85	100%	
8	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Persentase	100	100	100%	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
9	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100	100	100%	
10	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71	88.20	124.22%	
11	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%	

Berdasarkan data di atas, realisasi 11 (Sebelas) target kinerja tersebut disimpulkan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 6 Target
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 Target
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 - 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Nilai Budaya Literasi	Nilai	71.3	71.4	72.09	71.37	72.09	78.76
2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	87.64	90.06	93.11	90.06	93.11	94.36
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19.51	19.71	19.91	19.57	19.78	19.96
4	Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan	Nilai	88.5	92.45	93.61	92.45	93.61	93.73

B. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan data di atas, maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing sasaran stretegis/Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran relevan lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Nilai Budaya Literasi dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

   Nilai Budaya Literasi merupakan dimensi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan yang memuat aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, serta menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat.

   Angka yang menunjukkan rata-rata dari:

   a) Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir,
   b) Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengakses internet dan
   c) Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

   Dengan rumus penghitungan Slovin, survei sudah dilakukan pada 2.627 responden di seluruh kota administrasi DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu, dengan sebaran sebagai berikut:

   Tabel 12. Jumlah Responden Nilai Budaya Literasi Berdasarkan Kota Administrasi

Kab/Kota	Realisasi Jumlah Responden (Orang)	
	2024	2025
Kep. Seribu	8	404
Jakarta Selatan	448	452
Jakarta Timur	471	427
Jakarta Pusat	164	430
Jakarta Barat	402	472
Jakarta Utara	321	442
DKI Jakarta	**1814**	**2627**

   Pada tahun 2025 target indikator kinerja nilai budaya literasi adalah sebesar 78.76 poin berdasarkan hasil pengukuran Nilai Budaya Literasi oleh Tenaga Ahli sehingga capaian kinerjanya 109.25% jika dibandingkan dengan skor tahun 2024 sebesar 72.9 poin.

   Tabel 13. Indikator penyusun Budaya Literasi

No.	Indikator	Nilai 2024	Nilai 2025
1	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik (persen)	75,47	82.49
2	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengakses internet (persen)	96,1	95.24

No.	Indikator	Nilai 2024	Nilai 2025
3	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat (persen)	44,7	58.55

Tingkat pembacaan selain kitab suci yang mencapai 82.49% menunjukkan bahwa budaya literasi tradisional (membaca buku dan bahan cetak) masih sangat kuat. Namun, kebiasaan ini tampaknya lebih terkait dengan bentuk literasi cetak atau digital secara pribadi, bukan di fasilitas publik seperti perpustakaan atau taman bacaan.

Tingginya angka penggunaan internet (95.24%) menggambarkan bahwa internet telah menjadi alat utama dalam memperoleh informasi dan hiburan. Meski demikian, ini juga dapat menunjukkan bahwa sebagian besar orang beralih ke media digital untuk mencari informasi daripada mengunjungi perpustakaan fisik atau membaca buku cetak.

Nilai yang mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan meningkat menjadi 58.55%, ini menunjukkan bahwa masih ada banyak potensi untuk meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi, terutama dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya digital yang ada. Hal ini penting untuk menarik lebih banyak pengunjung ke perpustakaan dan taman bacaan agar dapat mendukung budaya literasi secara lebih luas.

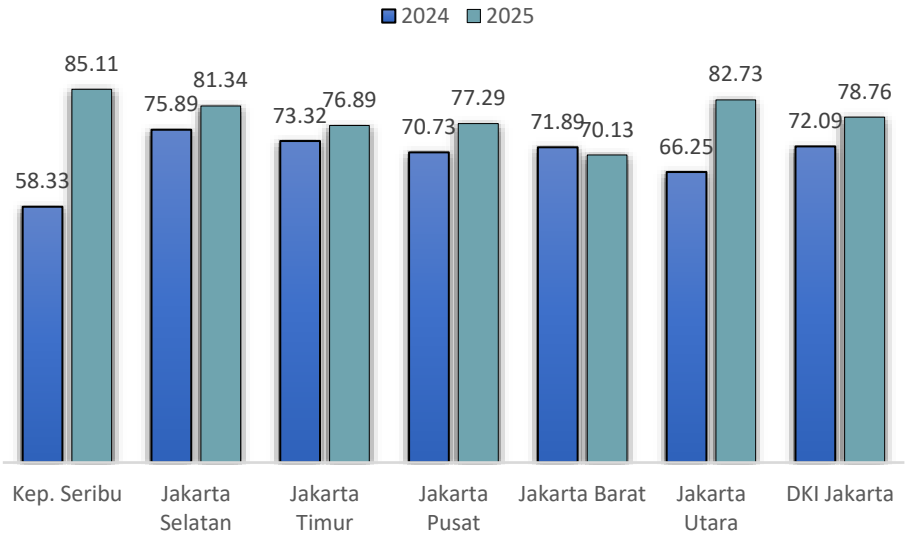

Gambar 16. Nilai Budaya Literasi Berdasarkan Kab/Kota Administrasi di DKI Jakarta

Gambar 16 menunjukkan tren peningkatan nilai budaya literasi di seluruh wilayah DKI Jakarta dari tahun 2024 ke 2025. Setiap wilayah mengalami kenaikan skor, dengan lonjakan paling signifikan terjadi di Kepulauan Seribu, yang meningkat dari 58,33 menjadi 85,11. Wilayah lain seperti Jakarta Utara dan Jakarta Barat juga menunjukkan kemajuan, masing-masing naik sebesar 16,48 dan 8,24 poin. Sementara itu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat mengalami peningkatan skor tinggi di atas 75. Secara keseluruhan, DKI Jakarta mencatat

kenaikan dari 72,09 menjadi 78,76, menandakan keberhasilan kebijakan program literasi yang diterapkan di provinsi.

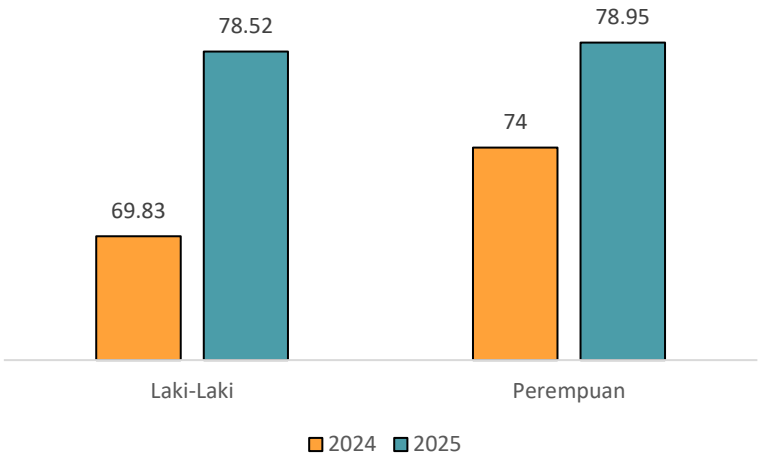

Gambar 17. Nilai Budaya Literasi per Jenis Kelamin

Nilai budaya literasi per jenis kelamin tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024. Gambar 17 menjelaskan bahwa laki-laki mulai seimbang dengan perempuan dalam berbagai aktivitas literasi, seperti membaca buku, artikel, atau mencari informasi melalui internet. Keterlibatan laki-laki dalam literasi penting, terutama dalam konteks pekerjaan profesional yang membutuhkan keterampilan membaca dan menulis untuk pengambilan keputusan atau komunikasi yang efektif. Meskipun demikian, tahun 2025 perempuan tetap lebih unggul dalam budaya literasi dibandingkan laki-laki dengan selisih skor 0.43 poin. Keterlibatan perempuan dalam budaya literasi lebih unggul karena peran sosial dan budaya yang mendorong perempuan untuk lebih sering terlibat dalam aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan, pengasuhan, atau tanggung jawab rumah tangga, yang secara alami melibatkan kebiasaan membaca dan menulis.

Gambar 18 menunjukkan bahwa pada tahun 2024 nilai budaya literasi didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai dosen/guru (negeri atau swasta). Nilai tertinggi yang dicapai oleh kelompok dosen/guru mencerminkan tingkat keterlibatan mereka yang sangat tinggi dalam budaya literasi. Hal ini tidak terlepas dari sifat profesi mereka yang menuntut keterlibatan aktif dalam aktivitas membaca, menulis, dan menyampaikan informasi secara terus-menerus. Namun di tahun 2025, nilai budaya literasi didominasi oleh pelajar SMA / SMK / MA. Kurikulum tingkat menengah atas menuntut keterampilan membaca dan menulis yang lebih intensif (analisis teks, karya ilmiah, tugas proyek), sehingga siswa lebih sering terlibat dalam aktivitas literasi dibanding kelompok pekerjaan lain. Selain itu, remaja SMA/SMK/MA cenderung memiliki kombinasi waktu luang dan akses ke sumber bacaan (perpustakaan sekolah, internet, media sosial edukatif). Akses digital yang lebih tinggi memungkinkan mereka mengonsumsi konten literasi secara lebih sering dibanding kelompok pekerja yang sibuk.

Kelompok buruh, termasuk pekerja pabrik, penjaga toko, dan pekerja konstruksi, memiliki skor budaya literasi yang paling rendah di antara pekerja lainnya baik di tahun 2024 maupun 2025. Tingkat literasi yang lebih rendah ini mungkin disebabkan oleh sifat pekerjaan mereka yang lebih mengandalkan keterampilan

praktis dan fisik. Namun, sebagian dari mereka tetap terlibat dalam literasi dasar, seperti membaca instruksi kerja atau mengisi formulir administratif. Untuk meningkatkan literasi di kalangan buruh, program pelatihan literasi dasar yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, seperti literasi numerik atau kemampuan membaca instruksi teknis, dapat memberikan manfaat yang signifikan. Selain itu, ada dua profesi yang mengalami penurunan nilai budaya literasi yaitu profesi lainnya dan pengusaha/pedagang. Sedangkan, pelajar SD/MI tidak masuk dalam hitungan nilai budaya literasi tahun 2025.

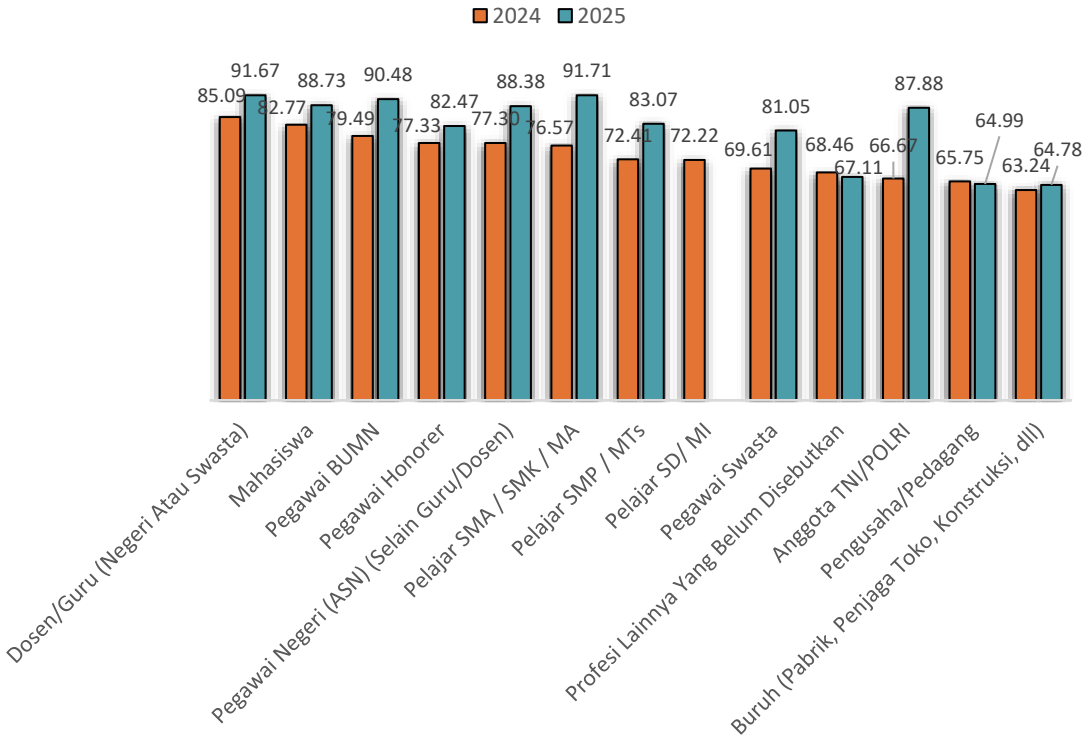

Gambar 18. Nilai Budaya Literasi Per Jenis Pekerjaan

Pengukuran terhadap usaha yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat, pengukuran dilakukan berdasarkan unsur pembangunan literasi Masyarakat (UPLM) (Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan, Perpustakaan ber SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan Promosi, Anggota Perpustakaan) dan aspek masyarakat (AM).

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)

UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan
UPLM 2 = Ketercukupan koleksi
UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan
UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan
UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP

UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan
UPLM 7 = Anggota perpustakaan

$$\text{Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat} = \sum \frac{\text{UPLM}_i}{\text{ALM}} \times 100$$

Keterangan :

UPLM_i	:	Variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat
AM	:	Jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan

Berdasarkan hasil pengumpulan data UPLM, maka dilakukan perhitungan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sesuai dengan buku Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI Tahun 2021. Adapun hasil perhitungan menghasilkan nilai IPLM seperti pada tabel berikut :

Tabel 14. UPLM dan IPLM DKI Jakarta Tahun 2024 dan 2025

No	Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai 2024	Nilai 2025
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,0046	0.0051
2	Ketercukupan Koleksi (UPLM2)	1,1804	1.2048
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,0067	0.0077
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)	0,3658	0.4035
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	3,9297	3.7217
6	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)	0,3993	0.4190
7	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	0,7044	0.8904
Nilai IPLM		**94,16** atau dikonversi menjadi **19,78**	**95,03** atau dikonversi menjadi **19,96**

Berdasarkan Tabel 14 dan Gambar 19, dapat dilihat bahwa unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu perpustakaan ber-SNP, mengalami penurunan sebesar 0,208 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus di DKI Jakarta pada tahun 2025 belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

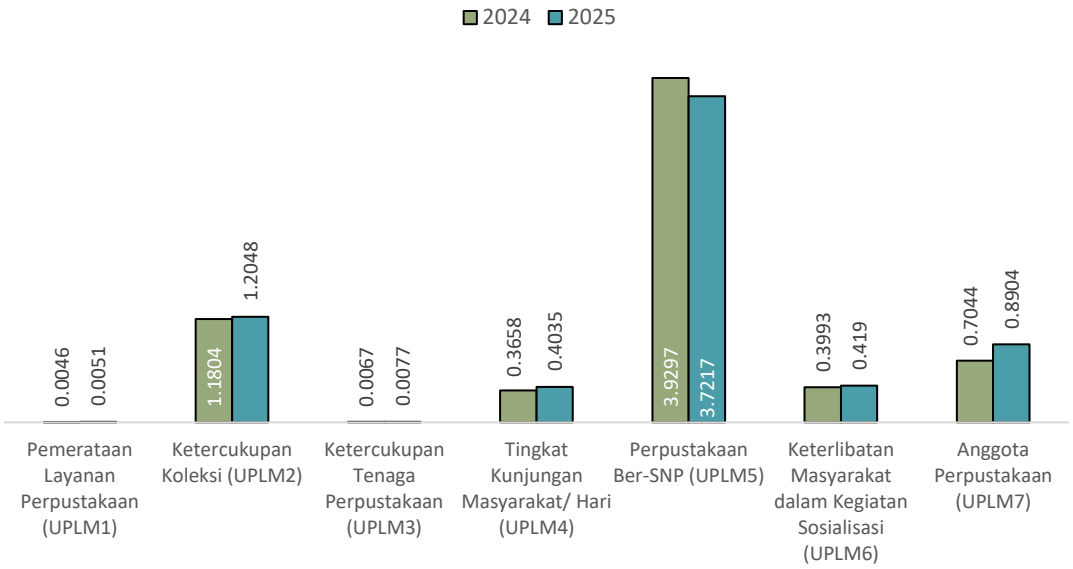

Gambar 19. Grafik Perbandingan UPLM Tahun 2024 dan 2025

Tabel 15. Rekapitulasi data UPLM per Kabupaten/Kota
DKI Jakarta tahun 2025

KAB/KOTA	Tahun	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM
Kepulauan Seribu	2025	0.0052	1.7988	0.0052	0.2670	2.7086	0.8116	0.6886	89.79
	2024	0.0052	1.8113	0.0052	0.2679	2.7086	0.8131	0.6916	90.04
Kota Jakarta Barat	2025	0.0052	1.9197	0.0082	0.6744	3.0708	0.2053	0.7682	95.03
	2024	0.0047	1.7138	0.0074	0.6115	3.0508	0.2012	0.8232	91.61
Kota Jakarta Pusat	2025	0.0051	0.6470	0.0078	0.3847	3.4541	0.5326	1.6273	95.12
	2024	0.0048	0.2169	0.0071	0.3696	4.7087	0.5092	0.6356	92.17
Kota Jakarta Selatan	2025	0.0049	0.6130	0.0083	0.3827	4.2614	0.2483	1.1885	95.81
	2024	0.0040	0.6338	0.0067	0.3203	4.2630	0.2197	1.0672	93.06
Kota Jakarta Timur	2025	0.0047	1.4326	0.0073	0.3880	4.4240	0.2379	0.4502	99.21
	2024	0.0040	1.4327	0.0061	0.3396	4.4239	0.2306	0.4503	98.39
Kota Jakarta Utara	2025	0.0054	0.8178	0.0092	0.3240	4.4116	0.4781	0.6196	95.22
	2024	0.0047	1.2741	0.0077	0.2860	4.4230	0.4219	0.5588	99.66

Pada Tabel 15 terlihat hasil pengukuran di tahun 2025 bahwa Kabupaten/Kota Kepulauan Seribu merupakan wilayah dengan nilai IPLM terendah yaitu sebesar 89,79 dan Kota Jakarta Timur memiliki nilai IPLM tertinggi yaitu 99,21 poin. Kabupaten/kota di provinsi DKI Jakarta seluruhnya memiliki kategori “Sangat Tinggi”.

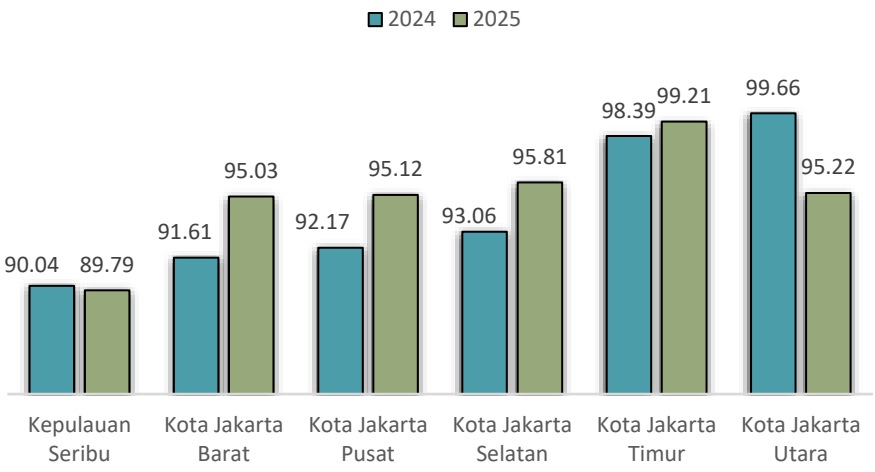

Gambar 20. Nilai IPLM Kabupaten / Kota di DKI Jakarta Tahun 2024 dan 2025

Pada Gambar 20 terlihat nilai IPLM berdasarkan Kabupaten/Kota dari tahun 2024 sampai 2025, nilai IPLM dari Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Utara mengalami penurunan. Meskipun, Kota Jakarta Utara sebelumnya pernah menjadi kota dengan nilai IPLM tertinggi di tahun 2024. Sekarang, nilai IPLM tertinggi diraih oleh Kota Jakarta Timur. Di tahun 2025, Kota Jakarta Timur unggul dalam unsur UPLM 5 menunjukkan bahwa pembinaan perpustakaan sesuai SNP di kota ini sudah maksimal.

Penurunan nilai IPLM di Kabupaten Kepulauan Seribu disebabkan oleh menurunnya unsur UPLM 2 (ketercukupan koleksi perpustakaan), UPLM 4 (pengunjung jumlah anggota perpustakaan), UPLM 6 (keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di bidang perpustakaan), dan UPLM 7 (perkembangan jumlah anggota perpustakaan). Meskipun, Kabupaten Kepulauan Seribu masih unggul dalam UPLM 6 (keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan) dibandingkan dengan kota lainnya di DKI Jakarta. Selain itu di tahun 2025, Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki nilai unsur yang lebih rendah dibandingkan dengan kota lain di DKI Jakarta yaitu UPLM 3 (ketercukupan tenaga perpustakaan), UPLM 4 (tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan), dan UPLM 5 (perpustakaan ber-SNP). Sedangkan, penurunan nilai IPLM di Kota Jakarta Utara tahun 2025 disebabkan oleh menurunnya unsur UPLM 2 (ketercukupan koleksi perpustakaan) dan UPLM 5 (perpustakaan ber-SNP). Meskipun, Jakarta Utara memiliki dua nilai unggul di tahun 2025 dibandingkan dengan kota/kabupaten lain yaitu UPLM 1 (pemerataan layanan perpustakaan) dan UPLM 3 (ketercukupan tenaga perpustakaan).

Pada tahun 2025, Perpusnas RI mengeluarkan peraturan baru tentang instrumen dan metodologi IPLM terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran IPLM dititikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70 persen sedangkan dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30 persen.

Tabel 16 IPLM Berdasarkan Perhitungan Perpusnas RI Tahun 2025

Kab/Kota	Variabel Koleksi	Variabel SDM	Variabel Pelayanan	Variabel Pengelolaan	Dimensi Kepatuhan	Dimensi Kinerja	Nilai IPLM
Jakarta Barat	0.28	0.222	0.378	0.278	0.251	0.328	30.46
Jakarta Pusat	0.161	0.175	0.176	0.255	0.168	0.216	16.23
Jakarta Selatan	0.491	0.447	0.484	0.454	0.469	0.469	7.24
Jakarta Timur	0.213	0.197	0.212	0.291	0.205	0.251	5.27
Jakarta Utara	0.284	0.222	0.39	0.273	0.253	0.332	30.81
Kepulauan Seribu	0.093	0.022	0	0	0.058	0	0.49
Provinsi DKI Jakarta	0.556	0.52	0.506	0.608	0.538	0.557	44.15

Berdasarkan hal tersebut, hasil pengukuran saat ini tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan, melainkan nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan. Pengukuran IPLM saat ini didasarkan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pengukuran berdasarkan kewilayahan. Dengan demikian, nilai yang dihasilkan saat ini tidak lagi nilai agregat yang dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam urusan perpustakaan. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin keadilan pengukuran serta kesesuaian dengan kerangka desentralisasi pemerintahan dan nilai IPLM saat ini tidak dapat dibandingkan antar wilayah.

Nilai yang dihasilkan dalam pengukuran ini sepenuhnya berbasis pada data yang dikirimkan dan diverifikasi oleh daerah. Data tersebut merefleksikan kondisi faktual yang terjadi di lapangan dan menjadi cermin objektif bagi kita semua. Kami memandang bahwa hasil ini bukan untuk menilai, melainkan untuk memetakan secara jujur kondisi pembangunan literasi saat ini. Dengan pemetaan yang lebih presisi, intervensi kebijakan dapat diarahkan pada dimensi dan indikator yang benar-benar membutuhkan penguatan.

Tercapainya Indikator Nilai Budaya Literasi dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian program dan kegiatan serta subkegiatan yang mendukung, diantaranya :

a. Program Pembinaan Perpustakaan

   Program pembinaan perpustakaan memiliki 4 (empat) indikator program yang mendukung indikator kinerja sasaran, yaitu :

   1) Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat

      Pemustaka menggunakan perpustakaan dengan memanfaatkan segala yang ada dalam sebuah perpustakaan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, baik memanfaatkan bahan koleksinya maupun menggunakan layanannya. Pemustaka terdiri dari pengunjung perpustakaan Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keliling, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan elektronik dan aktivitas pengunjung online. Penghitungan dilakukan melalui Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dibagi dengan jumlah penduduk DKI Jakarta dikali 100%

Target kinerja indikator tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat tahun 2025 adalah 34.80% atau 3.841.299 kunjungan. Realisasi kunjungan pada Perpustakaan Cikini dan PDS HB Jassin dan 5 Perpustakaan Wilayah Kota Administrasi serta aktivitas literasi berbasis online. Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan pada tahun 2025 sebanyak 4.067.941 orang atau tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat tercapai 36.85% sehingga capainnya 105.89%.

Aktivitas layanan perpustakaan meliputi layanan Stasionary, Perpustakaan Keliling, Layanan Inklusi, Wisata Literasi, Workshop Membaca, Layanan Bercerita, Baca Jakarta, Podcast, Book Launching, Kolaborasi Dengan Komunitas, Gerakan Literasi Jakarta #PekanLiterasirusun, Ramadhan Festival, Dorayaki, Ngabuburead, Ishoma, *Night At The Library*, Senara, Diskusi Buku Biografi, dan sebagainya. Jumlah anggota perpustakaan sebanyak 766.798 dibandingkan tahun 2024 sebanyak 194.085 orang dan 120.402 orang terverifikasi sebagai anggota utama (aktif) dibandingkan tahun 2024 sebanyak 14.467, dengan peminjaman koleksi sebanyak 93.840 eksemplar meningkat dari tahun 2024 sebanyak 75.168 eksemplar.

Gambar 21. Aktivitas Perpustakaan

2) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk

Cakupan koleksi meliputi seluruh koleksi yang dibiayai oleh APBD (Perpustakaan Umum Tingkat Provinsi, Perpustakaan Umum Tingkat Kota, Perpustakaan Umum Tingkat Kecamatan, Perpustakaan Umum Tingkat Kelurahan, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat). Berdasarkan standar IFLA, ketercukupan koleksi peprustakaan dihitung dengan rasio jumlah koleksi dibandingkan dengan jumlah penduduk/anggota yang dilayani. Rekomendasi IFLA untuk koleksi perpustakaan umum adalah minimal 2-3 eksemplar buku per penduduk, dengan penambahan koleksi tahunan sebesar 250 – 300 judul per 1000 penduduk per tahun. Jumlah koleksi pada akhir 2022 adalah 1.221.314 eksemplar atau 0.0545 dari jumlah penduduk sebanyak 11.204.714 orang. Untuk tahun 2023, jumlahnya meningkat menjadi 1.356.552 eksemplar atau rasio koleksi perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk menjadi 0,0605. Tahun 2024 rasionya meningkat menjadi 0,0634 dari target kinerja 0,0625 atau realisasinya mencapai 101,4 %, ada penambahan koleksi sebanyak 125.757 eksemplar sehingga total koleksi

menjadi 1.438.414 eksemplar. Tahun 2025, ketercapaian rasionya meningkat menjadi 0.067 dengan penambahan koleksi sebesar 132.543 eksemplar sehingga total koleksi tercetak menjadi 1.570.957 eksemplar.

Tabel 17. Realisasi Pengadaan Buku Tahun 2025

No	PD/UKPD	Jumlah Judul	Jumlah Eksp
1	Dinas	8.083	26.585
2	Sudin Jakarta Pusat	3.492	19.000
3	Sudin Jakarta Utara	3.408	21.000
4	Sudin Jakarta Barat	2.174	21.000
5	Sudin Jakarta Selatan	2.857	21.000
6	Sudin Jakarta Timur	4.333	23.985
	Jumlah	**24.317**	**132.543**

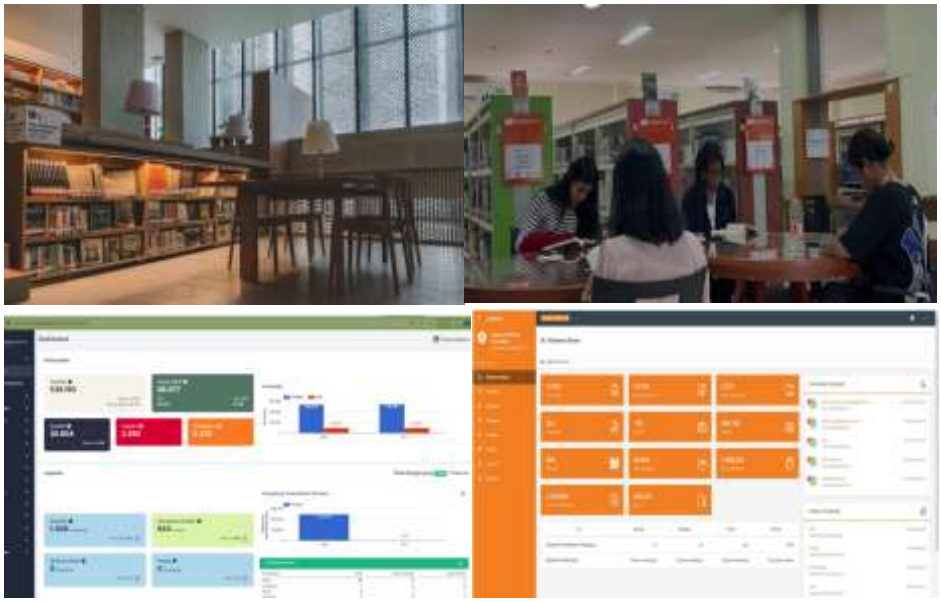

Gambar 22. Koleksi Perpustakaan

3) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk

Perbandingan jumlah tenaga perpustakaan (Perpustakaan Umum Provinsi, Kab/Kota, Kec, Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat), Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi terhadap jumlah penduduk. Sampai tahun 2024, rasio ditargetkan meningkat menjadi 0.0003, sampai dengan Triwulan IV telah dilaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan menuju Standar Nasional Perpustakaan sebanyak 1.727 orang sehingga jumlah keseluruhan menjadi 3.156 orang atau telah tercapai target yang ditetapkan rasio 0.0003 dari jumlah penduduk.

Sampai tahun 2025, rasio ditargetkan meningkat menjadi 0.0005, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan menuju

Standar Nasional Perpustakaan pada 6.310 orang sehingga realisasi rasionya sebesar 0.00057 dari jumlah penduduk.

4) Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar

Perpustakaan umum yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), dengan komponen SNP yaitu standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Pengukuran kinerja ini dihitung melalui Jumlah perpustakaan umum yang memenuhi SNP dibagi Jumlah perpustakaan umum dikali 100%. Sampai dengan tahun 2022 Perpustakaan yang telah memenuhi standar nasional perpustakaan adalah 4,9 %, tahun 2023 meningkat menjadi 8,14%, dan tahun 2024 meningkat menjadi 11,4%.

Pada tahun 2025, target kumulatif perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) adalah 12,4% dari 324 Perpustakaan RPTRA yaitu sebesar 4 Perpustakaan RPTRA yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) tahun 2025 adalah 11,9% pada Triwulan 2 dan triwulan 4 sebesar 12,4%.

Terdapat beberapa usaha yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta terhadap Perpustakaan RPTRA binaan di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 sesuai dengan 4 (Empat) aspek pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yaitu Koleksi Perpustakaan, Sarana dan Prasarana, Pelayanan Perpustakaan, dan Pendampingan Pendaftaran Nomor Pokok Perpustakaan dan Dalam melaksanakan kegiatan Monitoring, dibentuk Tim Monitoring Perpustakaan RPTRA Dalam Rangka Pembinaan Prioritas Perpustakaan RPTRA sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) tahun 2024.

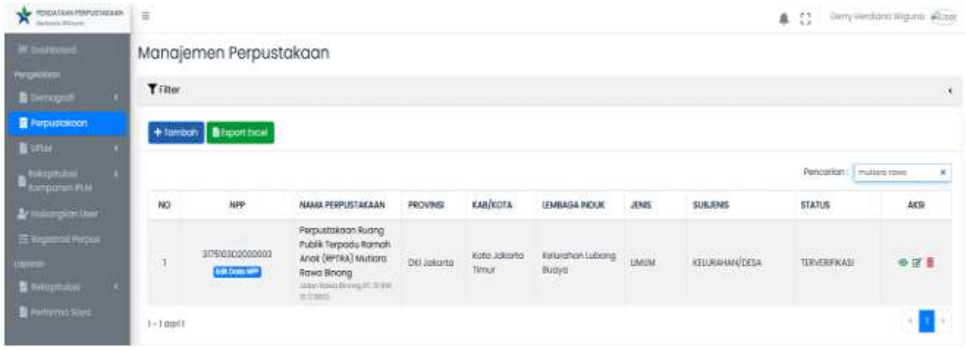

Gambar 23. Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)

5) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi dan pengetahuan dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, pengukuran tingkat kegemaran membaca dibagi ke dalam tiga fase utama, yaitu fase pra membaca, fase saat membaca, dan fase pasca membaca. Fase pra membaca membentuk motivasi dan kesiapan mental, fase saat membaca mengukur keterlibatan dan strategi kognitif, fase pasca membaca menunjukkan hasil dan dampak dari proses membaca. Terdapat perbedaan teknik pengukuran antara

tahun 2024 dan 2025, tahun 2024 menggunakan 5 indikator pengukuran yaitu frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah bahan bacaan, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet. Hasil pengukuran tingkat kegemaran membaca tahun 2024 adalah 72,93 dengan kategori tinggi, kemudian untuk hasil tahun 2025 adalah 73,26 dari target sebesar 73.21 dengan kategori sedang sehingga capaian Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2025 adalah 100.07 %. Ada kenaikan yang sangat tipis dari tahun sebelumnya.

Tabel 18. Fase TKM DKI Jakarta

No	Aktivitas Membaca	2025	No	Aktivitas Membaca	2024
1	Pra Membaca	65.05	1	Frekuensi Membaca	74.12
2	Saat Membaca	71.24	2	Durasi Membaca	75.76
3	Pasca Membaca	79.67	3	Jumlah Bahan Bacaan	68.99
			4	Frekuensi Akses Internet	79.31
			5	Durasi Akses Internet	66.03
TKM		**73.26**	**TKM**		**72.93**

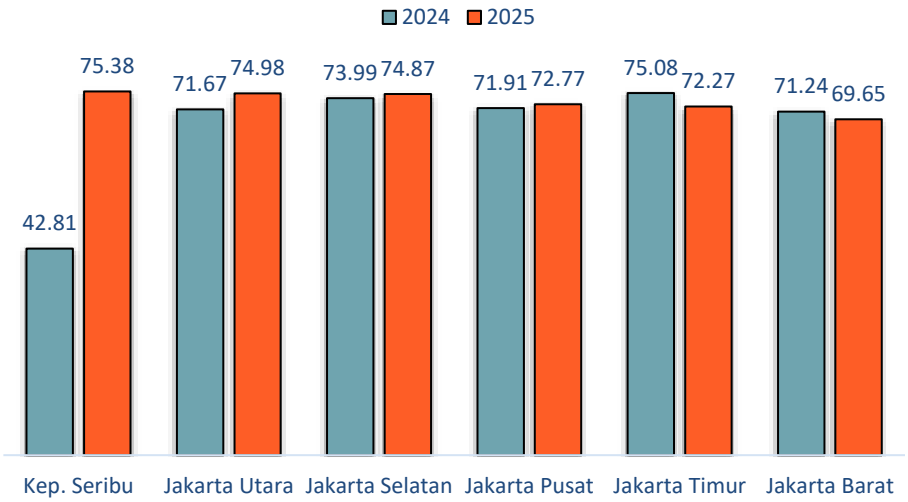

Gambar 24. Skor TKM Berdasarkan Kota/Kabupaten Administrasi

Gambar 24 menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Seribu mengalami peningkatan skor TKM yang sangat signifikan dan menjadi wilayah dengan skor TKM tertinggi di antara kota lainnya. Meskipun pada tahun 2024, Kepulauan Seribu pernah menjadi Kabupaten dengan skor TKM terendah di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menandakan bahwa kegiatan kampanye literasi, lomba membaca, dan gerakan literasi mendorong masyarakat Kepulauan Seribu untuk menjadikan membaca sebagai kebiasaan. Sementara itu, wilayah Jakarta Timur, Jakarta Pusat,

dan Jakarta Barat memerlukan intervensi khusus karena skornya berada di bawah rata-rata provinsi.

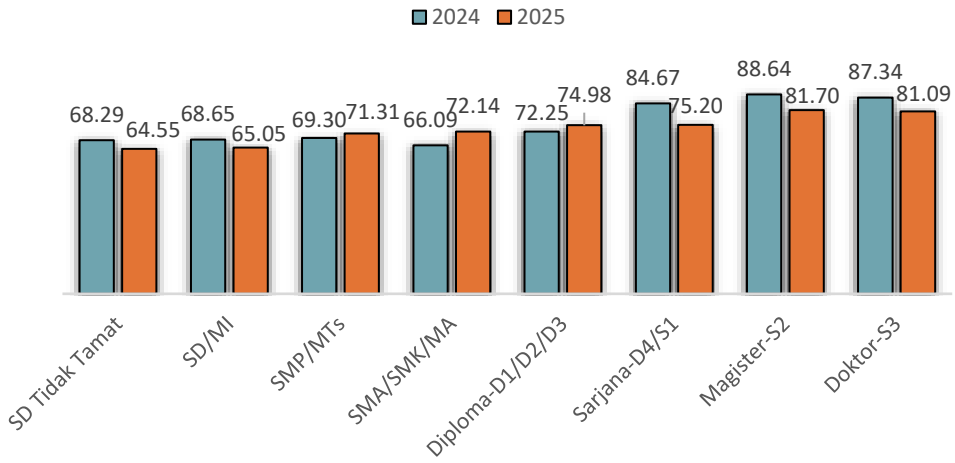

Gambar 25. Nilai TKM Berdasarkan Pendidikan

Gambar 25 menunjukkan tingkat kegemaran membaca masyarakat DKI Jakarta berdasarkan jenjang pendidikan untuk tahun 2024 dan 2025. Secara umum, terdapat tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada kelompok pendidikan menengah dan tinggi. Pada tahun 2024, nilai tertinggi tercatat pada jenjang Magister (81,70) dan Doktor (81,09), sementara jenjang pendidikan dasar seperti SD Tidak Tamat dan SD/MI berada di kisaran 68. Namun, pada tahun 2025, hampir semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan, dengan nilai tertinggi pada jenjang Magister (88,64) dan Sarjana (84,67). Bahkan jenjang SMA/SMK/MA menunjukkan lonjakan dari 66,09 menjadi 72,14. Sebaliknya, jenjang SD Tidak Tamat dan SD/MI justru mengalami penurunan nilai kegemaran membaca. Pola ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk gemar membaca. Selain itu, peningkatan pada tahun 2025 mencerminkan keberhasilan program literasi yang lebih menyasar kelompok berpendidikan tinggi, meskipun tantangan masih ada pada kelompok pendidikan dasar yang perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan literasi inklusif.

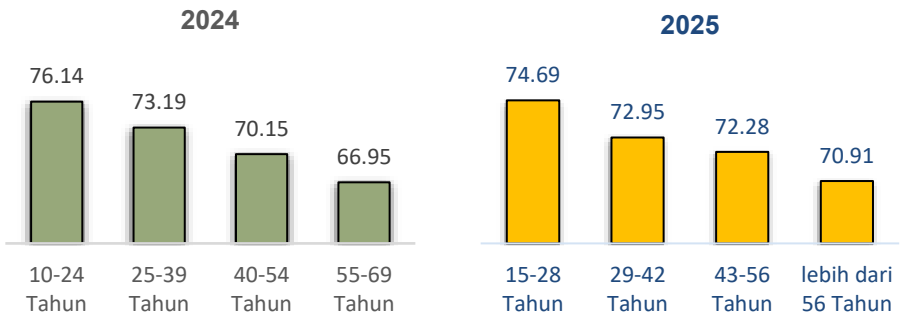

Gambar 26. Nilai TKM Berdasarkan Usia

Berdasarkan gambar 26 perbandingan tingkat kegemaran membaca di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dan 2025, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dan persebaran yang lebih merata antar kelompok usia. Pada tahun 2024, kelompok usia 10–24 tahun mencatat nilai tertinggi sebesar 76.14, diikuti oleh usia 25–39 tahun dengan 73.19, sementara kelompok usia 40–54 tahun sebesar 70.15 dan 55–69 tahun sebesar 66.95. Nilai ini menunjukkan bahwa minat membaca cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Namun, pada tahun 2025, tren tersebut berubah secara positif. Semua kelompok usia menunjukkan peningkatan nilai kegemaran membaca, dengan rentang nilai yang lebih seragam: usia 15–28 tahun sebesar 74,69, usia 29–42 tahun sebesar 72,95, usia 43–56 tahun sebesar 72.28, dan usia lebih dari 56 tahun sebesar 70.91. Perubahan ini mengindikasikan keberhasilan program literasi yang lebih inklusif, serta meningkatnya kesadaran membaca di kalangan dewasa dan lansia.

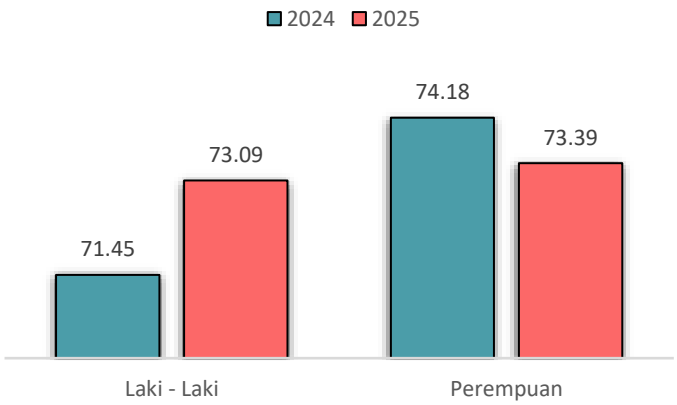

Gambar 27. Nilai Tingkat Kegeramaran Membaca Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 27 tersebut menunjukkan perbandingan tingkat kegemaran membaca di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan jenis kelamin untuk tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024, perempuan memiliki nilai kegemaran membaca yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 74,18 untuk perempuan dan 71,45 untuk laki-laki. Namun, pada tahun 2025 terjadi perubahan tren: nilai kegemaran membaca laki-laki meningkat menjadi 73,09, sementara nilai perempuan sedikit menurun menjadi 73,39. Meskipun selisihnya sangat kecil, data ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kegemaran membaca semakin menyempit.

Beberapa temuan lain hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a) Masyarakat DKI Jakarta memiliki tingkat kegemaran membaca yang menunjukkan perkembangan positif budaya literasi dan fondasi yang kokoh untuk Masyarakat berpengetahuan.
b) Masyarakat lebih aktif pada tahap refleksi & pemaknaan (Pasca Membaca), namun aspek persiapan & akses awal (Pra Membaca) masih menjadi titik terlemah yang perlu intervensi.

c) Aktivitas membaca telah terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat perkotaan Jakarta, baik melalui format buku tercetak maupun digital (e-book, artikel daring)
d) Lingkungan membaca di Jakarta secara umum sudah kondusif dan mendukung berkat dukungan akses teknologi dan infrastruktur. Namun, kualitas ekosistem ini masih mengalami ketimpangan antar wilayah administrasi sehingga perlu disetarakan dan ditingkatkan.
e) Meskipun skor indeks tinggi, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi berbasis komunitas masih tergolong rendah. Selain itu, fase Pra Membaca (persiapan, motivasi awal, akses) memerlukan penguatan strategis agar budaya baca lebih berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada konsumsi konten.

Namun, pada akhir tahun 2025 Perpusnas RI mengeluarkan peraturan baru tentang penggunaan instrumen dan metodologi terbaru TKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 dan Surat Kepala Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nomor B.844/4/APB.00.02/II.2026 hal Penyampaian Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15 persen, dimensi saat membaca sebesar 50 persen, dan dimensi pasca membaca 35 persen.

Tabel 19 Nilai TKM Perhitungan Perpusnas Tahun 2025

Kab/Kota	Pra Membaca	Saat Membaca	Pasca membaca	TKM	Kategori
Kep. Seribu	56.67	60.83	64.3	61.49	Rendah
Jakarta Barat	49.89	52.56	57.14	53.8	Rendah
Jakarta Pusat	51.07	55.45	62.28	57.24	Rendah
Jakarta Selatan	49.28	54.69	66.11	57.93	Rendah
Jakarta Timur	51.02	54.95	62.01	56.88	Rendah
Jakarta Utara	52.83	57.95	62.32	58.78	Rendah

Dalam mencapai target indikator Program Pembinaan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja tujuan, sasaran dan program, diantaranya :

a) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
Untuk mengukur keberhasilan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi diukur melalui tiga indikator yaitu Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A, Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai standar nasional perpustakaan, dan Persentase tenaga perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai standar nasional perpustakaan.

- Akreditasi perpustakaan umum diatur dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 299 Tahun 2022 tentang Akreditasi Perpustakaan Provinsi dan Keputusan Perpustakaan Nasional RI Nomor 298 Tahun 2022 tentang Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota. Standar Nasional Perpustakaan meliputi 6 (enam) standar dan 3 (tiga) komponen pendukung yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan umum. Standar dan komponen pendukung dimaksud : standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan. Untuk komponen pendukung meliputi: inovasi dan kreativitas perpustakaan, tingkat kegemaran membaca, dan indeks pembangunan literasi masyarakat.

Tabel 20. Hasil Akreditasi Perpustakaan Umum

No.	Perpustakaan	Nilai	Akreditasi
1	Perpustakaan Jakarta Pusat	91.17	A
2	Perpustakaan Jakarta Utara	86.98	A
3	Perpustakaan Jakarta Barat	91.20	A
4	Perpustakaan Jakarta Selatan	91.01	A
5	Perpustakaan Jakarta Timur	91,21	A
6	Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin	95,59	A

Gambar 28. Sertifikat Akreditasi Perpustakaan

- Dalam rangka peningkatan kualitas layanan perpustakaan bagi pemustaka, dilakukan pembinaan perpustakaan sekolah (SD/SMP/SMA/SMK/SLB), umum, perguruan tinggi dan perpustakaan khusus yang mencakup implementasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dari target 5.563 perpustakaan, yang tercatat dalam target Rencana Pembangunan Daerah untuk tahun 2024 sebanyak 1.728 perpustakaan telah tercapai 49,13% dari target dalam RPD. Sedangkan, akhir tahun 2025 sebanyak 1635 telah tercapai secara keseluruhan 78.51% dari target dalam RPD.
- Pada tahun 2022 jumlah tenaga perpustakaan sebanyak 6.312 orang yang terdiri dari tenaga perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Sekolah (SD, SMP,

SMA, SML, SLB), tahun 2024 telah dilakukan pembinaan terhadap 1.995 orang dengan capaian 80.6% sedangkan pada tahun 2025 sebanyak 1159 tenaga perpustakaan dengan capaian keseluruhan sebesar 95.98% melalui pelaksanaan workshop otomasi perpustakaan berbasis Inlislite untuk Perpustakaan Sekolah dan Swasta, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Perpustakaan Sekolah : Layanan, Pengembangan Minat dan Gemar Membaca, Promosi Perpustakaan berbasis Digital, Bimbingan Teknis Sistem Otomasi Perpustakaan INLISLITE dan Bedah Instrumen Akreditasi Perpustakaan Umum Kelurahan, Penyusunan Program dan Kegiatan Perpustakaan Sekolah, Penulisan Karya Tulis Anti Plagiarisme, Penelusuran Informasi.

Kegiatan Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi terdiri dari : subkegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi, Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi, Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, Pengembangan Perpustakaan Deposit, Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi, Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan. Subkegiatan-subkegiatan ini mendukung tercapainya indikator Nilai Budaya Literasi. Penjabaran aktivitas subkegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 melalui aktivitas :

- Pengembangan perpustakaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Peprustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin melalui sertifikasi Sistem Manajemen mutu ISO 9001:2015 pada bulan November 2025 dengan ruang lingkup sertifikasi “Penyelenggaraan Layanan Sirkulasi”, peningkatan kinerja Petugas Pengolahan Bahan Perpustakaan (PJLP Perpustakaan yang ditempatkan di Dinas Provinsi) dengan melaksanakan *Character Building* pelatihan layanan prima bertema *Spirit of Synergy,*

Gambar 29. Sertifikat Penerapan ISO 9001:2015

- Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin merupakan Pusat Informasi yang memiliki kekhasan koleksi dengan menyediakan koleksi lokal berisi informasi tentang karya sastra dari berbagai daerah dan periode, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk sastrawan dan pemustaka. Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang dikembangkan pada tahun 2024 sebanyak 5.519 eksemplar, sedangkan tahun 2025 telah dilakukan proses seleksi dan pengadaan dengan realisasi 6.036 eksemplar. Termasuk juga sarana penyelamatan dokumen sastra, digitalisasi dan alih media serta jasa penyelamatan dokumen sastra dengan melaksanakan digitalisasi/ alih media VHS 100 pcs.
- Pembinaan perpustakaan sekolah pada satuan pendidikan menengah dan khusus tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) pada 613 perpustakaan. Selanjutnya, pada tahun 2025, pembinaan perpustakaan sekolah pada satuan pendidikan menengah dan khusus tetap dilaksanakan sesuai SNP pada 356 perpustakaan. Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk memfasilitasi lembaga penyelenggara perpustakaan sekolah dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu perpustakaan sesuai dengan ketentuan SNP.
- Pembinaan Perpustakaan Khusus, Umum dan Perguruan Tinggi Tahun 2024 berjumlah 257 perpustakaan, sedangkan tahun 2025 berjumlah 240 perpustakaan. Kegiatan pembinaan dilaksanakan dengan tema Analisis Kinerja Perpustakaan Berbasis SNI ISO 11620:2023 dan 16439:2014, Bimbingan Teknis Pelayanan dan Promosi Peprustakaan, Implementasi Peningkatan Kinerja Peprustakaan Berbasis Indikator ISO 11620, dan Memahami Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Menuju Sertifikasi Kompetensi Pustakawan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong keseragaman dalam implementasi standar di berbagai jenis perpustakaan, serta memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat informasi, pembelajaran, dan inovasi yang mendukung pencapaian

tujuan organisasi dan masyarakat pengguna. Dengan pembinaan ini, diharapkan perpustakaan di wilayah DKI Jakarta mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal sesuai dengan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.

Tabel 21. Pembinaan Perpustakaan

No.	PD/UKPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	- Perpustakaan Sekolah	356	
	- Perpustakaan Umum, Perguruan Tinggi dan Khusus	226	
2	Suku Dinas Pusip Jakarta Pusat	115	
3	Suku Dinas Pusip Jakarta Utara	158	
4	Suku Dinas Pusip Jakarta Barat	237	
5	Suku Dinas Pusip Jakarta Selatan	190	
6	Suku Dinas Pusip Jakarta Timur	353	
Jumlah		**1.635**	

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan sekolah yang dibina dan dikembangkan sesuai standar nasional perpustakaan sampai tahun 2024 berjumlah 4.852 tenaga perpustakaan, sedangkan sampai tahun 2025 bertambah sebanyak 5.642 orang tenaga perpustakaan melalui bimtek penyusunan program dan kegiatan perpustakaan sekolah, bimtek penelusuran informasi, bimtek promosi peprustakaan berbasis digital, bimtek pembudayaan kegemaran membaca, dan bimtek otomasi perpustakaan berbasis INILISLite.
- Layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi dikembangkan melalui peningkatan koleksi di Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin, yang dilakukan melalui pengadaan koleksi, hibah, hadiah, sumbangan, titipan, tukar-menukar bahan pustaka, pemberian karya cetak karya rekam, dan pembelian majalah/surat kabar. Pada tahun 2024 melalui penyediaan terbitan berkala surat kabar, majalah, paket subscribe data tempo dari Pusat Data dan Analisa Tempo yeng berisi 200 artikel per bulan yang diakses melalui e-reources pada Jaklitera serta koleksi referensi 171 eksemplar. Pada tahun 2025, jumlah koleksi majalah sebanyak 10 eksemplar dan koran sebanyak 6 eksemplar, serta terdapat tambahan koleksi majalah bahasa asing pada triwulan IV sebanyak 38 eksemplar.

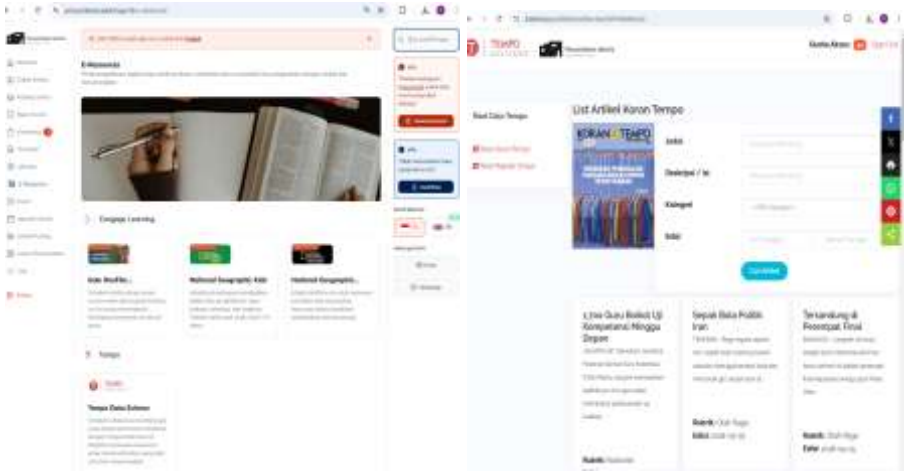

Gambar 30. e-resources pada Jaklitera

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan pengembangan perpustakaan deposit yang berlokasi di Gedung Nyi Ageng Serang. Progres saat ini telah memasuki tahap finalisasi interior ruang perpustakaan. Saat ini penataan difokuskan pada pemetaaan penempatan koleksi perpustakaan dan perancangan signage informasi koleksi. Penghimpunan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam yang berhasil dihimpun sejumlah 6.301 eksemplar yang berasal dari produsen karya seperti para penerbit buku maupun instansi pemerintah di Provinsi DKI Jakarta.
- Pengembangan keberagaman koleksi dari segi usia pemustaka, subjek bacaan, serta bentuk dan format koleksi. Untuk tahun 2025 jumlah koleksi yang diadakan sebanyak 26.590 eksemplar, sedangkan tahun 2024 sebanyak 28.527 eksemplar untuk Perpustakaan Umum Tingkat Provinsi dan Kota.
- Penyelenggaraan event-event di Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin berkolaborasi dengan komunitas, antara lain : Lomba Karya Cipta Sastra Piala HB Jassin, Mimbar dan Diskusi Sastra, Wisata Literasi Sastra, Senja Berpuisi dan Pameran Sastra, Layanan Bercerita, Workshop Literasi dan Penulisan, Festival Literasi Bulanan, Festival Literasi Anak, *Night at The Library.*

Gambar 31. Event Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin

- Penyediaan sarana dan prasarana layanan interktif, ramah kelompok rentan dan anak-anak

Gambar 32. Immersive Studio Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin

- Pengembangan Aplikasi Pendukung Layanan Perpustakaan, Penyediaan Perangkat Jaringan Komputer-Switch Access, SFP Transceiver, Switch Hub, Pemeliharaan dan Perpanjangan Annual License Perangkat Jaringan.

b) Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi dengan indikator Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca. Jumlah masyarakat yang mengikuti Pembudayaan Gemar Membaca pada Tahun 2025 sebanyak 1.158.661 orang atau mencapai 10.23% dari penduduk berjumlah 11.327.838 orang (berdasarkan data dalam Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 yang dirilis oleh Dinas Dukcapil pada 2022).

Kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi terdiri dari subkegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat dan subkegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan ini mendukung tercapainya indikator sasaran Nilai tingkat kegemaran membaca. Penjabaran aktivitas sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah :

- Pemasyarakatan dan Promosi Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat meliputi:
  1) IKRA

     IKRA (Inisiatif Keluarga Ringkas Aksara) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pembudayaan gemar membaca, untuk meningkatkan literasi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari

kegiatan IKRA adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca serta kemampuan menulis masyarakat yang dimulai dari lingkup keluarga, menumbuhkan budaya gemar membaca dan membangun kultur literasi sejak dini, serta membangun kegiatan membaca menjadi suatu “gerakan bersama” di Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan IKRA, Dispusip berkolaborasi dengan unsur-unsur terkait antara lain: unsur kecamatan, unsur Kelurahan dan unsur PKK untuk mendistribusikan buku bacaan kepada masyarakat (keluarga). Pelaksanaan IKRA tahun 2025 diikuti oleh 20.114 orang.

Gambar 33. Kegiatan IKRA

2) Roadshow Workshop Membaca,
merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan yang dilakukan dengan semangat menumbuhkan motivasi anak sekolah untuk membaca, pada tahun 2024 terlaksana di berbagai sekolah dan mampu menyampaikan pesan kepada 31.599 orang. Tahun 2025 telah dilaksanakan pada jenjang Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah (SMP – SMA) di seluruh wilayah DKI Jakarta dengan total peserta sebanyak 22.039 orang.

Gambar 34. Roadshow Workshop Membaca di Satuan Pendidikan

3) Baca Jakarta
merupakan tantangan membaca 14 (empat belas) hari yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca serta kemampuan menulis yang dimulai dari lingkup keluarga, menumbuhkan budaya gemar membaca dan membangun kultur literasi sejak dini. Pada tahun 2025 ini, Baca Jakarta dilaksanakan sebanyak dua kali pada bulan Februari - Maret dan Oktober – November tahun 2025. Adapun jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan tantangan Baca Jakarta tahun 2025 sebanyak 11.297, sedangkan tahun 2024 sebanyak 9.907 yang berasal dari wilayah DKI Jakarta dan Luar DKI Jakarta.

Gambar 35. Baca Jakarta 1

4) Wisata Literasi
Merupakan kegiatan untuk mengenalkan perpustakaan yang menyasar anak sekolah agar dapat memanfaatkan sumber bacaan dengan baik sesuai kebutuhan. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai jadwal atau permintaan dari sekolah dengan berkolaborasi dengan sekolah dan komunitas, pada tahun 2025 diikuti oleh sebanyak 18.134 orang. Sedangkan, tahun 2024 diikuti oleh sebanyak 26.055 orang.

Gambar 36. Wisata Literasi

5) Festival Literasi

Mengusung tema Literasi Jakarta Membangun Indonesia, berlangsung di Taman Ismail Marzuki dengan agenda kegiatan bazar buku murah, pameran komunitas, panggung bincang/workshop literasi dengan, dongeng, *read aloud*, pentas literasi, juga menyediakan pentas akuistik literasi untuk menghibur para pengunjung. Festival literasi tahun 2025 dikunjungi 3.615 pengunjung. Sedangkan tahun 2024 diikuti sebanyak 3000 pengunjung.

Gambar 37. Festival Literasi Rusun

6) Sarasehan Literasi

Dikemas dalam bentuk bincang literasi dengan tema peran komunitas literasi dalam Pembangunan literasi menuju Jakarta kota global berkolaborasi dengan Semua Murid Semua Guru (SMSG) sebuah asosiasi yang memiliki jaringan dengan lebih dari 500 komunitas di Indonesia.

7) Lomba Menulis

merupakan bentuk promosi kegemaran membaca yang dikemas dalam sebuah perlombaan menulis buku. Kegiatan ini dilaksanakan berjenjang, dan telah selesai di tingkat wilayah kota, kemudian dilanjutkan pada tingkat provinsi. Lomba Menulis yang ditujukan untuk tingkatan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Tingkat Provinsi diikuti oleh sebanyak 2.974 orang pada tahun 2025.

8) Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi

merupakan sebuah upaya dalam menyebarluaskan kampanye gemar membaca di masyarakat. Pada tahun 2025, pemberdayaan

yang dilakukan oleh para Duta Baca dapat menjangkau sebanyak 7.023 orang, sedangkan di tahun 2024 sebanyak 11.944 peserta.

9) Hari Anak Jakarta Membaca (Hanjaba),
merupakan sebuah perlombaan yang dilakukan dalam rangka merayakan Hari Anak Jakarta Membaca yang diadakan tanggal 27-28 Agustus 2025. Sama halnya dengan Lomba Menulis, Hanjaba juga dilakukan secara berjenjang dari tingkat wilayah kota dan dilanjutkan pada tingkat provinsi. Pada tahun 2025, Hanjaba yang ditujukan untuk tingkatan SD/MI dan SMP/MTs di Tingkat Provinsi ini diikuti oleh sebanyak 126 orang dengan 35 pemenang, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang diikuti oleh 110 orang dengan 25 pemenang.

Gambar 38. Lomba Hanjaba Tingkat Provinsi

10) Penyediaan Sarana dan Prasaranan Perpustakaan untuk Masyarakat
meliputi penyediaan rak dan buku untuk pemenuhan aspiransi Masyarakat yang meliputi Reses DPRD, Usulan Langsung dan Musrenbang. Tahun 2025, Dispusip telah membangun perpustakaan yang meliputi pojok baca/perpustakaan konvensional dan titik baca digital.

Gambar 39. Serah terima rak dan buku untuk perpustakaan masyarakat

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini terdiri 2 (dua) indikator program yang mendukung indikator kinerja sasaran, yaitu :

1) Persentase Capaian Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang menjadi Koleksi Daerah

Karya Cetak dan Karya Rekam adalah karya intelektual dan atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak atau rekam yang diperuntukkan bagi umum (Sumber : UU 13 Tahun 2018). Untuk menghitung ketercapaian kinerja program ini dengan Jumlah KCKR yang dilestarikan dibagi jumlah KCKR yang diterbitkan pada tahun berjalan dikali 100%. Target serah simpan KCKR yang menjadi koleksi daerah tahun 2025 pada Renstra Adalah 30% (7.5% per triwulan) dari jumlah terbitan per tahun (20.000 eksemplar), maka target yang harus dipenuhi Adalah 6000 eksemplar per tahun. Tahun 2025, realisasi jumlah koleksi KCKR sebanyak 6.031 eksemplar setara dengan 100.52%. Sedangkan, realisasi tahun 2024 adalah 5.517 capaian kinerja 107%.

No.	Judul	Penerbit	ISBN	Tahun Terbit
1	Perencanaan pendidikan	EL Akhyar Pustaka	9786140434066	2025
2	Wildlife Ecotourism in Indonesia	Yayasan Pustaka Obor	9786233213653	2025
3	Komunikasi Pembangunan: Menyuarakan yang Tak Didengar	Yayasan Pustaka Obor	9786233213691	2025
4	Rd. Gaos Hardjasoemantri: Pengasuh Tangguh Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (1952-1963)	Yayasan Pustaka Obor	9786233213615	2025
5	Menuju Modernitas: Politik Antikolonial 5 Tokoh Minoritas	Yayasan Pustaka Obor	9786233213462	2025
6	FIR: Flight Information Region: dan Kedaulatan Negara di Udara	Yayasan Pustaka Obor	9786233213677	2025
7	Alkitab TB2 034 TI N5 Adventure	Lembaga Alkitab Indonesia	9786022872672	2025
8	NIW 064 TI Compact Biblie	Lembaga Alkitab Indonesia	9786022872665	2025
9	Alkitab TB2 Arab - Indonesia	Lembaga Alkitab Indonesia	9786022872689	2025
10	Alkitab Bahasa Toba (Bibel)	Lembaga Alkitab Indonesia	9786022871736	2025
11	Sura' Maseru P'dandian Bakaru Kada Kalumpang	Lembaga Alkitab Indonesia	9786022872535	2025
12	Gencer SKD Sekolah Kedinasan 2026	Kompas Ilmu	9786023438631	2026
13	Modul Intensif TKA (UN) + ASAJ (US) SMA/MA IPA 2026	Kompas Ilmu	9786023438549	2026
14	New Greand Master Ulangan Harian Kelas 5 SD/MI	Kompas Ilmu	9786023438679	2026
15	New Grand Master Ulangan Harian Kelas 6 SD/MI	Kompas Ilmu	9786023438686	2026
16	New Grand Master Ulangan Harian Kelas 5 SD/MI	Kompas Ilmu	9786023438655	2026
17	Etika Bisnis	Nurul Fikri Bina	9786340429215	2025
18	Ke surga bareng ummi	Pustaka Al-Kautsar Group	9786238019663	2025
19	Barbarossa Sang Kesatria Lautan	Pustaka Al-Kautsar Group	9786238019595	2025
20	Komik Padang Mahsyar	Pustaka Al-Kautsar Group	9786238019656	2025
21	Hamzah Bin Abdul Muthalib Pemimin Para Syuhada	Pustaka Al-Kautsar Group	9786238019625	2025
22	Rasuna Said Sang Singa Podium	Pustaka Al-Kautsar Group	9786238019618	2025
23	Membungkam Atheisme	Pustaka Al-Kautsar Group	9786231730817	2025
24	The Battle of Rasulullah	Pustaka Al-Kautsar Group	9786238019632	2025
25	Yona:The girl standing in the blush of dawn 1	m&c	9786022102502	2025
26	Haikyu!! Fly High! Volly Ball!	m&c	9786230317170	2025
27	Oshi No Ko 13	m&c	9786230317422	2025
28	Brutal	m&c	9786230317231	2025
29	Heroes	m&c	9786230316906	2025
30	Komik anak muslim rajin ibadah fiqih untuk anak	m&c	9786230317309	2025
31	holok Meeting1 2	m&c	9786230316593	2025
32	Record of Ragnarok 2	m&c	9786230317095	2025
33	Aku Sayang Nabi Muhammad Saw	m&c	9786230317316	2025
34	Teman Ibadahku	m&c	9786230317323	2025
35	Emotions	m&c	9786230317521	2025

Gambar 40. arya Cetak dan Karya Rekam yang menjadi Koleksi Daerah

2) Persentase Capaian Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan

Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. (UU 43 Tahun 2007).

Untuk menghitung capaian kinerja melalui Naskah Kuno Milik Daerah yang dimanfaatkan dibagi naskah kuno yang dimiliki dikali 100%. Target tahun 2024 adalah 20% atau 50 naskah kuno kunci, dengan realisasi 20% sehingga kinerjanya 100%. Tahun 2025, telah terpenuhi sebanyak 30% atau setara 50 eksemplar sehingga capaiannya 100%

Gambar 41. Naskah Kuno

Dalam mencapai target indikator Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja tujuan, sasaran dan program, diantaranya :

1) Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
   Terdiri dari Subkegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan :
   11) Koleksi karya cetak karya rekam yang diterima, diolah dan siap layan, sampai tahun 2025 terdapat 50.498 eksemplar dengan capaian 100,1%.

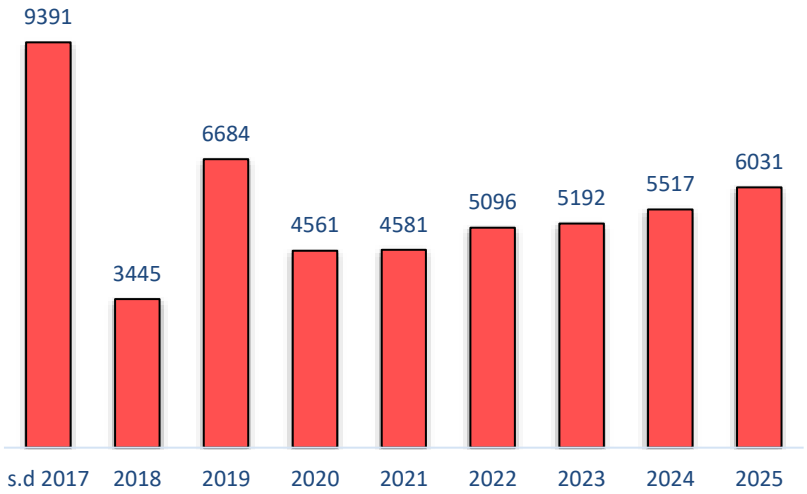

Gambar 42. Jumlah koleksi KCKR s.d Tahun 2025

12) Pemberian penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang aktif melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, sebanyak 10 penerbit.

Tabel 22. Daftar Penerbit Aktif Menyerahkan KCKR Tahun 2025

No.	Nama Penerbit	Jumlah KCKR yang diserahkan
1	Elex Media Komputindo	849
2	Gramedia Pustaka Utama	505
3	Bhuana Ilmu Populer	308
4	Benito Group	276
5	Bumi Aksara	267
6	Luxima Metro Media	205
7	Mahakarya Citra Utama	181
8	One Peach Media	127
9	Phoenix Gramedia Indonesia	104
10	Kepustakaan Populer Gramedia	101

Gambar 43. Penghargaan Penerbit

2) Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah

Penyusunan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah merupakan tanggung jawab perpustakaan provinsi seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, UU Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Katalog Induk Daerah yang diterbitkan merupakan salah satu bentuk terbitan literatur sekunder yang isinya dari hasil Kerjasama dengan bernagai perpustakaan di daerah setempat.

13) Tahun 2025, total entri dokumen katalog induk Penerbitan dokumen Katalog Induk daerah berjumlah 38.500 entry, dengan 4 volume penerbitan. Merupakan himpunan koleksi milik Perpustakaan Jakarta, yang terdiri dari 1 Perpustakaan Umum Daerah Tingkat Provinsi, 5 Perpustakaan Umum Daerah Tingkat Kota Administrasi, dan 1 Perpustakaan Sekolah.

14) Bibliografi yang diterbitkan berjumlah 1 naskah untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat akan informasi perpustakaan yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

Gambar 44. Katalog Induk dan Bibliografi

3) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno, Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan.

- Naskah kuno atau manuskrip merupakan dokumen tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak, yang merupakan warisan budaya bangsa yang mengandung informasi penting dan bernilai ilmiah. Naskah kuno memiliki nilai penting bagi kebudayaan, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
- Naskah kuno juga merupakan sumber primer sejarah yang menentukan keberhasilan historiografi Indonesia.
- Naskah kuno yang dilestarikan sebanyak 50 naskah.

Gambar 45. Foto Naskah Kuno Barang Rahsia dari Astana Konstantinopel.

4) Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Subkegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

15) Koleksi budaya etnis nusantara menjadi koleksi unggulan yang saat ini berfokus pada koleksi KeJakartaan, yaitu koleksi yang memuat budaya, sejarah, serta karya sastra yang berhubungan dengan DKI Jakarta.

16) Koleksi budaya etnis Nusantara sebanyak 500 eksp.

Tabel 23. Daftar Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan Penyiangan Tahun 2025

No.	Judul	Penulis	Penerbit	Tahun	Jumlah
1	Dinamika Pernaskahan Nusantara	Mu'jizah	Manassa	2017	4
2	Perisai, Parang Dan Tombak Bersilang,Menguak Harmonisasi Budaya Dan Agama Di Kalimantan Utara	Reza Perwira	Pustaka Ilmu	2018	9
3	Pengantar Penelitian Filologi	Achadiati Ikram	Mannasa	2019	4
4	Mencari si Pitung; Kontroversi Jago-Jago Betawi	Abdul Chaer	Masup Jakarta	2020	4
5	Betawi Ngontrak	Syaiful Amr	Yayasan Pustaka Obor Indonesia	2021	4
6	The War in the east Japan, China, and Korea = Perang di	Trumbull White	CV. Shinyuu Japanindo	2022	4

No.	Judul	Penulis	Penerbit	Tahun	Jumlah
	timur Jepang, Cina, dan Korea				
7	JAKARTA KERAS: Ruang Rawan Metropolitan (Cet-2)	Jérôme Tadié	EFEO, Masup Jakarta	2023	5

Faktor-faktor pendorong antara lain :

- Tumbuhnya minat baca pada kelompok usia 15–28 tahun—yang merupakan proporsi responden terbesar (38 persen)—serta peningkatan kunjungan penduduk ke perpustakaan menjadi pendorong utama keberhasilan program literasi.
- Perpanjangan jam layanan perpustakaan dan penyediaan spot baca digital meningkatkan aksesibilitas bagi berbagai kelompok masyarakat, sehingga memperluas kesempatan pemanfaatan fasilitas. Langkah ini mendukung inklusivitas layanan dan memungkinkan perpustakaan berfungsi sebagai ruang belajar yang fleksibel bagi pelajar, pekerja, dan komunitas luas.
- Pemerataan akses internet di wilayah DKI Jakarta memperkuat kemampuan perpustakaan untuk menyediakan layanan digital, koleksi elektronik, dan program bimtek daring. Infrastruktur yang memadai memungkinkan perpustakaan menjangkau pengguna yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan ruang, sehingga meningkatkan pemanfaatan sumber informasi modern.
- Peningkatan ketercukupan koleksi, baik tercetak maupun digital, disertai dukungan sarana fisik seperti rak koleksi dan ruang baca yang representatif, meningkatkan relevansi dan kenyamanan layanan perpustakaan. Kombinasi koleksi yang memadai dan fasilitas yang baik mendorong kunjungan, kegiatan literasi, dan penelitian.
- Kolaborasi dengan pegiat literasi, komunitas, dan pemangku kepentingan, serta penyelenggaraan inovasi layanan dan kegiatan (event) meningkatkan daya tarik perpustakaan bagi masyarakat. Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pembinaan, akreditasi, dan rekrutmen memastikan kualitas layanan yang profesional.

Faktor Penghambat :

- Instrumen yang tersedia belum mampu mengukur Nilai Budaya Literasi secara kuantitatif maupun kualitatif secara komprehensif. Hal ini menyebabkan hasil pengukuran tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
- Tingkat kesadaran masyarakat atau responden terhadap pentingnya literasi masih rendah. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada kualitas data yang diperoleh serta menghambat proses evaluasi nilai budaya literasi.
- Perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat menimbulkan variasi dalam akses, minat, serta praktik literasi. Keberagaman ini seringkali menjadi tantangan dalam menyusun indikator yang seragam dan representatif.
- Ketidakmerataan akses terhadap sumber informasi, baik digital maupun cetak, menghambat pemerataan budaya literasi. Masyarakat di wilayah tertentu masih

menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan literasi.

- Data dukung dari berbagai jenis perpustakaan, seperti Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi (PT), dan Perpustakaan Khusus, masih belum lengkap dan terintegrasi. Kondisi ini menyulitkan proses pemetaan capaian literasi secara menyeluruh, sehingga indikator pembangunan literasi masyarakat tidak dapat diukur secara akurat dan konsisten.
- Banyak perpustakaan sekolah menghadapi keterbatasan tenaga pustakawan yang kompeten serta koleksi bahan bacaan yang kurang memadai. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan literasi di tingkat sekolah, yang pada akhirnya menghambat peningkatan indeks literasi masyarakat secara nasional.

2. Capaian Indikator Kinerja Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan dan Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan

   Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi: Kebijakan Kearsipan, Organisasi Kearsipan, SDM Kearsipan, Pengelolaan Arsip, Pendanaan, dan Sarana Prasarana. Target yang akan dicapai pada Tahun 2024 adalah 92,45. Tahun 2025, target meningkat menjadi 93,11.

   Hasil pengawasan Kearsipan Eksternal dan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebesar 94,36 meningkat dari 93,11 pada tahun sebelumnya dengan kategori “AA (Sangat Memuaskan)” berdasarkan pengumuman Kepala Pusat Akreditasi ANRI Nomor AK.01.00/1/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025. Berdasarkan data target dan realisasi Hasil Pengawasan Kearsipan, maka capaian kinerjanya adalah 101,34%. Untuk pengawasan kearsipan tahun 2025, sasaran pengukuran kinerja penyelenggaraan kearsipan melalui pengawasan kearsipan adalah produk kinerja dan *outcome* yang dihasilkan. Adapun rincian Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 24. Perbandingan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
Tahun 2022 sampai 2025

No.	Nilai	NHP				Bobot	NHP x Bobot			
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
1	Eksternal	83,06	89,04	92,09	93,56	60%	49,84	53,42	55,25	56,14
2	Internal	94,50	91,58	94,63	95,56	40%	37,80	36,63	37,86	38,22
	Akumulasi						90.98	90,06	93,11	94,36

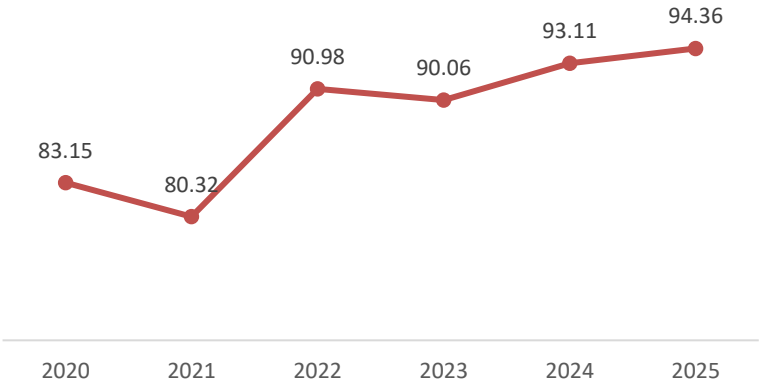

Gambar 46. Grafik Nilai Hasil Pengawasan Tahun 2020-2025

Berdasarkan hasil pengawasan ANRI, rekomendasi Kinerja yang perlu ditingkatkan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

a. Melanjutkan penyusunan kebijakan pengelolaan arsip terjaga hingga penetapan serta menyosialisasikanya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
b. Penyampaian salinan autentik arsip terjaga ke ANRI serta penerapan seluruh sasaran tertib GNSTA;
c. Pemindahan arsip inaktif dengan retensi sekurang kurangnya 10 tahun dari perangkat daerah, penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, badan usaha milik daerah dan dari swasta yang kegiatannya dibiayai oleh APBD dan perseorangan
d. Penggunaan aplikasi Srikandi secara optimal pada seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
e. Pelaksanaan pemusnahan arsip yang tidak lagi bernilai guna secara rutin dan sesuai prosedur;
f. Akuisisi arsip yang mewakili seluruh fungsi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI;
g. Penyusunan inventaris dan guide arsip statis sesuai ketentuan yang berlaku; dan
h. Pemenuhan jumlah arsiparis sesuai analisis kebutuhan arsiparis di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI, dan sertifikasi seluruh arsiparis

Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan memuat unsur-unsur seperti persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu dalam pelayanan, kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, sikap petugas dalam memberikan pelayanan, kualitas sarana dan prasaranan serta penanganan pengaduan pengguna layanan. (Permen PANRB Nomor 14 tahun 2017).

Survey dilaksanakan terhadap responden yang menerima layanan pembinaan/konsultasi kearsipan (Perangkat Daerah dan BUMD) dan layanan pemanfaatan/penggunaan arsip (masyarakat). Nilai yang didapat dari pengukuran hasil survey dengan rentang nilai dan kategori mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan:

1) Nilai Interval Konversi 25,00 - 64,99 / Mutu Pelayanan D/ Tidak Baik
2) Nilai Interval Konversi 65,00 - 76,60 / Mutu Pelayanan C/ Kurang Baik
3) Nilai Interval Konversi 76,61 - 88,30 / Mutu Pelayanan B/ Baik
4) Nilai Interval Konversi 88,31 - 100 / Mutu Pelayanan A/ Sangat Baik

Survey Kepuasan meliputi pernyataan dari setiap unsur dan nilai persepsi, daftar pernyataan (kuisioner) digunakan sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan. Target Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan pada Tahun 2025 adalah 93,61. Survey dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain : pendampingan kearsipan pada Perangkat Daerah, BUMD, Perusahaan dan Organisasi Masyarakat, Gerakan Sadar dan Tertib Arsip, Optimalisasi Kearsipan Dinamis, Pembinaan Arsiparis, Kepuasan Layanan Kearsipan, Beradasarkan hasil survey diperoleh Indeks Kepuasan sebesar 93.73 dari target 93.61 sehingga capaian kinerjanya 100,13%. Hasil survey sebagai berikut :

Tabel 25. Survey Kepuasan Layanan Kearsipan Tahun 2025

No.	Kegiatan Survey	Hasil Survey
1	Survey Kepuasan Pembinaan Kearsipan	93,70
2	Survey Kepuasan Layanan Kearsipan	93,77
Rata-rata Nilai		**93,73 (Sangat Baik)**

Tercapainya indikator kinerja Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan dan Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan didukung oleh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025, diantaranya :

a. Program Pengelolaan Arsip
   Program pengelolaan arsip memiliki 2 (dua) indikator program yang dilaksanakan pada tahun 2024 dan mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran, yaitu :
   1) Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan
      Mengukur tingkat ketersediaan arsip siap layan sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional sesuai pasal 40 dan pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Presentase dicapai dengan menghitung rata-rata empat komponen dengan menggunakan data presentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, presentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip, presentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik dan presentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN. Data-data tersebut diharapkan dapat menggambarkan kondisi pengelolaan arsip melalui angka presentase yang dicapai. Rumus yang digunakan:

      $T = (a + i + s + j)/4$

      T = Tingkat ketersediaan arsip
      a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
      i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip
      s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
      j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN

Berdasarkan perhitungan capaian Indikator: Ketersediaan arsip siap layan yang didapat dari komponen data daftar arsip aktif, data daftar arsip inaktif, data sarana bantu temu balik dan penginputan arsip pada SIKN telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 58.71% dari target kinerja 42,41% sehingga capaian kinerjanya 138,43%, sedangkan realisasi target dan kinerja tahun 2024 yaitu 43.21% dari target 39.20% dengan presentase capaian kinerja sebesar 109.78%.

Tabel 26. Tingkat Ketersediaan Arsip Tahun 2025

No	Uraian	Rumus	Perhitungan		Keterangan
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}} \times 100\%$	$\frac{185.684}{537.287} \times 100\%$	34,56%	Arsip aktif yang telah dibuatkan daftaranya merupakan arsip aktif perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan jumlah arsip yang tercipta maupun arsip masuk di aplikasi E-Office.
2	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip inaktif}} \times 100\%$	$\frac{102.685}{102.685} \times 100\%$	100%	Arsip inaktif yang dilakukan penghitungan adalah arsip inaktif Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun yang tersimpan di Depot Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik}}{\text{Jumlah seluruh arsip statis}} \times 100\%$	$\frac{1.804}{1.804} \times 100\%$	100%	Sampai dengan triwulan IV telah diakuisisi arsip statis dari : • Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas PPAPP • Kota Administrasi Jakarta Pusat • Kota Administrasi Jakarta Barat • Kota Administrasi Jakarta Timur (BKT) • Kota Administrasi Jakarta Selatan • Dinas Perhubungan • Kota Administrasi Jakarta Utara • Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta • PT Food Station Tjipinang Jaya • Perumda Pasar Jaya • PT Transportasi Jakarta
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{\text{Jumlah arsip statis yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis dan statis pemerintahan provinsi}} \times 100\%$	$\frac{1.722}{641.776} \times 100\%$	0,27%	Penginputan arsip pada SIKN/JIKN dilakukan terhadap khazanah arsip berketerangan permanen yang disimpan oleh Lembaga Kearsipan Daerah
Persnetase Ketersediaan arsip siap layan		T = (a + i + s + j)/4		58,71%	

Pada capaian persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, komponen nilai yang digunakan adalah daftar arsip aktif pada perangkat daerah. Dari daftar arsip yang telah dihimpun sebanyak 185.684 berkas telah dibuatkan daftar arsip aktifnya dari sebanyak 185.684 arsip yang tercipta dari surat masuk maupun surat keluar di aplikasi persuratan e-office. sehingga presentase realisasinya 34,56% arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip aktifnya.

Untuk persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip komponen nilai yang digunakan adalah daftar arsip inaktif yang disusun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari hasil penyelamatan arsip instansi yang mengalami pembubaran/merger yang disimpan di Ruang Simpan Arsip Inaktif UK I-Dispusip. Pada tahun 2025 telah dilakukan penyusunan daftar arsip inaktif pada arsip 21 perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 102.685 arsip yang telah dibuatkan daftar arsip inaktif dari sebanyak 102.685 arsip yang ada. Sehingga presentase mencapai 100% dari total seluruh arsip inaktif sebagaimana dimaksud. Pada capaian persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik, data yang digunakan adalah sarana bantu temu balik yang disusun dari hasil penyerahan arsip statis pada Tahun 2025 sehingga presentase mencapai 100% arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu baliknya.

Untuk kinerja persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN, data yang digunakan adalah jumlah arsip yang dimasukkan ke dalam sistem SIKN. SIKN adalah aplikasi yang digunakan oleh simpul jaringan untuk menghimpun dan mengelola data dan informasi kearsipan yang dibuat oleh ANRI. Sampai dengan akhir tahun 2025 telah terlaksana penginputan sebanyak 1.722 arsip pada SIKN/JIKN versi 2 dari sebanyak 641.776 arsip (hasil penjumlahan arsip aktif, inaktif, statis), sehingga tercapai sebesar 0.27% dari total seluruh arsip (aktif, inaktif, statis).

2) Persentase Lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK Penerapan Arsip Sesuai NSPK adalah ketentuan yang sudah ditentukan dari Peraturan Pemerintah yang dijadikan sebagai pedoman dalam urusan kearsipan baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Penilaian NSPK pada OPD terkait penilaian pada aspek Penciptaan, Penggunaan,Pemeliharaan dan Penyusutan. Penilaian NSPK pada BUMD terkait penilaian pada Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip, Pedoman Penyusutan Arsip,Pedoman Pengelolaan Arsip, Pengelolaan Arsip Vital.

   Pengukuran Lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK dilakukan melalui kegiatan pengawasan kearsipan dengan audit penyelenggaraan kearsipan pada Perangkat Daerah dan BUMD yang ditetapkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 297 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan dan Surat Tugas Kepala Dinas Peprustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0044/KA.01.08 tanggal 10 April 2025 tentang Tim Pengawas Kearsipan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Audit kearsipan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disediakan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupa Form

ASKI (Audit Sistem Kearsipan Internal) dan Form ASKE (Audit Sistem Kearsipan Eksternal). Target kinerja Indikator program sampai dengan tahun 2025 adalah 87,03%, sampai dengan tahun 2025 telah terealisasi kinerja 88,89% dengan capaian kinerja 102,14% atau jumlah Perangkat Daerah dan BUMD yang telah berkinerja sesuai Standar Kearsipan sebanyak 48 lembaga atau ada penambahan 8 lembaga sebagai berikut:

Tabel 27. Data Indikator Program Persentase Lembaga (OPD, BUMD) yang Mengelola Arsip Sesuai NSPK Tahun 2017 – 2025

No	Nama Lembaga	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2017	7.41%	7.41%	Target Renstra 2017 - 2022 Jumlah Lembaga pembagi 27 lembaga
2	Perumda Pembangunan Sarana Jaya				
3	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	2018	25.93%	25.93%	
4	Dinas Pendidikan				
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
6	PT Bank DKI				
7	Perumda PAM Jaya				
8	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur	2019	44.44%	44.44%	
9	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat				
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
11	Perumda Pasar Jaya				
12	PT Transportasi Jakarta (Perseroda)				
13	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	2020	62.96%	162.96%	
14	PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)				
15	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
16	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat				
17	PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)				
18	Satuan Polisi Pamong Praja	2021	81.48%	85.20%	
19	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)				
20	Dinas Kesehatan				
21	PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda)				
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
23	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah				
24	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan	2022	100%	100%	
25	PT MRT Jakarta (Perseroda)				
26	Dinas Pemuda dan Olahraga				
27	Dinas Perhubungan				
28	Badan Kepegawaian Daerah	2023	55.55%	55.55%	Target Renstra 2023 Jumlah Lembaga
29	Badan Pendapatan Daerah				
30	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu				
31	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				

No	Nama Lembaga	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				pembagi 54 lembaga
33	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk				
34	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	2024	74.07%	74.07%	
35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta				
36	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta				
37	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta				
38	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta				
39	Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta				
40	Perumda Dharma Jaya				
41	Kota Administrasi Jakarta Utara	2025	87.03%	88.89%	
42	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta				
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta				
44	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta				
45	Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta				
46	Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta				
47	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta				
48	Perumda Pelayanan Air Limbah (PAL) Jaya				

Dalam pencapaian indikator sasaran dan indikator program, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja, yaitu:

1) Pengelolaan arsip dinamis provinsi

   Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip. Untuk mengukur kinerja dengan menghitung Jumlah Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) yang membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan dibagi target lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) yang membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan dikali 100 persen. OPD : Badan, Inspektorat, Dinas, Biro; BUMD : PT; OPD : Sudin, UPT, Ormas dan Orpol.

   Untuk tahun 2025 Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) yang membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/ Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan sebanyak 21 lembaga (18 perangkat daerah dan 3 BUMD) di Provinsi DKI Jakarta antara lain: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kota Administrasi Jakarta Barat, Administrasi Jakarta Selatan, Administrasi Jakarta Timur, Administrasi Jakarta Utara, Satuan Polisi Pamong Praja, Perumda PAM Jaya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, PT Jamkrida Jakarta (Perseroda), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Sosial, Dinas Bina Marga, dan PT Transportasi Jakarta.

Kegiatan pengelolaan arsip dinamis provinsi Terdiri atas subkegiatan Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis dan Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi. Penjabaran aktivitas subkegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja kegiatan antara lain :

- Melaksanakan audit kearsipan internal pada 42 perangkat daerah oleh Tim Pengawas berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 297 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dan Surat Tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jkaarta Nomor e-0044/KA.01.08 tentang Tim Pengawas Kearsipan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Perangkat Daerah mengacu pada instrumen audit kearsipan internal dari ANRI yang terdiri dari Formulir ASKI Unit Kearsipan dan dari Formulir ASKI Unit Pengolah. Audit kearsipan internal meliputi :
  a) Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis: sub-aspek penciptaan, sub-aspek penggunaan, sub-aspek pemeliharaan, sub-aspek penyusutan.
  b) Aspek Sumber Daya Kearsipan meliputi : sub-aspek sumber daya manusia dan sub-aspek prasarana dan sarana kearsipan.

Tabel 28. Daftar Hasil Audit Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Nama Perangkat Daerah	Nilai	Kategori Hasil Audit
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	97.25	Aa (Sangat Memuaskan)
2	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	96.79	Aa (Sangat Memuaskan)
3	Kota Administrasi Jakarta Selatan	94.44	Aa (Sangat Memuaskan)
4	Kota Administrasi Jakarta Timur	92.93	Aa (Sangat Memuaskan)
5	Badan Kepegawaian Daerah	91.71	Aa (Sangat Memuaskan)
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90.63	Aa (Sangat Memuaskan)
7	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	87.23	A (Memuaskan)
8	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	85.76	A (Memuaskan)
9	Sekretariat Daerah	85.6	A (Memuaskan)
10	Satuan Polisi Pamong Praja	85.41	A (Memuaskan)
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	85.02	A (Memuaskan)

No.	Nama Perangkat Daerah	Nilai	Kategori Hasil Audit
12	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	84.95	A (Memuaskan)
13	Badan Pendapatan Daerah	84.86	A (Memuaskan)
14	Kota Administrasi Jakarta Barat	83.91	A (Memuaskan)
15	Dinas Perhubungan	83.46	A (Memuaskan)
16	Dinas Pendidikan	82.4	A (Memuaskan)
17	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	82.05	A (Memuaskan)
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.28	A (Memuaskan)
19	Kota Administrasi Jakarta Utara	79.66	BB (Sangat Baik)
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79.64	BB (Sangat Baik)
21	Dinas Cipta Karya. Tata Ruang dan Pertanahan	79.47	BB (Sangat Baik)
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	79.21	BB (Sangat Baik)
23	Dinas Kesehatan	78.26	BB (Sangat Baik)
24	Dinas Kebudayaan	77.68	BB (Sangat Baik)
25	Badan Pembinaan BUMD	76.93	BB (Sangat Baik)
26	Badan Pengelolaan Aset Daerah	76.82	BB (Sangat Baik)
27	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	75.49	BB (Sangat Baik)
28	Dinas Sosial	75.45	BB (Sangat Baik)
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	75.32	BB (Sangat Baik)
30	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	74.49	BB (Sangat Baik)
31	Dinas Lingkungan Hidup	72.43	BB (Sangat Baik)
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	71.72	BB (Sangat Baik)
33	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	71.65	BB (Sangat Baik)
34	Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian	70.58	BB (Sangat Baik)
35	Dinas Pemberdayaan. Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	70.32	BB (Sangat Baik)
36	Kota Administrasi Jakarta Pusat	68.77	B (Baik)
37	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi.	68.48	B (Baik)

No.	Nama Perangkat Daerah	Nilai	Kategori Hasil Audit
	Usaha Kecil dan Menengah		
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68.07	B (Baik)
39	Inspektorat	65.28	B (Baik)
40	Dinas Bina Marga	65.09	B (Baik)
41	Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi dan Energi	62.95	B (Baik)
42	Dinas Sumber Daya Air	59.71	C (Cukup)

- Melaksanakan audit kearsipan eksternal pada 14 BUMD untuk menilai pengelolaan arsip dinamis yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis pada BUMD. Audit kearsipan pada BUMD terdiri dari : aspek kebijakan kearsipan, aspek pembinaan kearsipan, aspek pengelolaan arsip dinamis dan aspek sumber daya kearsipan. Hasil audit kearsipan pada BUMD tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 29. Daftar Hasil Audit BUMD Tahun 2025

No	Nama BUMD	Nilai	Kategori
1	PT Transportasi Jakarta	96.41	AA (Sangat Memuaskan)
2	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	94.87	AA (Sangat Memuaskan)
3	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	93.49	AA (Sangat Memuaskan)
4	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	93.31	AA (Sangat Memuaskan)
5	Perumda Pasar Jaya	92.92	AA (Sangat Memuaskan)
6	PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda)	92.72	AA (Sangat Memuaskan)
7	PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) / JXB	86.54	A (Memuaskan)
8	PT MRT Jakarta (Perseroda)	78.66	BB (Sangat Baik)
9	PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)	78.59	BB (Sangat Baik)
10	Perumda Dharma Jaya	78.28	BB (Sangat Baik)
11	PT Bank DKI / Bank Jakarta	74.17	BB (Sangat Baik)
12	Perumda Air Minum Jaya	73.68	BB (Sangat Baik)
13	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	66.92	B (Baik)
14	Perumda Paljaya	65.88	B (Baik)
	Rata- Rata	83.32	A (Memuaskan)

- Gerakan Sadar Tertib Arsip
  Tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya arsip dalam akuntabilitas kinerja dan menjaga memori kolektif bangsa yang dihadiri 280 orang peserta dari Perangkat Derah, BUMD, Lembaga Ormas, Komunitas Arsip, dan Universitas. Kemudian jumlah peserta yang hadir secara daring sebanyak 1.242 orang melalui zoom meeting dan youtube.

Gambar 47. Gerakan Sadar Tertib Arsip Tahun 2025

- Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan melalui kegiatan Temu Wawasan Arsiparis yang dihadiri 195 peserta, workhop peningkatan komperensi arsiparis dihadiri 87 peserta, pengelolaan arsip dinamis 8 angkatan dengan 225 peserta, penyusutan arsip 3 angkatan sebanyak 89 peserta, bimbingan teknis arsip vital, arsip terjaga dan alih media dihadiri 38 peserta, bimbingan teknis peningkatan kompetensi petugas pelayanan kearsipan dihadiri 33 peserta, bimbingan pengawasan kearsipan internal 2 angkatan dengan 72 peserta.
- Optimalisasi Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah pada 42 Perangkat Daerah dan 9 Biro selaku Unit Pengolah Sekretaris Daerah meliputi: sosialisasi pengelolaan arsip, program arsip vital, inventarisasi arsip terjaga dan alih media arsip pada perangkat daerah serta knowledge sharing penyusutan arsip.

Gambar 48. Optimalisasi Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah

- Optimalisasi Pengelolaan Kearsipan BUMD dan Perusahaan melalui Assesment Kearsipan bagi BUMD dan Perusahaan di lingkungan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadiri oleh 14 BUMD dan 7 Perusahaan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

- Daftar arsip dinamis yang diperoleh melalui kegiatan pengolahan, penyeleksian, penataan, penilaian dan pemusnahan arsip yang meliputi pembuatan daftar arsip, penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul musnah dan/atau daftar arsip usul serah dalam kegiatan penilaian sebanyak 26.923 arsip dari target 25.000 arsip.
- Penyediaan boks arsip untuk Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebanyak 47.996 buah.
- Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi Ruang Simpan Arsip seluas 2.722 m^3 dengan jenis Fumigasi *Pest Termite Rodent*

Gambar 49. Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah dan BUMD

- Layanan Arsip Keluarga
  Jenis layanan arsip keluarga meliputi : sosialisasi/bimbingan teknis, layanan restorasi arsip dan layanan alih media/digitalisasi arsip.

Gambar 50. Layanan Arsip Keluarga

a) Pengelolaan arsip statis daerah provinsi
   Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan masuk kategori permanen dalam jadwal retensi

arsip yang telah diverifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan, melalui proses akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses. Untuk mengukur keberhasilan diukur dengan Indikator Kinerja Prosentasi Arsip Statis yang dikelola dari target 79,42% realisainya 127,43% dengan capaian 160,44%.

- Jumlah arsip statis yang telah dikelola melalui kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional sampai dengan tahun 2025 sebanyak 5097 berkas arsip.

Tabel 30. Pengelolaan Arsip Statis Tahun 2025

No.	Pencipta Arsip	Jumlah Arsip	Keterangan
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	Jumlah arsip statis yang telah dikelola melalui kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional sampai dengan Tahun 2025
2	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	859	
3	Badan Kepegawaian Daerah	173	
4	PT Foodstation Tjipinang Jaya	29	
5	Walikota Jakarta Selatan	21	
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1203	
7	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	192	
8	Dinas PPAPP	4	
9	Kota Administrasi Jakarta Pusat	40	
10	Kota Administrasi Jakarta Barat	71	
11	Kota Administrasi Jakarta Timur	41	
12	Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta	52	
13	Kota Administrasi Jakarta Selatan	49	
14	Dinas Perhubungan	130	
15	Kota Administrasi Jakarta Utara	398	
16	PT Food Station Tjipinang Jaya	24	
17	Perumda Pasar Jaya	68	
18	PT Transportasi Jakarta	12	
19	Badan Kepegawaian Daerah	1722	
	Jumlah	**5097**	

- Jumlah arsip statis yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Lembaga Kearsipan Daerah sebanyak 2392 berkas arsip.

Tabel 31. Penetapan Arsip Statis Tahun 2025

No.	Pencipta Arsip	Jumlah Arsip (Berkas)	Nomor SK Penetapan Arsip Statis oleh Kepala LKD
1	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	192	Nomor 025 Tahun 2024
2	Dinas PPAPP	4	Nomor e-0022 Tahun 2024
3	Kota Administrasi Jakarta Pusat	40	Nomor e-0022 Tahun 2024
4	Kota Administrasi Jakarta Barat	71	Nomor e-0022 Tahun 2024
5	Kota Administrasi Jakarta Timur (BKT)	41	Nomor e-0039 Tahun 2024
6	Kota Administrasi Jakarta Selatan	29	Nomor e-0083 Tahun 2024
7	Dinas Perhubungan	130	Nomor e-0083 Tahun 2024
8	Kota Administrasi Jakarta Utara	19	Nomor e-0083 Tahun 2024
9	Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta	52	Nomor e-0083 Tahun 2024
10	PT Food Station Tjipinang Jaya	12	Nomor e-0082 Tahun 2024
11	Perumda Pasar Jaya	68	Nomor e-0082 Tahun 2024
12	PT Transportasi Jakarta	12	Nomor e-0082 Tahun 2024
13	Bada Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	1722	Nomor 13379/KA.03.06 Tahun 2025

Subkegiatan yang dilaksanakan yaitu Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis melalui aktivitas dalam mencapai indikator kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaran pameran kearsipan dengan tema "Lo Jual Gue Beli: Kilas Balik Lima Abad Jakarta Kota Dagang" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

Gambar 51. Pameran Seni berbasis Arsip dengan tema “Lo Jual Gue Beli”

- Penyediaan sarana, prasarana, bahan dan peralatan untuk pengolahan dan preservasi arsip antara : cairan deasidifikasi, japanese tissue paper, alat deasidifikasi, plastik enkapsulasi, bok arsip statis, kertas berpengaman dan bebas asam dalam rangka pelaksanaan restorasi arsip untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan arsip serta melakukan tindakan preservasi kuratif untuk memperbaiki kerusakan sesuai jenis arsip.

Tabel 32. Daftar Preservasi Arsip Statis NSPK Tahun 2025

No	Nama Pencipta Arsip	Jumlah	Tindakan Preservasi
1	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	192	Kegiatan preservasi preventif (penyediaan sarana prasarana, perlindungan, pemeliharaan dan pembatasan akses arsip statis) dan kuratif (memperbaiki kerusakan sesuai jenis arsip).
2	Dinas PPAPP	4	
3	Kota Administrasi Jakarta Pusat	40	
4	Kota Administrasi Jakarta Barat	71	
5	Kota Administrasi Jakarta Timur (BKT)	41	
6	Kota Administrasi Jakarta Selatan	49	
7	Dinas Perhubungan	130	
8	Kota Administrasi Jakarta Utara	398	
9	Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta	52	
10	PT Food Station Tjipinang Jaya	24	
11	Perumda Pasar Jaya	68	
12	PT Transportasi Jakarta	12	
13	Badan Kepegawaian Daerah	1722	

- Penyediaan Mobil Layanan Arsip, sarana dan prasarana pengolahan kearsipan

- Untuk akses arsip statis dilakukan melalui Ruang Baca Arsip, sarana penemuan kembali arsip dan mekanisme peminjaman/penggunaan/ pemanfaatan arsip.

b) Pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional tingkat provinsi

Subkegiatan yang dilaksanakan adalah Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah provinsi melalui JIKN dengan aktivitas subkegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator program dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Jaringan Komputer serta Sarana Penunjang Sistem Informasi dan Aplikasi Kearsipan melalui penyediaan tenaga ahli perorangan untuk software programmer dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan e-office.
- Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi dan Data Center Kearsipan yang meliputi pemeliharaan server 3 unit, pemeliharaan data center 2 unit dan pengadaan perangkat lunak serta lisensi.

Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah provinsi melalui JIKN dengan target pelaksanaan kegiatan sebanyak 16.127 pengguna. Capaian realisasi kegiatan ini pada triwulan IV telah melampaui target, yaknin sebanyak 16.497 pengguna atau setara dengan 102,29%.

Faktor pendorong tercapainya indikator sasaran :

- Adanya supervisi dan monitoring berkala pada Perangkat Daerah dalam kegiatan penyusunan daftar arsip aktif
- Keberadaan arsiparis atau tenaga kearsipan di unit kerja (UK) setiap OPD memberikan dasar personal khusus yang bertanggung jawab untuk menyusun daftar arsip serta melakukan pengelolaan arsip di unitnya
- Manfaat praktis yang dirasakan, seperti kemudahan temu kembali, efisiensi administrasi, dan akses yang lebih cepat terhadap data arsip dalam pengambilan keputusan atau kebutuhan publik
- Terbitnya Instruksi Sekretaris Daerah (Insekda) Nomor e-0032 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat landasan kebijakan dan mendorong OPD untuk aktif menginput arsip dinamis ke dalam SIKN.
- Peran Inspektorat sebagai bagian dari Tim Pengawas Kearsipan memberikan legitimasi dan memperkuat objektivitas proses audit. Selain itu, dukungan dari ANRI melalui uji petik dan verifikasi lanjutan hasil audit kearsipan menambah kredibilitas serta memastikan bahwa hasil pengawasan benar-benar sesuai dengan standar nasional.
- Kebijakan 4 Pilar Kearsipan memberikan kerangka kerja yang komprehensif, sementara kebijakan khusus terkait pengorganisasian kearsipan memastikan tata kelola arsip berjalan lebih sistematis, terintegrasi, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
- Pemberian penghargaan di bidang kearsipan terhadap lembaga maupun arsiparis berperan sebagai insentif yang mendorong peningkatan kinerja. Penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga motivasi bagi para pengelola arsip untuk terus meningkatkan profesionalisme, inovasi, dan kualitas pengelolaan arsip di perangkat daerah masing-masing.

- Dengan formasi arsiparis yang telah mencakup 94% dari 48 perangkat daerah, fungsi kearsipan dapat dijalankan secara berkelanjutan. Ditambah dengan pendanaan yang cukup untuk mengakomodir kegiatan pembinaan dan pengawasan, maka pelaksanaan kearsipan dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai kebutuhan kelembagaan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat :

- Belum seluruhnya arsip aktif di perangkat daerah dibuat daftarnya karena tingginya volume arsip dan keterbatasan SDM pada tiap-tiap unit pengolah di perangkat daerah.
- Arsip inaktif di perangkat daerah belum seluruhnya terdata, sejumlah arsip masih tetap disimpan di unit pengolahnya masing-masing.
- Arsip statis yang diserahkan belum diberkaskan secara baik, sehingga proses pengolahan memerlukan waktu lebih lama.
- Penginputan arsip ke SIKN saat ini lebih diprioritaskan pada arsip statis yang telah diserahkan, sehingga volume data yang masuk relatif kecil.
- Terjadi kendala jaringan atau pemeliharaan server pada website SIKN/JIKN, sehingga penginputan hanya dapat dilakukan pada rentang waktu tertentu.
- Perubahan pola dan instrumen penilaian audit sistem kearsipan internal berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan, sehingga membutuhkan penyesuaian dalam proses pelaksanaan audit kearsipan oleh objek pengawasan.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi memiliki 1 (satu) indikator program yang menunjang tercapainya indikator sasaran, yaitu : Survey kepuasan pelayanan kantor terhadap ketersediaan antara lain: alat tulis kantor, peralatan rumah tangga, cetakan dan penggandaan, dan penyediaan makanan dan minuman dilaksanakan setiap triwulan dengan Indikator program Indeks kepuasan pelayanan kantor dengan target kinerja 4 indeks. Berdasarkan hasil Survei yang dilaksanakan kepada pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beserta Suku Dinas di 5 wilayah DKI Jakarta dengan mendapat skor 3.771 dengan nilai persepsi 5 (sangat baik) sehingga capaian indikator program tahun 2025 adalah 100%. Indeks survey didapatkan dari nilai rata-rata akumulasi survey kepuasan pelayanan kantor Dinas dan Sudin Lima wilayah Kota.

Dalam pencapaian target indikator program dan indikator sasaran, program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi didukung oleh kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu :

1) Administrasi keuangan perangkat daerah
Capaian kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah adalah 100% dengan Indikator Kinerja Nilai kepuasan Layanan Administrasi Keuangan target kinerjanya 4 Nilai. Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan terhadap pegawai di Dinas, Suku Dinas dan Unit Pengelola hasil yang diperoleh adalah 4 Nilai, capaian kinerja yang terdiri dari subkegiatan

penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan subkegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. Aktivitas yang dilaksanakan adalah penyediaan gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan gaji dan tunjangan PPPK

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Capaian kegiatan administrasi umum perangkat daerah adalah 100% dengan Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum targetnya kinerja 4 Nilai. Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan terhadap pegawai di Dinas, Suku Dinas dan Unit Pengelola hasil yang diperoleh adalah 4 Nilai, capaian kinerja yang terdiri dari subkegiatan Penyediaan Bahan/Material, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dan Penyelenggaraan Rapat SKPD. Aktivitas yang dilaksanakan adalah Penyediaan Perkakas Kerja, Alat Listrik dan Elektronik, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional, Penyediaan Makanan dan Minuman serta Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan.
3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Capaian kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah 100% dengan indikator kinerja Nilai kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah targetnya kinerja 4 Nilai. Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan terhadap pegawai di Dinas, Suku Dinas dan Unit Pengelola hasil yang diperoleh adalah 4 Nilai, capaian kinerja yang terdiri atas subkegiatan pengadaan peralatan dan mesin seberta aktivitas penyediaan meubelair, mesin penunjang aktivitas, audio visual, dan perlengkapan kerja.
4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
   Capaian kinerja kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah adalah 100% dengan indicator Kinerja Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah targetnya kinerja 4 Nilai. Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan terhadap pegawai di Dinas, Sudin dan Unit Pengelola hasil yang diperoleh adalah 4 Nilai, capaian kinerja yang terdiri atas subkegiatan : penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Aktivitas yang dilaksanakan adalah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Capaian kinerja kegiatan adalah 100% dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan targetnya kinerja 4 Nilai. Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan terhadap pegawai di Dinas, Sudin dan Unit Pengelola hasil yang diperoleh adalah 4 Nilai, capaian kinerja yang merupakan subkegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, Dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan. Sedangkan, subkegiatan pemeliharaan mebel mengalami efisiensi berdasarkan Instruksi Gubernur No. 2 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Belanja Tahun Anggaran 2025. Aktivitas yang dilaksanakan adalah : Pemeliharaan Operasional Gedung, Perawatan/ Rehabilitasi Bangunan Gedung Dan Pemeliharaan Prasarana Gedung Kantor, Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas.

6) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Capaian kinerja kegiatan adalah 100% dengan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu dengan target kinerjanya sebesar 100%. Capaian kinerja yang merupakan subkegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki aktivitas penyusunan rancangan renstra dinas dan rencana kerja.

3. Kegiatan Strategis Daerah
   a. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
      Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat melalui penyusunan Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target subkegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2025 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat pada B03, B06, B09 dan B12.
   b. Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
      Tersedianya sarana dan prasarana layanan perpustakaan tingkat provinsi yang ramah penyandang disabilitas
      1) 1 (satu) sarana dan prasarana layanan perpustakaan tingkat provinsi yang disediakan (sarpras untuk pemustaka disabilitas).
      2) 1 (satu) perpustakaan yang menyediakan akses informasi dalam bentuk audio visual
      3) 1053 koleksi disabilitas yang disediakan (tingkat provinsi dan kota).
      4) 10 unit komputer bicara yang dilengkapi dengan pembaca layar (screen reader)
      5) 10 unit tongkat netra
      6) 10 unit kursi roda
      7) 10 unit headset pro untuk mendukung komputer bicara

Gambar 52. Sarana dan Prasarana DIsabilitas

Penyediaan sarana bagi kelompok rentan, khususnya bagi penyandang disabilitas. Sarana bagi disbilitas yang disediakan berupa komputer bicara, kursi roda, tongkat bantu jalan untuk penyandang disabilitas netra, dan headphone

Gambar 53. Pelatihan sensitivitas disabilitas

c. Transformasi Digital

1) Terlaksananya implementasi layanan kearsipan dinamis di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

   Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu dalam rangka optimalisasi layanan kearsipan dinamis memuat : Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan Sistem kearsipan dinamis telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (helpdesk). Analisis komparasi atau penyempurnaan layanan Sistem kearsipan dinamis

2) Terlaksananya sosialisasi implementasi layanan kearsipan dinamis di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

   Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah telah melakukan pembuatan aplikasi Arjuna yang merupakan pendukung e-office untuk mengintegrasikan pengelolaan arsip dinamis (penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan dan arsip statis pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengimplementasikan Arjuna dilakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah untuk simulasi secara langsung sehingga jika terdapat permasalahan dapat ditindaklajuti oleh tim teknis.

3) Integrasi ND pada aplikasi layanan kearsipan dinamis dengan aplikasi e-Office

   Laporan hasil pengembangan Sistem Kearsipan Dinamis : pada tahap pertama dengan mengintegrasikan Arjuna dan e-Office secara single sign on (SSO) untuk fitur aplication programming interface (API) antara lain login, struktur unit kerja, jabatan dan eselon. Untuk tahap kedua dengan fokus pada pengembangan fitur aplication programming interface (API) antara lain : parameter surat, hasil pencarian surat, id surat, nomor surat tanggal surat, perihal surat, jenis nota dinas, pencipta surat, penerima surat, tembusan dan lampiran.

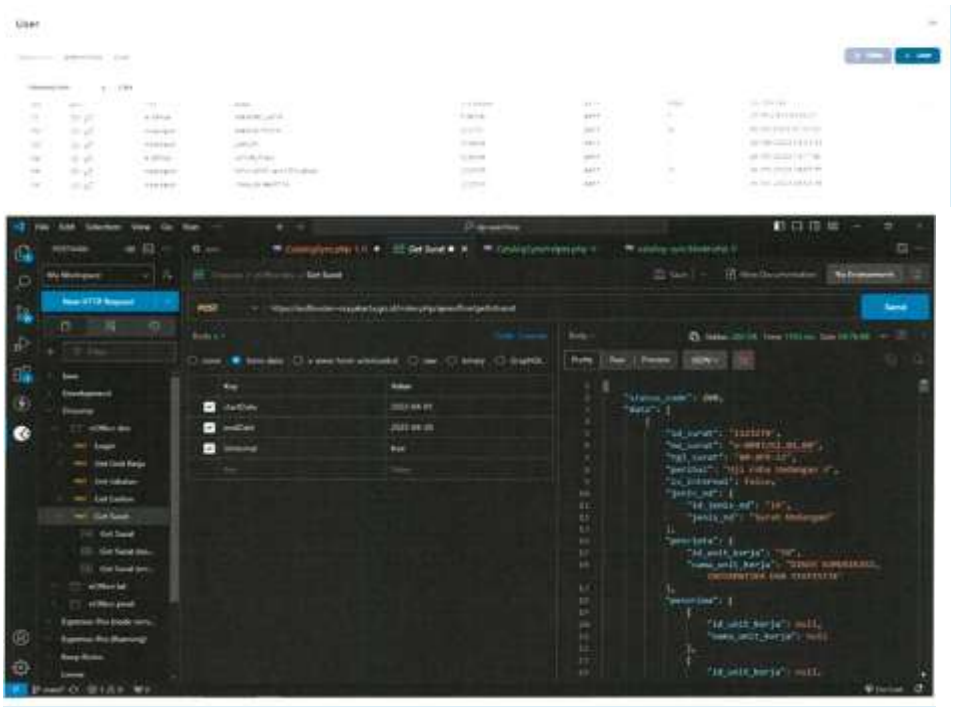

Gambar 54. Integrasi naskah dinas pada aplikasi Arjuna dengan aplikasi e-office

d. Nilai Kualitas Data SDI

Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:

1) Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
2) Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
3) Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.
4) Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data

Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)

Keterangan :

1) Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan)
2) Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan)
3) Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan)
4) Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)

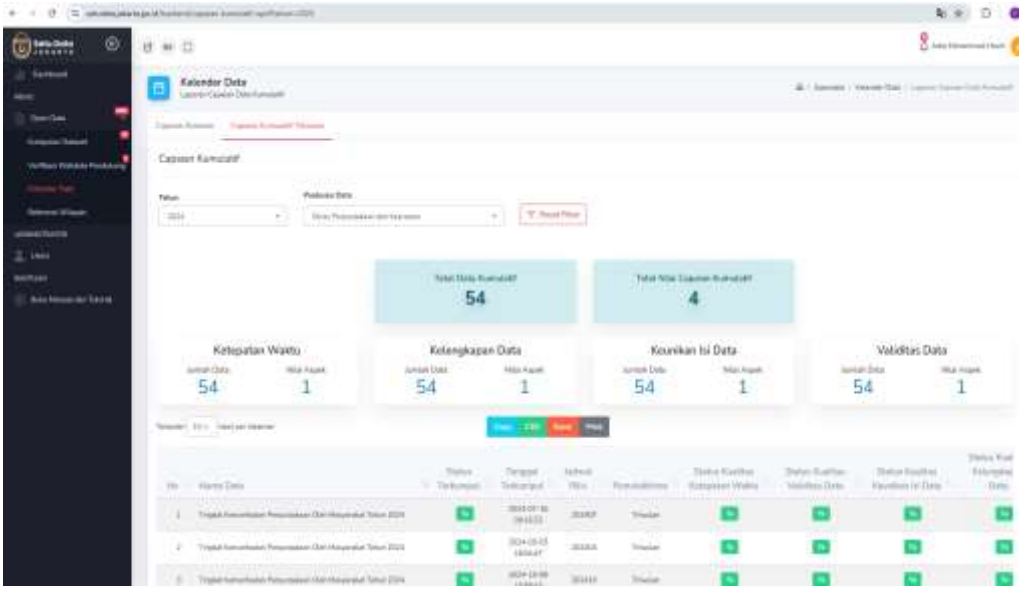

Gambar 55. Laporan Capaian Data Kumulatif

e. Persentase Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna

Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. nventarisasi BMD

berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB. Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:

1) Bobot 5%
   PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD
2) Bobot 85%
   PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki
3) Bobot 10%
   PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor e-0024 Tahun 2025 tentang Susunan Tim Lnventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Lainnya Dan Aset Tidak Berwujud Tingkat Pengguna Barang Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Capaian inventarisasi BMD berupa peralatan mesin sebesar 93.51% dari target 100%. Adapun beberapa kendala dalam pelaksanaan inventarisasi antara lain :

1) Masih terdapat perbedaan data antara kondisi fisik barang di lapangan dengan data yang tercatat pada aplikasi, sehingga memerlukan proses klarifikasi dan penyesuaian data;
2) Sebagian Barang Milik Daerah berada di lokasi yang tersebar di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Jakarta dan PDS H.B. Jassin, Perpustakaan Nyi Ageng Serang, serta beberapa lokasi Taman Baca dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), sehingga menghambat proses pengecekan fisik secara menyeluruh;
3) Terdapat kendala berupa kondisi fisik Barang Milik Daerah yang sudah rusak sehingga tidak dapat diidentifikasi;
4) Banyak buku yang telah dilakukan pengepakan sebagai dampak adanya kegiatan rehabilitasi gedung, sehingga menyulitkan penelusuran dan identifikasi keberadaan buku-buku tersebut.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan secara maksimal Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Triwulan IV dengan :

1) Menambah SDM sebanyak 30 orang yang didistribusikan ke Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di 5 wilayah kota administrasi untuk mendukung kegiatan pendataan inventarisasi BMD berupa KIB E (Aset Tetap Lainnya) dan ATB (Aset Tak Berwujud);
2) Melakukan pengecekan fisik BMD secara selektif dan prioritas, khususnya terhadap barang yang belum teridentifikasi atau berada di lokasi tersebar;
3) Mengupayakan pelaksanaan inventarisasi BMD berupa KIB E dan Aset Tak Berwujud (ATB) dengan target harian sebanyak 2.890 register per hari.

f. Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri
   1) Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang

berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)

2) Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
3) Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:
   5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa
   5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
   5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
   5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
   5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
   5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
   5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
   5.2.06 - Belanja Modal Lainnya

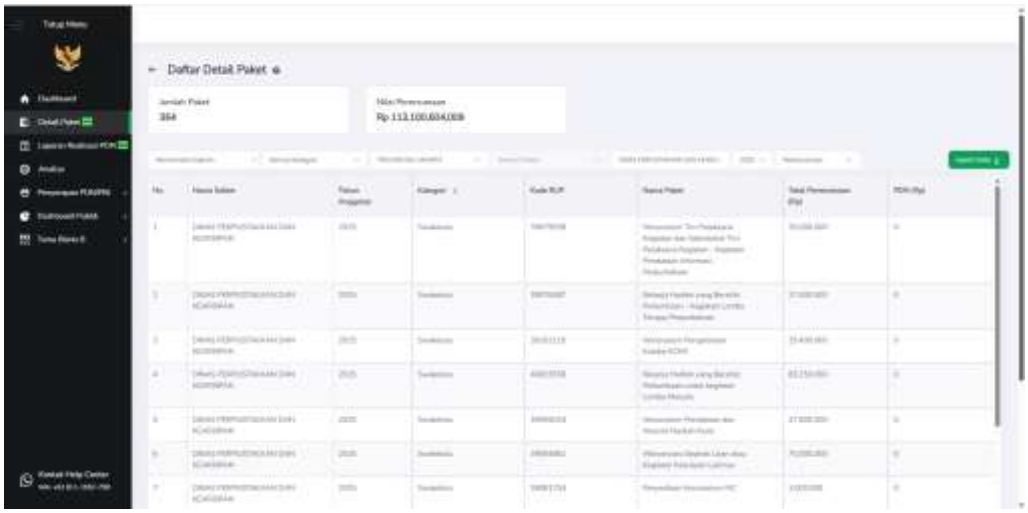

Gambar 56. Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Yang bersumber data dari Bigbox LKPP
Target Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang harus dicapai pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 100%

Total Belanja PDN Penyedia dan Swakelola Rp170.905.533.959 dibandingkan Realisasi Pembayaran Rp201.424.768.457, atau persentase capaian target (%) adalah 84,85%. Target perjanjian kinerja yang ditetapkan sebesar 80%-100%. Sehingga konversi kinerja capaian P3DN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana mencapai 100%.

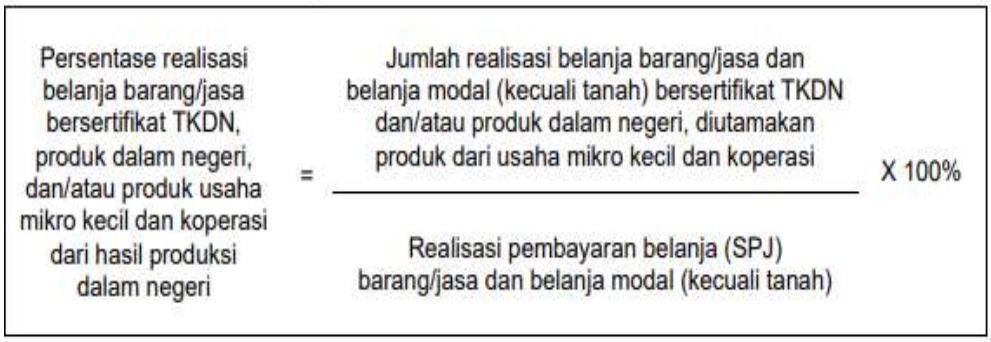

Gambar 57. Rumus perhitungan persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, dan/atau produk UMKM

g. Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun
Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id
Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2025. Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2025 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] dengan Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan Pintar BPSDM.

h. Presentase penyelesaian tahapan manajemen pengatahuan
Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id
Dalam rangke penerapan Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan dan memenuhi target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025, berupa 2 laporan asset pengetahuan berbentuk video telah mengunggah asset pengetahuan pada Portal KM https://km-bpsdm.jakarta.go.id sebagai berikut :
1) Akreditasi Sekolah dan NSPK
2) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
3) Akreditas Perguruan Tinggi dan NSPK

i. Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko
Pemenuhan dokumen Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) dan Penetapan Unit Kepatuhan Internal dengan SK Nomor e-0045 Tahun 2023, Dokumen Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko, Dokumen Profil dan Peta Risiko dan Dokumen Formulir Penanganan Risiko.

Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:

1) Komunikasi dan konsultasi;
2) Penetapan konteks;
3) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);
4) Penanganan Risiko; dan
5) Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko

Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4)] x 100%

Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW I dan Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV

Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat.

Triwulan I : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW I

Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV

Tabel 33. Risiko Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sasaran Organisasi	Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko	Sistem Pengendalian
Nilai Budaya Literasi	Bacaan atau buku yang berkualitas sulit diperoleh apalagi untuk koleksi buku digital sangat terbatas	Minimnya jumlah penulis dan koleksi digital yang berkuailtas	Tingkat gemar membaca masyarakat rendah	RISIKO OPERASIONAL	1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelengaraan Perpustakaan 2. Pergub No. 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum 3. Pergub No. 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca 4. Pergub Nom 2 Tahun 2016 tentang Perpustakaan Elektronik Ijakarta 5. Ingub No 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Pojok Baca.
	Perpustakaan terdaftar belum melengkapi isian data perpustakaan secara lengkap pada database sistem jaklitera	Masih kurangnya kesadaran pengelola perpustakaan terhadap pentingnya sistem administrasi perpustakaan	Direktori perpustakaan tidak lengkap	RISIKO OPERASIONAL	1. Perda No 2 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Perpustakaan 2. Pergub No. 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum 3. Pergub No. 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca

Sasaran Organisasi	Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko	Sistem Pengendalian
					4. Pergub Nom 2 Tahun 2016 tentang Perpustakaan Elektronik Ijakarta 5. Ingub No 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Pojok Baca.
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan Daerah masih sedikit	Penyusutan arsip pada Perangkat Daerah masih sedikit dan SDM pengelola arsip statis masih terbatas	Informasi arsip statis kepada masyarakat kurang	RISIKO REPUTASI	1. Perda No 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah 2. Pergub No 99 Tahun 2010 tentang Prosedur Pelayanan Kearsipan 3. Pergub No 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4. Kepgub No 1785 Tahun 2017 tentang Standardisasi Peralatan Kerja Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 5. Kepgub No 426 Tahun 2022 tentang Unit Pelayanan Publik Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	kurangnya informasi dan promosi kepada masyarakat tentang kegiatan/produk dinas	belum terukurnya kegiatan dalam setahun	tingkat rasio kunjungan pemustaka rendah	RISIKO OPERASIONAL	1. Perda No 2 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Perpustakaan 2. Pergub No. 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum 3. Pergub No. 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca 4. Pergub Nom 2 Tahun 2016 tentang Perpustakaan Elektronik Ijakarta 5. Ingub No 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Pojok Baca.
	Terbatasnya koleksi konvensional dan digital yang tersedia di layanan	Tidak tersedianya judul-judul yang diinginkan pemustaka	Pemustaka tidak dapat menemukan bahan perpustakaan yang dibutuhkan	RISIKO OPERASIONAL	
Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan	Pengelolaan arsip Perangkat Daerah belum sesuai standar kearsipan	Rancangan Pergub membutuhkan banyak masukan dari semua Perangkat Daerah	Pemprov DKI Jakarta belum memperoleh nilai terbaik dalam penilaian oleh ANRI	RISIKO REPUTASI	1. Perda No 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah 2. Pergub No 99 Tahun 2010 tentang Prosedur Pelayanan Kearsipan 3. Pergub No 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
	Tingkat kompetensi SDM	terjadi kesenjangan	Tingkat kepuasan	RISIKO REPUTASI	

Sasaran Organisasi	Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko	Sistem Pengendalian
	pelayanan perpustakaan dan kearsipan terbatas	antara tingkat layanan yang di berikan dengan ekspektasi masyarakat	masyarakat rendah		Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4. Kepgub No 1785 Tahun 2017 tentang Standardisasi Peralatan Kerja Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 5. Kepgub No 426 Tahun 2022 tentang Unit Pelayanan Publik Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
Persentase Inventarisasi Bmd Berupa Aset Tetap Lainnya Dan Aset Tak Berwujud Pada Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang	Terdapat aset rusak berat yang belum dihapuskan	Belum dilakukan pengajuan usul hapus aset dari Perangkat Daerah kepada BPAD	Nilai aset dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya	RISIKO KEPATUHAN	1. PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD 3. Kepgub No 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untukMenandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nilai Kualitas Data Sdi	Kurang validnya data yang diinput	Tidak terverifikasinya data dengan pencipta data	Data yang dihasilkan tidak valid (Data Sampah) dan tidak dapat menjadi acuan dalam decision making/ sebagai pengambilan keputusan	RISIKO KEBIJAKAN	1. Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 2. Pergub No 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 3. Pergub No 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 4. Pergub No 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tabun 2023-2026
Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terbatasnya jumlah produk dalam negeri yang berkualitas terutama pada barang-barang teknologi informasi	Jumlah produsen lokal berkualitas terbatas	Tingkat penggunaan TKDN rendah	RISIKO OPERASIONAL	1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya 2. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam

Sasaran Organisasi	Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko	Sistem Pengendalian
					Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Permenperin No. 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN 4. Permenperin No. 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. SE Bersama Mendagri dan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Kepgub No. 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 7. Insekda No. 51 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Peningakatn Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2022
Persentase Implementasi Berbagi Pengetahuan Melalui Komunitas Pembelajar	Terdapatnya pegawai yang tidak menguasai kompetensi utama	kurangnya sharing informasi pengetahuan antar sesama pegawai	gangguan terhadap layanan organisasi	RISIKO OPERASIONAL	1. PP No11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 2. Permenpan RB No 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) 3. Pergub No. 164 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pengetahuan
Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Risiko yang telah diidentifikasi belum seluruhnya dianalisis dengan akurat	SDM yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan	Penilaian dan penanganan risiko kurang mampu mengurangi hambatan pencapaian	RISIKO OPERASIONAL	1. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP 2. Pergub Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan MR 3. Kepgub Nomor 153 Tahun 2021 tentang

Sasaran Organisasi	Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko	Sistem Pengendalian
			tujuan organisasi		Struktur Manajemen Risiko 4. SK Kadis Pusip Nomor e-0045 Tahun 2023 tentang Struktur UPR dan UPI di Lingkungan Dispusip
Presentase Nilai Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi	Terdapat sisa mati pada pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan penyerapan anggaran kurang maksimal	harga pada DPA merupakan harga tertinggi dipasaran	Realisasi anggaran tidak maksimal	RISIKO OPERASIONAL	1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Perlem LKPP No. 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 3. Ingub No 1 Tahun 2023 tentang Transaksi E-purchasing Dengan Usaha Mikro Dan/atau Usaha Kecil Melalui Sistem E-order 4. SE Sekda No 2 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembayaran Transaksi Pengadaan Langsung Dengan Usaha Mikro Dan/atau Usaha Kecil Melalui Sistem E-order
Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Terdapat temuan yang cacat administrasi	terdapat perbedaan informasi antara SKPD dengan pemeriksa	Temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti	RISIKO REPUTASI	SOP, dan aplikasi e-monev ksd
	Pengungkapan Laporan Keuangan Kurang memadahi	Data dukung yang digunakan dalam laporan keuangan tidak akuntabel	Reviu APIP terhadap Laporan Keuangan	RISIKO KEPATUHAN	1. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran Organisasi	Risiko	Penyebab	Dampak	Kategori Risiko	Sistem Pengendalian
					4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Pergub Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi dan Perubahannya 6. Pergub No 154 Tahun 2018 Tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan 7. Ingub No 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian

j. Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi

Definisi Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.

1) Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :

1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:
   diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.
   Sumber Data : e-SAKIP
2) Penyerapan Anggaran:
   diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
   Sumber Data : Proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id
3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
   dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya.
   Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.
   Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.
   Sumber Data :

a) data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.

4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
Dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.
Sumber Data : proyeksi APBD
Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:
Bp = 9,7%
BK = 18,2%
Bckk = 43,5%
BE = 28,6%
Bp : Bobot penyerapan anggaran
BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bckk : Bobot capaian keluaran
BE : Bobot efisiensi
Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :
≤ 60 = Rendah
> 60 s.d 70 = cukup
> 70 s.d 90 = Baik
> 90 s.d 100 = Sangat Baik
Yang dihitung melalui Bobot Capaian Keluaran Subkegiatan (BCKK), Bobot efesiensi (BE), Bobot Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (BK) dan Bobot Penyerapan Anggaran (BP) diperoleh Persentasi Nilai Kinerja anggaran aspek Implementasi sebesar 88.20 %.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran operasional organisasi :

1) Persentase penyelesaian Tindak Lanjut arahan Gubernur
   Capaian jumlah realisasi TL Arahan Gubernur tahun 2025 adalah 100%.
2) Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat
   Capaian jumlah realisasi TL aduan masyarakat pada sistem CRM adalah 100%.
3) Persentase progres penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)
   Capaian indikator ini adalah 100% dengan terselesaikannya rekomendasi LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

4. **Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Dengan Target Renstra**
   Capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra) dari awal tahun dijanjikan 2023-2026.

Tabel 34. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2025 Berbanding dengan Target Renstra 2023-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Renstra					Realisasi					Realisasi dibandingkan Target Akhir Resntra	Keterangan
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat	Nilai Budaya Literasi	Nilai	67.11	71.3	71.4	71.5	-	68,64	71.4	72,09	78.76	-		
2	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Penyelenggaraan Layanan Arsip yang Akuntabel	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	80,00	87,64	81,32	81,82	94,36	90,98	90.06	93,11	94.36	-		
3	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19.31	19.51	19.71	19,91	20,2	19.31	19,71	19,78	19.96	-		
4	Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Kearsipan Daerah, Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan, Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan yang Diawasi dan Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan	Nilai	-	77	78	79	-	87,58	92.45	93,11	93.73	-		

Realisasi indikator Nilai Budaya Literasi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 nilainya 67,11 kemudian meningkat di Tahun 2024 menjadi 71,27, kenaikan di tahun 2022 ke tahun 2024 tidak terlalu besar. Sedangkan, kenaikan realisasi dari tahun 2024 sampai 2025 cukup besar.

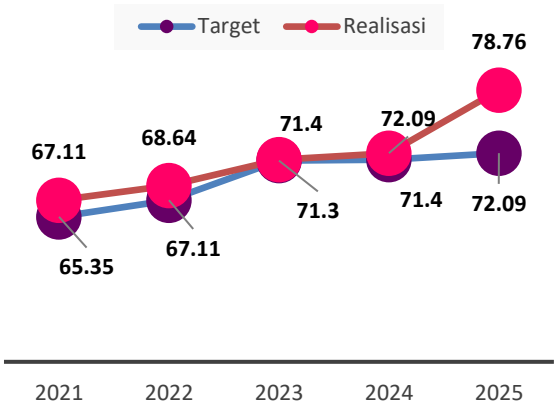

Gambar 58. Perbandingan Nilai Budaya Literasi Tahun 2021-2025

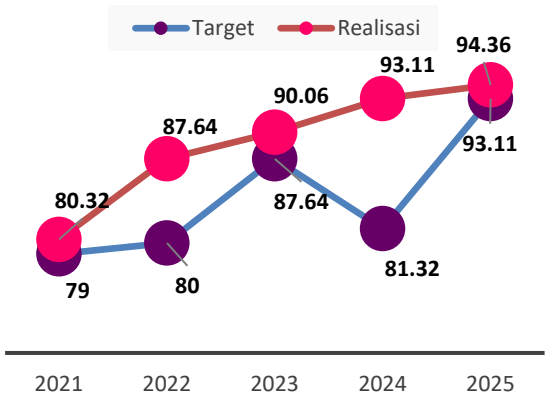

Gambar 59. Perbandingan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2021-2025

Realisasi indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengalami penurunan pada tahun 2022, karena ada perbedaan penghitungan yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional tidak menggunakan lagi pedoman yang dikeluarkan pada tahun 2021.

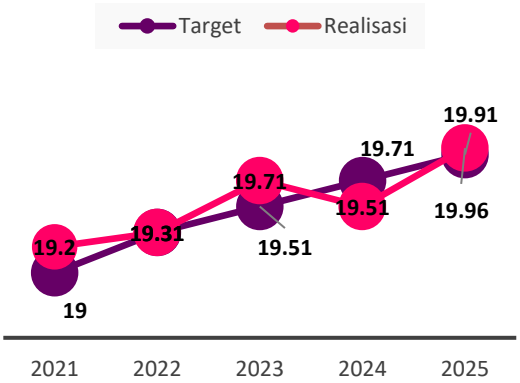

Gambar 60. Perbandingan IPLM Tahun 2021 - 2025

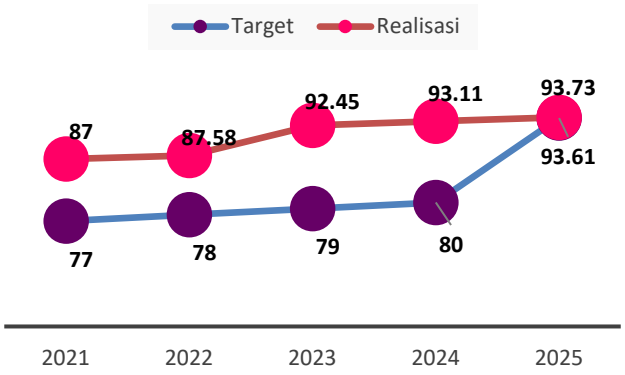

Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Gambar 61. Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Arsip

Tabel 35. Indeks Daya Saing Daerah

LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
3.68	4.37	5.00	4.57	4.06	3.94	2.64	4.54	4.11	5.00	3.34	3.77	4.09

Sumber : Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024; BRIN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta telah melaksanakan program yang mendukung terkait dengan capaian IDSD yaitu Program Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran Rp93,440,124,016 realisasinya Rp88.325.870.117 dengan capaian 94.53% yang terdiri atas 2 kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi.

IDSD merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Indeks ini menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, dengan 23 Dimensi dan 90 indikator. IDSD diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

5. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi didefinisikan sebagi suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 36. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran/Program /Kegiatan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN LITERASI DAN KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	100,25%	94.56%	14.69%
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		103.90%	94.53%	9.37%
		Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	105,89%	94.53%	11.36%
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	105,97%	94.53%	11.44%
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	107,55%	94.53%	13.02%
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	100%	94.53%	5.47%
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	100,07%	94.53%	5.54%
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		144.94%	94.53%	50.41%
		Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A	149,99%	94.53%	55.46%

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran/Program /Kegiatan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
		Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	174,47%	94.53%	79.94%
		Persentase tenaga perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai standar nasional perpustakaan	121,47%	94.53%	26.94%
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca	101,29%	94.52%	6.77%
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		100.25%	97.98%	2.27%
		Persentase Capaian Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang Menjadi Koleksi Daerah	100,5%	97.98%	2.52%
		Persentase Capaian Naskah Kuno Milik Daerah Yang Dilestarikan	100%	97.98%	2.02%
	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah yang di Lestarikan	100,5%	97.10%	3.40%
	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	100%	98.75%	1.25%
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	100%	98.88%	1.12%

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran/Program /Kegiatan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diselamatkan dan Dikembangkan	120%	98.35%	21.65%
2	MENINGKATNYA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN DAERAH, KAPABILITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN YANG DIAWASI DAN MENINGKATNYA MUTU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan	100,13%	87.68%	12.45%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	87.45%	12.55%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	100%	86.09%	13.91%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	100%	94.77%	5.23%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	86.44%	13.56%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94.06%	5.94%

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran/Program /Kegiatan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	86.32%	13.68%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	92.63%	7.37%
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		120.29%	89.37%	30.92%
		Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan	138,43%	89.37%	49.06%
		Persentase lembaga (OPD, BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK	102,14%	89.37%	12.77%
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) Yang Membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan	104,12%	93.22%	10.90%
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Presentase arsip statis yang dikelola	160,45%	93.15%	67.30%
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase simpul jaringan sistem informasi kearsipan yang dikelola	104,3%	81.03%	23.27%

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan, Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada, Karena seluruh target kinerja pada 2025 tercapai, maka persentase realisasi target kinerja seluruh indikatornya melebihi 100%,

Target indikator kinerja sasaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2025 sebesar 19.91 berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Konsultan diperoleh nilai 19,96 sehingga capaian kinerja 100,25%% Untuk mendukung capaian kinerja tersebut didukung oleh anggaran dengan realisasi penyerapan sebesar 94.56% dan tingkat efisiensi anggaran sebanyak 14.69%, Capaian Indikator Kinerja Sasaran didukung oleh Indikator Kinerja Program Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat dengan capaian kinerja 105,89%, Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 105,97%, Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 107,55%, Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar 100%%, Nilai Tingkat Kegemaran Membaca 100,07%.

Target indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan pada tahun 2025 adalah 100,13%, Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan diperoleh hasil sebesar 93,73% sehingga capaiannya 100,13%% Untuk mendukung capaian kinerja tersebut didukung oleh anggaran dengan realisasi penyerapan sebesar 87.68% dan tingkat efisiensi anggaran sebanyak 12.45%, Capaian Indikator Kinerja Sasaran didukung oleh Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capian kinerja 100%, Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan sebesar 138,43% dan Persentase lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK sebesar 102,14%.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan, Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Optimalisasi Digitalisasi dan Transformasi Layanan
   Salah satu faktor utama mengapa Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan (105,89%) bisa tinggi meski anggaran tidak terserap penuh adalah efisiensi biaya operasional melalui layanan digital.
   - Perluasan Akses Digital: Penggunaan aplikasi perpustakaan digital (seperti jaklitera dan iJakarta) memungkinkan masyarakat mengakses koleksi tanpa harus ada mobilisasi fisik yang memakan biaya pemeliharaan gedung atau jasa pendukung secara besar-besaran.
   - Self-Service Technology: Penerapan sistem otomasi perpustakaan mengurangi ketergantungan pada biaya operasional rutin namun meningkatkan kecepatan layanan.
2. Strategi Pengadaan Koleksi yang Tepat Guna
   Tercapainya Rasio Ketercukupan Koleksi (105,97%) dengan sisa anggaran 5,47% menunjukkan adanya efisiensi dalam proses pengadaan:
   - Skala Ekonomi (Economy of Scale): Keberhasilan melakukan negosiasi harga atau memanfaatkan kontrak (e-catalogue) sehingga mendapatkan volume buku lebih banyak dengan harga yang lebih kompetitif.

- Hibah dan Partisipasi Masyarakat: Adanya gerakan donasi buku atau kerja sama dengan pihak swasta (CSR) yang menambah jumlah koleksi tanpa membebani APBD secara langsung.

3. Manajemen SDM dan Kemitraan Strategis
   Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (107,55%) melampaui target dipengaruhi oleh:
   - Pemberdayaan Tenaga Relawan/Magang: Melibatkan komunitas literasi dan mahasiswa magang untuk membantu pelayanan, sehingga rasio ketercukupan tenaga terpenuhi secara fungsional tanpa menambah belanja pegawai/jasa perorangan (PJLP).
   - Multi-tasking & Diklat Efisien: Peningkatan kapasitas tenaga yang ada sehingga satu orang mampu mengelola cakupan wilayah/penduduk yang lebih luas dengan lebih produktif.
4. Standarisasi melalui Pendampingan Terpadu
   Persentase Perpustakaan sesuai Standar (100%) tercapai karena:
   - Fokus pada Re-akreditasi: Penekanan pada aspek manajerial dan tata kelola yang tidak selalu membutuhkan biaya konstruksi besar, melainkan perbaikan administrasi dan prosedur operasional standar (SOP).
   - Efisiensi Belanja Modal: Pengadaan sarana prasarana yang dilakukan secara kolektif atau pemanfaatan aset eksisting yang dioptimalisasi (refurbishment).
5. Ekosistem Literasi dan Kolaborasi Lintas Sektor
   Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (100,07%) yang stabil di angka tinggi dipicu oleh:
   - Aktivasi Ruang Publik: Pemanfaatan RPTRA atau taman-taman kota sebagai titik baca tanpa memerlukan anggaran pembangunan gedung baru (sharing infrastructure).
   - Viral Marketing: Penggunaan media sosial dan kampanye literasi organik yang melibatkan influencer atau komunitas tanpa biaya iklan yang mahal.

   a. Analisis Faktor Keberhasilan pada Program Pembinaan Perpustakaan: Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja program pembinaan perpustakaan adalah sebesar 103,90%, sedangkan rata-rata penyerapan anggaran hanya sebesar 94,53%. Hal ini menunjukkan adanya indeks produktivitas yang positif, di mana organisasi mampu menghasilkan output 3,90% di atas target dengan penggunaan sumber daya 5,47% di bawah pagu anggaran yang tersedia.
      1) Penjelasan Efisiensi (Variance Analysis):
         - Efisiensi Manajerial: Terjadinya penghematan (saving) sebesar 5,47% pada seluruh indikator bukan disebabkan oleh pengurangan volume kegiatan, melainkan adanya efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa (sisa tender) serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang mengurangi biaya-biaya administratif dan perjalanan dinas.
         - Optimalisasi Sumber Daya: Khusus pada indikator Rasio Tenaga Perpustakaan (107,55%), kelebihan capaian di tengah efisiensi anggaran menunjukkan keberhasilan strategi kolaborasi dengan sektor non-pemerintah (relawan/komunitas) yang tidak membebani belanja daerah secara langsung.

2) Dampak Terhadap Sasaran Strategis: Capaian Tingkat Kegemaran Membaca (100,07%) yang melampaui target dengan anggaran yang efisien membuktikan bahwa program-program literasi di DKI Jakarta telah mencapai tipping point, di mana kesadaran masyarakat telah terbentuk sehingga intervensi anggaran tidak lagi menjadi satu-satunya pendorong utama keberhasilan program.
3) Faktor Akselerasi Akreditasi dan Standarisasi (Capaian 149,99% --174,47%)
Terdapat lonjakan signifikan pada pemenuhan Akreditasi A dan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Faktor-faktornya meliputi:
   - Pendampingan Pre-Audit yang Intensif: Tim pembina melakukan pra-akreditasi secara mandiri sebelum dinilai oleh Perpustakaan Nasional. Hal ini memastikan tingkat kelulusan Akreditasi A sangat tinggi dalam sekali pengajuan.
   - Sinergi Anggaran Lintas Sektor: Keberhasilan standarisasi perpustakaan (seperti perpustakaan sekolah atau rumah ibadah) seringkali menggunakan anggaran mandiri dari lembaga tersebut, sementara Dispusip hanya melakukan fungsi pembinaan (coaching). Inilah yang menyebabkan output fisik melonjak tanpa beban anggaran belanja modal di DPA Dispusip.
   - Sistem Monitoring Digital (E-Supervisi): Penggunaan platform digital untuk memantau progres SNP secara real-time mempercepat proses verifikasi tanpa biaya perjalanan dinas yang besar.
4) Faktor Pengembangan Tenaga Perpustakaan (Capaian 121,47%). Melampaui target sebesar 21,47% dengan efisiensi anggaran 5,47% dipicu oleh:
   - Metode Blended Learning & Webinar: Transformasi diklat dari tatap muka ke metode daring/hybrid memungkinkan jumlah peserta (tenaga perpustakaan) yang ikut serta jauh lebih banyak tanpa menambah biaya konsumsi, sewa gedung, atau akomodasi.
   - Pemanfaatan Narasumber Internal: Mengoptimalkan Pejabat Fungsional Pustakawan Madya/Utama sebagai narasumber pembinaan, sehingga mengurangi belanja honorarium pihak ketiga.
5) Faktor Pembudayaan Gemar Membaca (Capaian 101,29%)
Meskipun capaiannya paling mendekati target dibanding indikator lain, ini menunjukkan stabilitas partisipasi masyarakat melalui:
   - Strategi *Event* Kolaboratif: Menggandeng pegiat literasi, penerbit, dan komunitas dalam acara seperti "Baca Jakarta". Partisipasi masyarakat meningkat karena aktivasi komunitas, bukan sekadar *top-down* dari pemerintah.
   - Pemanfaatan Media Sosial: Kampanye literasi digital yang bersifat viral mengurangi ketergantungan pada media luar ruang (baliho/spanduk) yang mahal secara biaya namun terbatas jangkauannya.mahal secara biaya namun terbatas jangkauannya.

Indikator Program	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Rasio Efektivitas	Analisis Efisiensi
Persentase Perpus. Akreditasi A	149,99%	94,53%	**1,58**	Sangat Tinggi (Sisa tender/Hibah)
Persentase Perpus. Sesuai SNP	174,47%	94,53%	**1,84**	Masif (Kolaborasi Lintas Sektor)
Persentase Tenaga Perpus. Dibina	121,47%	94,53%	**1,28**	Tinggi (Digitalisasi Pelatihan)
Persentase Masyarakat Literat	101,29%	94,53%	**1,07**	Optimal (Aktivasi Komunitas)

Melampauinya capaian kinerja pada Program Pengelolaan Perpustakaan yang mencapai rata-rata di atas 130%, sementara penyerapan anggaran berada di angka 94,53%, membuktikan adanya implementasi strategi **Resource Sharing**. Dispusip Provinsi DKI Jakarta berhasil memposisikan diri sebagai *regulator dan fasilitator* yang menggerakkan sumber daya eksternal (masyarakat, swasta, dan instansi lain) untuk memenuhi standar nasional, sehingga target output tercapai secara eksponensial tanpa bergantung sepenuhnya pada belanja daerah.

b. Analisis Faktor Keberhasilan pada Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

1) Serah Simpan Karya Cetak & Karya Rekam (KCKR)
Memiliki Capaian sebesar 100,5% dan Penyerapan Anggaran sebesar 97,98%. Keberhasilan melampaui target tipis di atas 100% menunjukkan efektivitas penegakan regulasi (UU No. 13 Tahun 2018). Faktor pendukungnya adalah:

- Penguatan Jejaring Penerbit dan Produser Rekam: Dispusip DKI Jakarta berhasil membangun database penerbit yang aktif di wilayah Jakarta, sehingga proses jemput bola (*proactive gathering*) terhadap karya cetak dan karya rekam menjadi lebih terukur.
- Implementasi Sistem Serah Simpan Digital: Adanya platform atau prosedur yang memudahkan penerbit menyerahkan karya rekam dalam bentuk digital mengurangi hambatan logistik, yang berdampak pada efisiensi anggaran pengiriman/penerimaan sebesar 2,02%.
- Inisiatif "Deposit Day": Penyelenggaraan forum sosialisasi kepada penerbit yang efektif, sehingga kesadaran akan kewajiban serah simpan meningkat tanpa perlu dilakukan penindakan atau pengawasan lapangan yang berbiaya tinggi.

2) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah
Memiliki Capaian sebesar 100% dan Penyerapan Anggaran sebesar 97,98%. Capaian yang tepat 100% menunjukkan bahwa seluruh target naskah yang diidentifikasi di awal tahun berhasil ditangani sepenuhnya. Faktor keberhasilannya meliputi:

- Digitalisasi Naskah (Alih Media): Keberhasilan melakukan konservasi fisik sekaligus alih media digital. Dengan digitalisasi, naskah asli tetap terjaga (preserved) sementara akses informasinya terbuka luas. Penggunaan teknologi yang tepat guna memastikan tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia.
- Tenaga Konservator Tersertifikasi: Ketersediaan tenaga ahli preservasi yang kompeten di internal Pemprov DKI Jakarta sehingga proses restorasi naskah yang sangat teknis dan berisiko tinggi dapat diselesaikan tepat waktu sesuai standar kuratorial.
- Kemitraan dengan Pemilik Naskah Pribadi: Keberhasilan persuasi kepada masyarakat yang memiliki naskah kuno untuk bersedia naskahnya dikonservasi oleh negara. Ini adalah keberhasilan dari sisi komunikasi publik.

Indikator Kinerja Kegiatan	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Realisasi Anggaran**	**Serapan**	**Tingkat Efisiensi**
Capaian Serah Simpan KCKR	100%	100,5%	**100,50%**	97,98%	97,98%	**+2,52%**
Pelestarian Naskah Kuno	100%	100,0%	**100,00%**	97,98%	97,98%	**+2,02%**
Rata-rata Program			**100,25%**		**97,98%**	**Sangat Baik**

3) Justifikasi Efisiensi Anggaran dalam LKIP:
Sisa anggaran sebesar 2,02% (selisih dari 100% - 97,98%) bukan menunjukkan adanya kegiatan yang tidak terlaksana, melainkan merupakan hasil dari:

- Optimalisasi Belanja Bahan: Efisiensi dalam pengadaan bahan-bahan kimia khusus untuk konservasi naskah melalui prosedur pengadaan yang kompetitif.
- Efisiensi Rapat Koordinasi: Pengalihan beberapa rapat koordinasi teknis dengan kolektor naskah ke moda daring, yang menghemat belanja konsumsi dan perjalanan dinas tanpa mengurangi output target.

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno pada tahun ini menunjukkan tingkat akurasi perencanaan yang sangat tinggi. Dengan serapan anggaran sebesar 97,98%, instansi mampu memenuhi seluruh janji kinerja (100% naskah terakomodir) dan bahkan melampaui target koleksi

daerah (100,5%). Hal ini mencerminkan keseimbangan yang optimal antara pembiayaan operasional dengan perlindungan aset budaya bangsa di wilayah DKI Jakarta.

c. Analisis Faktor Keberhasilan pada PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1) Transformasi Digital dan Simplifikasi Birokrasi (Administrasi & Perencanaan)
   - Efisiensi Layanan Keuangan (Serapan 86,09%): Penggunaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi (seperti SIPD atau e-Accounting) mempercepat proses verifikasi dan pencairan tanpa memerlukan banyak dokumen fisik atau lembur pegawai yang berbiaya tinggi. Rendahnya serapan menunjukkan efisiensi pada biaya pendukung administrasi (ATK, jasa surat menyurat, dll).
   - Ketepatan Waktu Perencanaan (Serapan 92,63%): Penggunaan tools kolaboratif digital memungkinkan penyusunan Renja, RKT, dan Perjanjian Kinerja dilakukan secara paralel (simultan) oleh tim perencana, sehingga dokumen selesai tepat waktu dengan biaya rapat koordinasi yang lebih efisien.
2) Strategi Pengadaan dan Pemeliharaan Berbasis Kualitas (BMD)
   - Optimalisasi Pengadaan Barang (Serapan 86,44%): Angka kepuasan 100% di tengah serapan rendah menunjukkan keberhasilan dalam memanfaatkan e-Catalogue. Organisasi mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga pasar yang lebih kompetitif (efisiensi harga), sehingga sisa anggaran tender/pembelian menjadi cukup besar tanpa mengurangi kepuasan pengguna.
   - Pemeliharaan Preventif (Serapan 86,32%): Kepuasan 100% menunjukkan aset dalam kondisi prima. Penyerapan yang rendah menunjukkan peralihan dari metode *corrective maintenance* (memperbaiki saat rusak—mahal) menjadi *preventive maintenance* (perawatan rutin—lebih murah). Ini adalah tanda manajemen aset yang sangat baik.
3) Service Excellence pada Layanan Umum dan Penunjang
   Indeks Kepuasan Admin Umum (Serapan 94,77%) & Penunjang (94,06%): Tingginya kepuasan ini dipengaruhi oleh standarisasi layanan (SOP) yang jelas. Serapan anggaran yang tidak mencapai 100% menunjukkan adanya pengendalian belanja operasional kantor (listrik, air, telepon, kebersihan) melalui kampanye hemat energi dan penggunaan sumber daya secara bijak di lingkungan kantor.

Indikator Layanan Penunjang	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Indeks Efisiensi	Predikat
Layanan Administrasi Keuangan	100%	86,09%	**13,91%**	Sangat Efisien
Layanan Administrasi Umum	100%	94,77%	**5,23%**	Efisien

Indikator Layanan Penunjang	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Indeks Efisiensi	Predikat
Pengadaan BMD Penunjang	100%	86,44%	**13,56%**	Sangat Efisien
Layanan Penunjang Urusan	100%	94,06%	**5,94%**	Efisien
Pemeliharaan BMD Penunjang	100%	86,32%	**13,68%**	Sangat Efisien
Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	92,63%	**7,37%**	Efisien
Rata-Rata Program Penunjang	**100%**	**90,05%**	**9,95%**	**Sangat Baik**

Keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun ini ditandai dengan tercapainya nilai sempurna (100%) pada seluruh indeks kepuasan layanan, dengan rata-rata efisiensi anggaran sebesar 9,95%. Hal ini merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi belanja rutin dan penerapan sistem aplikasi perkantoran yang terintegrasi.

Khusus pada sektor Pengadaan dan Pemeliharaan BMD, penghematan rata-rata sebesar 13,6% mencerminkan keberhasilan organisasi dalam melakukan negosiasi harga melalui e-purchasing serta penerapan pola pemeliharaan aset yang terjadwal, sehingga mencegah kerusakan berat yang membutuhkan biaya besar. Capaian ini menegaskan bahwa kualitas layanan internal tetap terjaga pada level maksimal meskipun dilakukan rasionalisasi belanja operasional.

d. Analisis Capaian Program Pengelolaan Kearsipan

Kombinasi capaian output yang tinggi (138,43%) dengan serapan anggaran yang relatif rendah (89,37%) menunjukkan adanya peningkatan produktivitas kerja yang didorong oleh inovasi metode kerja. Berikut adalah uraian detail faktor keberhasilannya:

1) Faktor Keberhasilan: Ketersediaan Arsip Siap Layan (Capaian 138,43%)
Capaian yang melampaui target sebesar 38,43% ini merupakan indikator bahwa proses pengolahan arsip statis maupun dinamis berjalan jauh lebih cepat dari estimasi awal. Faktor penyebabnya meliputi:

- Akselerasi Digitalisasi Arsip (E-Archive): Penggunaan teknologi pemindaian (*scanning*) massal dan sistem pengindeksan otomatis memungkinkan volume arsip yang diproses menjadi "siap layan" meningkat drastis tanpa memerlukan penambahan personel yang signifikan.

- Penerapan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SRKK): Penataan yang lebih sistematis di hulu (pada saat arsip diciptakan) memudahkan unit kearsipan untuk memverifikasi dan menyajikan arsip saat dibutuhkan, sehingga mempercepat status "siap layan".
- Gerakan Sadar Tertib Arsip: Adanya peningkatan kinerja internal dalam melakukan penataan arsip-arsip *backlog* (arsip tahun-tahun sebelumnya yang belum tertata) yang berhasil diselesaikan pada tahun anggaran berjalan melalui manajemen beban kerja yang efektif.

2) Faktor Keberhasilan: Pengelolaan Arsip OPD & BUMD Sesuai NSPK (Capaian 102,14%)

   Tercapainya kepatuhan lembaga terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) menunjukkan keberhasilan fungsi pembinaan:
   - Audit Kearsipan Internal yang Efektif: Pelaksanaan audit kearsipan terhadap OPD dan BUMD yang dilakukan secara rutin mendorong lembaga-lembaga tersebut untuk segera melakukan perbaikan tata kelola arsipnya agar mendapatkan nilai pengawasan kearsipan yang baik.
   - Modul Pembinaan Mandiri: Penyediaan panduan teknis dan konsultasi berbasis daring (*online*) membuat OPD dan BUMD dapat melakukan penyesuaian tata kelola tanpa harus menunggu jadwal kunjungan fisik dari tim pembina Dispusip.
   - Komitmen Pimpinan Lembaga: Meningkatnya kesadaran kepala OPD dan direksi BUMD akan pentingnya memori kolektif bangsa dan kepatuhan hukum terhadap UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

4) Analisis Efisiensi Anggaran (Serapan 89,37%)

   Terdapat selisih sebesar 10,63% antara pagu anggaran dengan realisasi, yang dalam narasi LKIP harus dijelaskan sebagai bentuk efisiensi, bukan sisa anggaran biasa:
   - Optimalisasi Ruang Simpan (Depo): Efisiensi biaya pemeliharaan ruang simpan melalui penggunaan *compact disk* atau penyimpanan digital yang mengurangi biaya sarana prasarana fisik.
   - Metode Pembinaan Berbiaya Rendah: Pengalihan metode bimbingan teknis (Bimtek) dari pertemuan hotel ke aula milik pemerintah atau secara virtual, yang memangkas belanja sewa ruangan dan konsumsi secara signifikan.
   - Efisiensi Pengadaan Alat Kearsipan: Pemanfaatan e-purchasing yang menghasilkan harga satuan lebih rendah dari pagu awal, sehingga volume pekerjaan tetap tercapai (bahkan melampaui) dengan biaya yang lebih hemat.

Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi Anggaran
Ketersediaan Arsip Siap Layan	100%	138,43%	**138,43%**	89,37%	**10,63%**

Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi Anggaran
Pengelolaan Arsip sesuai NSPK	100%	102,14%	**102,14%**	89,37%	**10,63%**
Rata-Rata Program			**120,29%**	**89,37%**	**Sangat Efisien**

Program Pengelolaan Arsip menunjukkan performa yang sangat progresif dengan indeks efektivitas mencapai 120,29% dan tingkat penghematan anggaran sebesar 10,63%. Tingginya capaian ketersediaan arsip siap layan (138,43%) membuktikan bahwa proses transformasi kearsipan manual ke digital telah berjalan pada jalur yang tepat (*on the right track*), yang secara sistematis meningkatkan kecepatan layanan informasi publik bagi masyarakat DKI Jakarta

5) Pengelolaan Arsip Dinamis memiliki capaian seebsar 104,12% dan serapan sebesar 93,22%). Pada *Indikator: Pembuatan Daftar Arsip Aktif/Berkas sesuai Standar* Faktor keberhasilan yang melampaui target (104,12%) dengan efisiensi anggaran 6,78% adalah:
   - Standarisasi Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis (IPAD): Keberhasilan penyusunan dan pendistribusian Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip secara digital ke seluruh lembaga (OPD/BUMD/Ormas).
   - Penerapan Aplikasi Arjuna/E-Office: Digitalisasi proses pembuatan daftar berkas secara otomatis saat naskah dinas dibuat, sehingga kepatuhan lembaga meningkat tanpa memerlukan bimbingan teknis tatap muka yang intensif.
   - Pendampingan Kelompok Kerja (Pokja): Pembentukan unit-unit kecil kearsipan di tingkat UKPD yang melakukan supervisi mandiri, sehingga cakupan lembaga yang tertib administrasi meningkat melebihi target.
6) Pengelolaan Arsip Statis memiliki capaian sebesar 160,45% dan Serapan seebsar 93,15%) Pada *Indikator: Persentase Arsip Statis yang Dikelola.* Capaian masif 160,45% menunjukkan volume kerja yang melampaui rencana (over-performance). Faktor keberhasilannya:
   - Inisiatif Penyelamatan Arsip Bernilai Guna Tinggi: Adanya program percepatan (akselerasi) akuisisi arsip statis dari lembaga yang mengalami likuidasi atau penggabungan (merger) pada tahun berjalan.
   - Efisiensi Alur Kerja Inventarisasi: Penerapan metode *batch processing* dalam pengolahan arsip statis (deskripsi, manuver naskah, hingga penyusunan sarana bantu penemuan kembali/Finding Aids) yang lebih cepat dari standar waktu normal.
   - Sinergi Penyerahan Arsip Statis: Kesadaran lembaga pencipta arsip untuk menyerahkan arsip statisnya ke Dispusip lebih tinggi dari perkiraan awal, yang didukung oleh ketersediaan ruang simpan (depo) yang memadai.

7) Pengelolaan Simpul Jaringan SIKN memiliki capaian sebesar 104,3% dan serapan sebesar 81,03%. Pada indikator ini memiliki tingkat efisiensi tertinggi (hemat 18,97%). Faktor keberhasilannya:
   - Optimalisasi Infrastruktur *Cloud*: Pengalihan dari pemeliharaan server fisik ke infrastruktur *Cloud*, sehingga biaya pemeliharaan perangkat keras (hardware) dan listrik dapat ditekan secara signifikan namun sistem tetap berjalan 100%.
   - Interoperabilitas Sistem: Keberhasilan integrasi data antar simpul jaringan (OPD) tanpa perlu membangun *interface* baru yang mahal, melainkan memanfaatkan API (*Application Programming Interface*) yang sudah ada.
   - Pemeliharaan Mandiri oleh Tim IT Internal: Pengurangan ketergantungan pada pihak ketiga (vendor) untuk pemeliharaan rutin, digantikan oleh optimalisasi staf fungsional pranata komputer internal Dispusip.

Kegiatan Kearsipan	Output Realisasi	Input Anggaran	Rasio Efektivitas	Analisis Efisiensi
Arsip Dinamis	104,12%	93,22%	1,12	Efisien (Digitalisasi e-office)
Arsip Statis	160,45%	93,15%	**1,72**	Sangat Tinggi (Akselerasi Akuisisi)
Simpul Jaringan	104,30%	81,03%	1,29	Ekstrim (Optimalisasi Shared-Infra)
Rerata Sektor	**122,95%**	**89,13%**	**1,38**	**Sangat Baik**

Capaian kinerja bidang kearsipan tahun ini menunjukkan keunggulan pada aspek pengelolaan arsip statis yang mencapai 160,45%, mengindikasikan bahwa Dispusip DKI Jakarta berhasil melakukan penyelamatan memori kolektif bangsa jauh melebihi target yang ditetapkan.

Keberhasilan ini semakin berkualitas dengan adanya tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi pada pengelolaan Simpul Jaringan SIKN (serapan 81,03%). Hal ini bukan menunjukkan kurangnya daya serap, melainkan keberhasilan strategi Shared Infrastructure dan optimalisasi kompetensi internal dalam mengelola sistem informasi. Secara keseluruhan, program ini telah mendemonstrasikan prinsip *Value for Money* (ekonomis, efisien, dan efektif) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 37. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2025			Capaian %	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
			Satuan	Target	Realisasi					
1	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN LITERASI DAN KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19.91	19,96	100,25%	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
							Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	71,758,845,684	67,833,725,425	94.53%
							Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	21,681,278,332	20,492,144,692	94.52%
							PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
							Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	346,776,278	336,714,907	97.10%
							Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	70,941,920	70,058,000	98.75%
							Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	146,907,952	145,265,652	98.88%
							Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	311,925,660	306,774,800	98.35%
2	MENINGKATNYA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	Indeks Kepuasan	Nilai	93.61	100,13	100,13%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2025			Capaian %	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
			Satuan	Target	Realisasi					
	KEARSIPAN DAERAH, KAPABILITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN YANG DIAWASI DAN MENINGKATNYA MUTU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Layanan Kearsipan					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104,316,897,756	89,808,207,946	86.09%
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,475,227,706	5,188,659,566	94.77%
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,213,883,473	12,286,549,071	86.44%
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26,622,429,666	25,040,290,886	94.06%
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53,093,041,227	45,829,754,650	86.32%
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144,114,126	133,500,000	92.63%
							PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
							Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	6,277,386,257	5,851,809,555	93.22%
							Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	12,112,728,908	11,282,618,198	93.15%
							Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	8,396,904,540	6,803,831,278	81.03%

1. Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
   Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat memiliki target 19.91 dengan realisasi 19,96 sehingga capaian kinerjanya 100,25%, Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh tercapainya program dan kegiatan yaitu Program pembinaan perpustakaan yang terdiri atas : kegiatan Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi dan kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi, Masing-masing kegiatan ini memiliki realisasi capaian rata-rata di atas 100%,

2. Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan
   Target indikator Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan adalah 93.61%, dan realisasi 93,73% sehingga capaian indikator sebesar 100,13%,
   Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh tercapainya indikator kinerja pada Program pengelolaan arsip, Program pengelolaan arsip didukung oleh pencapaian kinerja kegiatan pengelolaan arsip dinamis provinsi, kegiatan pengelolaan arsip statis daerah provinsi dan kegiatan pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi kearsipan nasional tingkat provinsi,

6. **Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Sasaran dengan Target Nasional**
Pada Indikator Kinerja Utama Nilai Budaya Literasi dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), capaian realisasi indikator di wilayah DKI Jakarta dapat dibandingkan dengan capaian setara nasional, pada laporan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan BPS,

Tabel 38. Perbandingan Indikator Nilai Budaya Literasi dengan Target Nasional

Indikator Sasaran	Provinsi	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Budaya Literasi	DKI Jakarta	75,60	77,35	67,11	68,64	70,58
	D,I, Yogyakarta	78,04	80,34	56,20	57,72	60,51
	Jawa Barat	62,52	64,82	56,60	58,28	61,91
	Jawa Tengah	56,67	59,90	50,00	53,36	56,63
	Banten	60,27	61,30	56,39	59,01	60,56
	Jawa Timur	57,48	60,62	50,81	54,70	56,75
	Nasional	59,11	61,63	54,29	57,4	60,49

Sumber : https://ipk,kemdikbud,go,id/dimensi/budaya-literasi

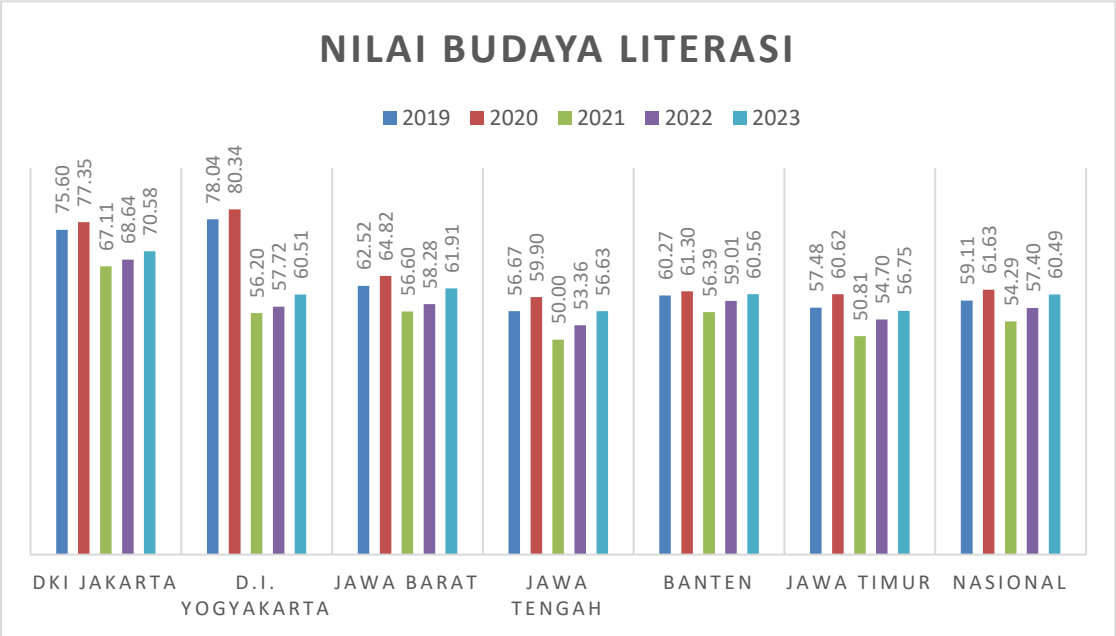

Gambar 62. Grafik Perbandingan Nilai Budaya Literasi dengan Targget Nasional

Budaya literasi menjadi dimensi dalam indeks pembangunan kebudayaan pada RPJMN Tahun 2020-2024, Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter, Berdasarkan hasil pengukuran dari BPS pada tahun 2019-2022 bahwa Nilai Budaya Literasi mengalami penurunan di tahun 2021, kemudian meningkat lagi di Tahun 2022, Untuk pengukuran tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan pengukuran secara mandiri dengan melibatkan tenaga ahli perpustakaan, Hasil pengukuran di atas jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi lain di Pulau Jawa,

Tabel 39. Perbandingan Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan Target Nasional

Indikator Sasaran	Provinsi	Nilai IPLM					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	DKI Jakarta	18,91	19,31	80,87	70,99	73,07	44.15
	D,I, Yogyakarta	18,00	21,85	83,63	85,09	86,39	48.05
	Jawa Barat	8,48	9,64	72,73	60,02	72,76	18.07
	Jawa Tengah	13,54	11,33	74,36	64,40	70,57	38.86
	Banten	8,90	9,04	71,03	52,50	61,88	48.59
	Jawa Timur	13,44	14,78	74,73	75,18	78,60	56.29
	Rata-rata Nasional	12,93	13,54	64,48	69,42	73,52	32.67

Sumber : Perpustakaan Nasional

Indikator sasaran Indeks Pembangunan LIterasi Masyarakat (IPLM) merupakan cascading dari indikator sasaran Perpustakaan Nasional RI pada Renstra Tahun 2020-2024, Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan, untuk tahun 2022 dan 2024 ada perubahan metode penghitungan dari Perpustakaan Nasional sehingga meskipun secara angka naik pada tahun 2022 dan 2024 mengalami penurunan hasil tersebut harus dikonversi dengan angka 4,7 sesuai ketentuan dari Perpustakaan Nasional, sehingga angka indeksnya adalah turun. Pada tahun 2025, seluruh provinsi mengalami penurunan nilai IPLM dikarenakan instrumen dan metodologi terbaru dari Perpusnas RI.

Tabel 40. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Dibandingkan Provinsi Lain

Sasaran	Provinsi	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Jawa Tengah	91.31	93.45	93.99	96.07	98.04
	D.I. Yogyakarta	93.91	96.16	95.33	95.83	96.17
	Jawa Barat	90.22	92.48	92.89	93.50	95.69
	DKI Jakarta	80.32	87.64	90.06	93.11	94.36
	Riau	81.59	86.97	90.04	90.69	94.21
	Jawa Timur	82.59	91.44	90.41	90.80	90.82
	Banten	76.82	77.36	78.88	75.91	90.41

Sumber : Arsip Nasional RI

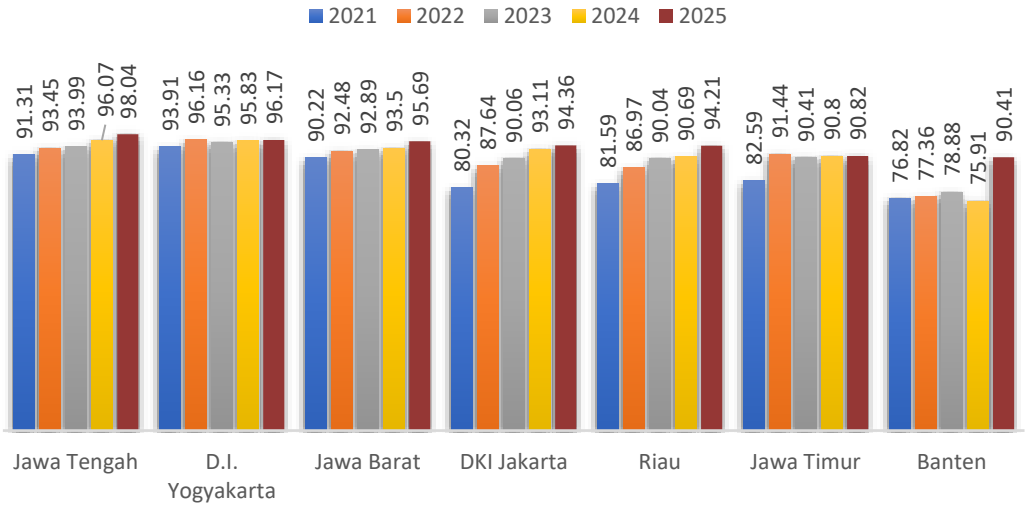

Gambar 63. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Dibandingkan Provinsi Lain

Gambar 63 menunjukkan peningkatan DKI Jakarta dalam nilai hasil pengawasan kearsipan dari 2021 hingga 2025: 80,32 (2021), 87,66 (2022), 90,04 (2023), 93,16 (2024), hingga 94,36 (2025). Meskipun nilainya lebih rendah dibanding provinsi lain seperti Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, kenaikan pada tahun 2022 diikuti kenaikan bertahap setiap tahun menandakan perbaikan dalam pengelolaan dan pengawasan kearsipan.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta pada saat penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp321,334,548,872 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp Rp276,073,436,690 dan Belanja Modal Rp Rp45,261,112,182 Untuk anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp Rp324,969,289,485 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp276.349.677.089 dan Belanja Modal Rp48.619.612.396. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp291,409,904,626 atau 89.67%, dari sisi kinerja program, keseluruhan indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program tercapai, Pencapaian target kinerja diperlukan perencanaan yang matang, kerjasama, komitmen, kerja keras dan dukungan dari semua pihak terkait.

Realisasi belanja tidak mencapai minimal 90% disebabkan oleh:

1) Alokasi kenaikan TPP Tahun 2025 (Rp7.601.993.286) dan alokasi PPPK yang tidak sesuai dengan rencana pengangkatan (Rp997.809.226) tunjangan beban kerja (1.810.0136.000), gaji pokok (1.250.000.000).
2) Sisa mati TALI senilai (Rp699.696.687)
3) Sisa mati hasil dari negoisasi/efisiensi hasil lelang (Perkiraan dari HPS) penyediaan server (Rp.1.494.683.514), galeri arsip dan Perpustakaan Nyi Ageng Serang (3.583.090.552), penyediaan titik baca (400.000.000), pengadaan bahan pustaka (831.000.000), perangkat jaringan (312.000.000)
4) Efisiensi negosiasi jasa konsultan perpustakaan jakarta selatan (964.255.000)
5) Terdapat Penyedia Jasa Lainnya yang tidak menyelesaikan kontrak (pengangkatan CPNS) (1.412.451.000)

6) Waktu pelaksanaan pekerjaan rehab gedung perpustakaan jakarta barat tidak mencukupi (2.042.050.595)
7) Efisiensi sisa mati lainnya (6.200.000.000)

Tabel 41. Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program

No	Program	Perubahan APBD (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pembinaan Perpustakaan	93,440,124,016	88,325,870,117	94.53%
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	876,551,810	858,813,359	97.98%
3	Program Pengelolaan Arsip	26,787,019,705	23,938,259,031	89.37%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	203,865,593,954	178,286,962,119	87.45%
TOTAL		**324,969,289,485**	**291,409,904,626**	**89.67%**

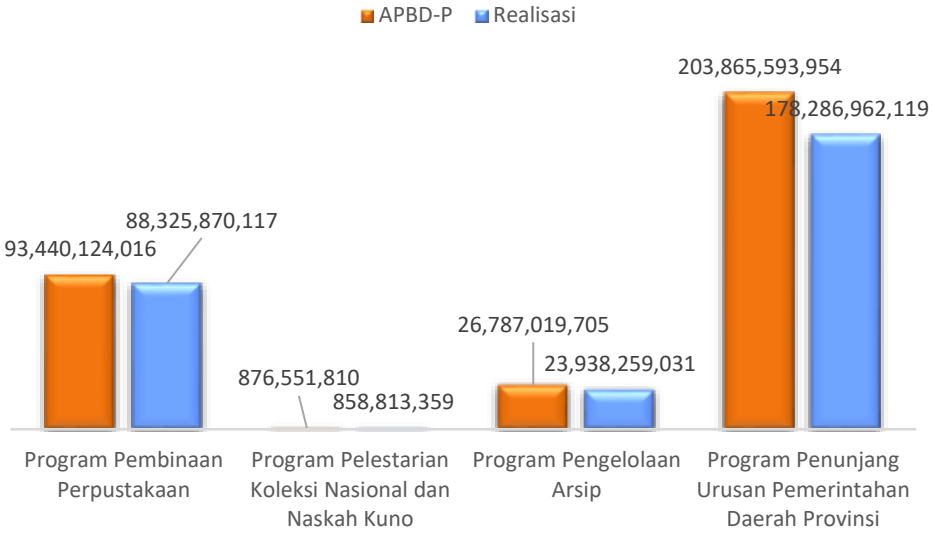

Gambar 64. Grafik Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025

Tabel 42. Realisasi Belanja dan Target Kinerja Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%) Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN LITERASI DAN KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19.91	94,316,675,826	19,96	89,184,683,476	100,25%	94.56%
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				93,440,124,016		88,325,870,117		94.53%
		Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persen	34.8	34,529,534,162	37		105.89%	
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0.067	28,418,408,348	0.071		105.97%	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0.0005	424,011,114	0,00057		107.55%	
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Persen	12.4	2,001,473,156	12.4		100.00%	
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	73.21	21,681,278,332	73.26		100.07%	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				71,758,845,684		67,833,725,425		94.53%
		Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A	%	66.67		100		142.85%	

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%) Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	45		79		174.47%	
		Persentase tenaga perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai standar nasional perpustakaan	%	81.46		99		117.85%	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1	1,872,487,060	1	1,331,336,581	100.00%	71.10%
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	7	38,009,067,700	7	35,759,939,839	100.00%	94.08%
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	Eksemplar	24000	12,644,820,285	24072	12,495,642,010	100.30%	98.82%
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	951	1,459,373,156	1113	1,354,138,890	123.19%	92.79%
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi	Perpustakaan	233	542,100,000	240	440,750,000	103.00%	81.30%

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%) Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan							
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	5142	389,011,114	5642.0	332,811,600	109.72%	85.55%
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	1	303,220,108	1	295,310,000	100%	97.39%
	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	Perpustakaan	1	114,290,214	1	113,220,000	100.00%	99.06%
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	132458	16,389,476,047	150440	15,676,976,505	113.48%	95.65%
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	2	35,000,000	2	33,600,000	100%	96.00%
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca	%	10.1	21,681,278,332	10.23	20,492,144,692	104.78%	94.52%

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%) Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	235	7,260,987,223	328	6,702,694,113	135.20%	92.31%
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Perpustakaan	874	11,324,883,191	874	10,902,846,277	100.00%	96.27%
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	180	2,509,920,664	225	2,389,723,319	128.52%	95.21%
	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi Yang Dipilih Dan Didukung Kegiatannya	Orang	12	585,487,254	12	496,880,983	100%	84.87%
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				876,551,810		858,813,359		97.98%
		Persentase Capaian Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang Menjadi Koleksi Daerah	Persen	30		30.15		100.50%	
		Persentase Capaian Naskah Kuno Milik Daerah Yang Dilestarikan	Persen	30		30		100%	

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%) Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah yang di Lestarikan	%	30	346,776,278	30.15	336,714,907	100.50%	97.10%
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	50000	121,128,198	50498	117,496,000	101.00%	97.00%
	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penerbit	10	225,648,080	10	219,218,907	100%	97.15%
	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	%	100	70,941,920	100	70,058,000	100%	98.75%
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry	50000	34,522,960	50000	34,090,000	100%	98.75%
	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	1	36,418,960	1	35,968,000	100%	98.76%
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	%	30	146,907,952	30	145,265,652	100%	98.88%
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	75	54,049,974	75	53,907,600	100%	99.74%

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%) Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar	50	92,857,978	50	91,358,052	100%	98.38%
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diselamatkan dan Dikembangkan	%	25	311,925,660	30	306,774,800	120%	98.35%
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	600	301,447,392	600	296,868,800	100%	98.48%
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	650	10,478,268	650	9,906,000	100%	94.54%
2	MENINGKATNYA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN DAERAH, KAPABILITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN YANG DIAWASI DAN MENINGKATNYA MUTU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan	Nilai	93.61	230,652,613,659	93,73	202,225,221,150	100,13%	87.68%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	203,865,593,954	4	178,286,962,119	100%	87.45%

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%) Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	4	104,316,897,756	4	89,808,207,946	100%	86.09%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	235	104,269,649,356	235	89,762,232,546	100%	86.09%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	47,248,400	12	45,975,400	100%	97.31%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	4	5,475,227,706	4	5,188,659,566	100%	94.77%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	785,974,045	10	756,461,893	100%	96.25%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	22	2,514,764,127	22	2,437,635,827	100%	96.93%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	857,480,536	12	793,404,263	100%	92.53%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	67,345,905	8	58,988,858	100%	87.59%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	7	755,713,845	7	705,984,385	100%	93.42%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	68	493,949,248	68	436,184,340	100%	88.31%

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%) Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	11,047,946,352	4	12,286,549,071	100%	86.44%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	116	14,213,883,473	116	12,286,549,071	100%	86.44%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	26,622,429,666	4	25,040,290,886	100%	94.06%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	84	9,759,436,854	84	8,680,428,700	100%	88.94%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	68	692,038,420	68	643,159,676	100%	92.94%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	84	16,170,954,392	84	15,716,702,510	100%	97.19%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	53,093,041,227	4	45,829,754,650	100%	86.32%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	110	1,285,627,599	110	1,121,223,655	100%	87.21%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	68	57,839,833	68	40,249,830	100%	69.59%

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%) Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	212	769,254,635	212	687,836,610	100%	89.42%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	50,980,319,160	11	43,980,444,555	100%	86.27%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	100	144,114,126	100	133,500,000	100%	92.63%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	144,114,126	3	133,500,000	100%	92.63%
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				26,787,019,705		23,938,259,031		89.37%
		Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan	Persen	42.41		58.71		138.43%	
		Persentase lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK	Persen	87.03		88.89		102.14%	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Lembaga (Opd, Ukpd, Bumd, Ormas/Orpol) Yang Membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) Sesuai Standar Kearsipan	%	37.35	6,277,386,257	38.89	5,851,809,555	104.12%	93.22%
	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Arsip	50000	3,834,046,497	51961	3,694,551,295	101.41%	96.36%

No	Sasaran Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Capaian (%) Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	54	2,443,339,760	54	2,157,258,260	100%	88.29%
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Presentase arsip statis yang dikelola	%	79.42	12,112,728,908	127.43	11,282,618,198	110.10%	93.15%
	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	3000	12,112,728,908	5097	11,282,618,198	169.90%	93.15%
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase simpul jaringan sistem informasi kearsipan yang dikelola	%	100	8,396,904,540	104.3	6,803,831,278	104.30%	81.03%
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	16127	8,396,904,540	16497	6,803,831,278	102.29%	81.03%
TOTAL					**324,969,289,485**		**291,409,904,626**		**89.67%**

BAB IV

PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Perangkat Daerah setiap akhir tahun melakukan pengukuran pencapaian target kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, Hasil pengukuran kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyajikan berbagai keberhasilan dan kendala dalam mencapai sasaran strategis dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama,

A. Kesimpulan

Capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan mencapai target yang diharapkan, Realisasi capaian Indikatornya melebihi target-target yang ditentukan Target indikator kinerja Nilai Budaya Literasi adalah 72.09 realisasi sebesar 78,76 dengan capaian 109,25% dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat target 19.91 realisasi 19,96 sehingga capaian kinerjanya 100,25%. Tercapaianya tujuan dan sasaran didukung oleh Program pembinaan perpustakaan yang memiliki 5 (lima) indikator program yang mendukung indikator kinerja sasaran, yaitu:

1. Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat

   Target Indikator Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat Tahun 2025 adalah 34.80 % atau 3.841.299 kunjungan, Realisasi kunjungan pada Perpustakaan Cikini dan PDS HB Jassin dan 5 Perpustakaan Wilayah Kota Administrasi, Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan pada tahun 2025 sebanyak 228.457 orang atau tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat tercapai 105.89%.
2. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk
   Target kinerja 0.067 dengan capaian rasionya meningkat menjadi 0.071 realisasinya mencapai 105.97%, penambahan koleksi sebanyak 132.543 eksemplar sehingga menjadi 1.570.957 ekspemplar dibandingkan dengan jumlah pendudduk 11.038.216 orang, sehingga rasio kecukupan koleksi adalah 0.071 artinya setiap 100 orang memiliki akses terhadap 7 judul buku
3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk
   Pada tahun 2025 rasio ditargetkan meningkat menjadi 0.00003 sampai dengan akhir telah dilaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan menuju Standar Nasional Perpustakaan sehingga jumlah keseluruhan menjadi 6.310 orang atau telah tercapai target yang ditetapkan rasio 0.00004 dari jumlah penduduk,
4. Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai standar
   Pada tahun 2025, target kumulatif perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) adalah 12.4% dari 4 Perpustakaan RPTRA.
5. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca
   Pengukuran tingkat kegemaran membaca diperoleh dari hasil penghitungan memilki 3 fase yaitu pra membaca, saat membaca, dan pasca membaca. Realisasi TGM berdasarkan perhitungan Dispusip sebesar 73.26 sengan capaian 100.07%.

Target indikator kinerja Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Adalah 93.11 dengan realisasi 94.36 dengan capaian 101,34% sedangkan target indikator Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan adalah 93.61 dan realisasi 93,73 sehingga capaian indikator sebesar 100,13%, Program pengelolaan arsip memiliki 2 (dua) indikator program yang dilaksanakan dan mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran, yaitu :

1. Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan
   Capaian Indikator didapat dari komponen data daftar arsip aktif, data daftar arsip inaktif, data sarana bantu temu balik dan penginputan arsip pada SIKN telah terealisasi sebesar 58,71 dari target 42.41 dengan sehingga capaian kinerja sebesar 138,43%.
2. Persentase Lembaga (OPD, BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK
   Pengukuran dilakukan melalui kegiatan pengawasan kearsipan dengan audit penyelenggaraan kearsipan pada Perangkat Daerah dan BUMD menggunakan instrumen yang telah disediakan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupa Form ASKI (Audit Sistem Kearsipan Internal) dan Form ASKE (Audit Sistem Kearsipan Eksternal), Target kinerja Indikator program 87.03 dengan realisasi 88,89 sehingga capainnya 102,14%.

B. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 2026

Dalam rangka mendorong pencapaian kinerja yang lebih optimal di Tahun 2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyusun rencana aksi kepala dinas tahun 2026 beserta Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang memuat target kinerja dan anggaran.

RENCANA AKSI KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat yang menguatkan daya saing kota global	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	74.01	RA.1 Penguatan ekosistem layanan literasi berbasis perpustakaan umum melalui pengembangan koleksi, layanan, dan platform digital	KK.1.1 Layanan literasi dan ruang belajar publik dimanfaatkan masyarakat lintas usia sebagai sumber belajar mandiri	T/O.1.1.1. Laporan pemanfaatan koleksi perpustakaan	1 laporan	TW 4	Debangpus, sudin dan UP
					KK.1.2 Perpustakaan berfungsi sebagai ruang belajar nonformal yang terbuka dan adaptif	T/O.1.2.1. Laporan pemanfaatan perpustakaan baik luring maupun daring	1 laporan	TW 1-4	Debangpus, sudin dan UP
						T/O.1.2.2. Laporan keanggotaan perpustakaan umum	1 laporan	TW 4	Debangpus, sudin dan UP
					KK.1.3 Perpustakaan dimanfaatkan sebagai ruang kolaborasi dalam aktivitas literasi	T/O.1.3.1. Laporan aktivitas dan sosialisasi perpustakaan	1 laporan	TW 4	Debangpus, sudin dan UP
				RA.2 Melaksanakan pembinaan perpustakaan Sekolah, Khusus, dan Umum untuk memenuhi (SNP) standar nasional perpustakaan	KK2.1. Terlaksananya pembinaan perpustakaan Sekolah, Khusus dan Umum sejumlah 83 perpustakaan terdiri : 25 Perpustakaan Sekolah 58 Perpustakaan Umum,Khusus dan Perguruan Tinggi	T/O2.1.1. Laporan pembinaan perpustakaan sesuai (SNP) Standar Nasional Perpustakaan	1 laporan	TW 1	Kepala Bidang P2PKM, Para Kasudin
					KK2.2. Terlaksananya pembinaan perpustakaan Sekolah, Khusus dan Umum sejumlah 83 perpustakaan terdiri : 25 Perpustakaan Sekolah 58 Perpustakaan Umum,Khusus dan Perguruan Tinggi	T/O2.2.1. Laporan pembinaan perpustakaan sesuai (SNP) Standar Nasional Perpustakaan	1 laporan	TW 2	Kepala Bidang P2PKM, Para Kasudin

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
					KK2.3. Terlaksananya pembinaan perpustakaan Sekolah, Khusus dan Umum sejumlah 84 perpustakaan terdiri : 25 Perpustakaan Sekolah, 59 Perpustakaan Umum,Khusus dan Perguruan Tinggi	T/O2.3.1. Laporan pembinaan perpustakaan sesuai (SNP) Standar Nasional Perpustakaan	1 laporan	TW 3	Kepala Bidang P2PKM, Para Kasudin
					KK2.4. Terlaksananya pembinaan perpustakaan Sekolah, Khusus dan Umum sejumlah 83 perpustakaan terdiri : 25 Perpustakaan Sekolah 58 Perpustakaan Umum,Khusus dan Perguruan Tinggi	T/O2.4.1. Laporan pembinaan perpustakaan sesuai (SNP) Standar Nasional Perpustakaan	1 laporan	TW 4	Kepala Bidang P2PKM, Para Kasudin
				RA3. Melaksanakan pembinaan tenaga perpustakaan sekolah, khusus, dan umum	KK3.1. Terlaksananya pembinaan tenaga perpustakaan sekolah, khusus, dan umum sejumlah 585 tenaga Terdiri : 469 Tenaga Perpustakaan Sekolah 116 Tenaga Perpustakaan Umum,Khusus dan Perguruan Tinggi	T/O3.1.1. Laporan pembinaan tenaga perpustakaan sekolah, khusus, dan umum	1 Laporan	TW 2	Kepala Bidang P2PKM, Para Kasudin
					KK3.2. Terlaksananya pembinaan tenaga perpustakaan sekolah, khusus, dan umum sejumlah 586 tenaga Terdiri : 469 Tenaga Perpustakaan Sekolah 117 Tenaga Perpustakaan Umum,Khusus dan Perguruan Tinggi	T/O3.2.1. Laporan pembinaan tenaga perpustakaan sekolah, khusus, dan umum	1 Laporan	TW 3	Kepala Bidang P2PKM, Para Kasudin
				RA 4. Mengidentifikasi isu strategis dan persepsi publik terhadap Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Citra Positif Instansi di Masyarakat	KK 1.1 Ditetapkannya Program Strategis Urusan Perpustakaan oleh seluruh Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan strategi komunikasi dan implementasi untuk	T/O.1.1.1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Program Strategis Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW 1	Sekretaris Dinas, Kabid, Kasudin dan Ka.UP

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
					membangun citra positif instansi di masyarakat	T/O.1.1.2. *Executive Summary*/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW 2 - 4	Sekretaris Dinas, Kabid, Kasudin dan Ka.UP
2	Terwujudnya tata kelola layanan kearsipan yang berkualitas efektif dan akuntabel	Tingkat Pengelolaan Arsip	92.59	RA.1. Menciptakan tata kelola dan layanan kearsipan yang berkualitas efektif dan akuntabel	KK.1.1. Terlaksananya penggunaan aplikasi arjuna oleh Perangkat Daerah	Laporan Penggunaan Aplikasi Arjuna oleh Perangkat Daerah	1 Laporan	TW 1 - 4	TI dan Binwas
						Laporan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Arjuna oleh Perangkat Daerah	1 Laporan	TW 1 - 4	TI dan Binwas
					KK.1.2. Terlaksananya Penyusutan Arsip pada Perangkat Daerah	Laporan Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusutan Arsip	1 Laporan	TW 4	Binwas
					KK.1.3. Tersusunnya Sarana Bantu Temu Balik Arsip Statis dan disampaikan melalui JIKN	T/O.1.3.1. Laporan Pelaksanaan Akuisisi Arsip Statis	1 Laporan	TW 3	Lansip
						T/O.1.3.2. Laporan Pelaksanaan Alih Media dan Autentikasi Arsip Statis Hasil Alih Media	1 Laporan	TW 4	Lansip
						T/O.1.3.3. Laporan Sarana Bantu Temu Balik Arsip Statis Perangkat Daerah yang telah diakuisisi	1 Laporan	TW 4	Lansip
						T/O.1.3.4. Laporan penyampaian informasi arsip statis pada SIKN	1 Laporan	TW 4	Lansip
Sasaran Relevan Lainnya									
3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut	100	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK.1.1. tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/01.1.1. dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	Sekretariat

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
	temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)				T/01.1.2. dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	Sekretariat
						T/01.1.3. dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	Sekretariat
						T/01.1.4. dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	Sekretariat
					KK1.2. tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	Sekretariat
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	Sekretariat
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	Sekretariat
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	Sekretariat
4	Tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi	Persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi	71	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev bappeda	KK.1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada system monev Bappeda	1 Data	TW I	Sekretariat
				RA2. Menyusun AKB target bulanan dalam sistem sipkddki.jakarta.go.id	KK2.1. tersusunnya AKB target bulanan pada sistem sipkddki.jakarta.go.id	T/O2.1.1. data AKB target bulanan pada system sipkddki.jakarta.go.id	1 data	TW I	Sekretariat
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi meliputi	KK3.1. Tersusunnya monitoring kinerja anggaran meliputi yaitu capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW I	Sekretariat

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				capaian keluaran kegiatan/subkegitan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	penyerapan anggaran sesuai dengan target	T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW II	Sekretariat
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW III	Sekretariat
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW IV	Sekretariat
				RA4. Merealisasikan belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil Produksi dalam negeri	KK4.1. tercapainya persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) paling sedikit 80%.	T/O4.1.1. Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ)	80 Persentase	TW IV	Sekretariat

RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**167.724.289.202**	PAD
	2,23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				19.185.540.323	PAD
	2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	DKI Jakarta	25,5 Persentase	**18.789.302.211**	PAD
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	DKI Jakarta	0,0714 Rasio		
			Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	DKI Jakarta	20 Persentase		
	2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A	DKI Jakarta	100 Persentase	**14.106.419.816**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	DKI Jakarta	1 Perpustakaan	7.144.144.701	PAD
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	DKI Jakarta	6500 Eksemplar	738.990.323	PAD
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	DKI Jakarta	100 Perpustakaan	311.946.840	PAD
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	DKI Jakarta	6312 Orang	241.219.280	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	DKI Jakarta	1 Layanan	398.421.744	PAD
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	DKI Jakarta	1 Perpustakaan	106.909.936	PAD
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	DKI Jakarta	24000 Eksemplar	4.611.075.952	PAD
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	DKI Jakarta	2 Dokumen	32.750.000	PAD
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	DKI Jakarta	233 Perpustakaan	520.961.040	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca	DKI Jakarta	10,6 Persentase	**4.682.882.395**	PAD
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	DKI Jakarta	60 Lokus	2.873.712.815	PAD
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	50 Perpustakaan	1.002.323.068	PAD
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	DKI Jakarta	45 Orang	493.728.190	PAD
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	DKI Jakarta	2 Orang	313.118.322	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Persentase Capaian Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang Menjadi Koleksi Daerah	DKI Jakarta	**32,5 Persentase**	**396.238.112**	PAD
			Persentase Capaian Naskah Kuno Milik Daerah Yang Dilestarikan	DKI Jakarta	**20 Persentase**		
	2.23.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	Persentase Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah yang di Lestarikan	DKI Jakarta	32,5 Persen	**121.666.048**	PAD
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	DKI Jakarta	56500 Eksemplar	74.449.536	PAD
	2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	DKI Jakarta	10 Penerbit	47.216.512	PAD
	2.23.03.1.02	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	Persentase Katalog Induk Daerah dan	DKI Jakarta	100 Persen	**14.616.000**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
			Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	DKI Jakarta	1 Entry	7.308.000	PAD
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	DKI Jakarta	1 Naskah	7.308.000	PAD
	2.23.03.1.03	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	DKI Jakarta	20 Persen	**61.004.160**	PAD
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	DKI Jakarta	50 Eksemplar	33.600.000	PAD
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	DKI Jakarta	100 Orang	27.404.160	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.03.1.04	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diselamatkan dan Dikembangkan	DKI Jakarta	20	Persen	**198.951.904**	PAD
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	DKI Jakarta	500	Eksemplar	162.236.400	PAD
	2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	DKI Jakarta	500	Eksemplar	36.715.504	PAD
	2,24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**		DKI Jakarta			148.538.748.879	PAD
	2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	**4**	**Indeks**	**137.862.343.268**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu	DKI Jakarta	100	Persentase	**46.436.640**	PAD
	2.24.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	1	Dokumen	46.436.640	PAD
	2.24.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4	Indeks	**96.749.301.135**	PAD
	2.24.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	221	Orang/ Bulan	96.740.694.335	PAD
	2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	12	Dokumen	8.606.800	PAD
	2.24.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4	Indeks	**9.151.573.041**	PAD
	2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	2	Paket	143.497.536	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	3 Paket	351.357.552	PAD
	2.24.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	77.359.520	PAD
	2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	31.030.496	PAD
	2.24.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	185.400.000	PAD
	2.24.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	50.562.000	PAD
	2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	12 Laporan	179.709.856	PAD
	2.24.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		3 Dokumen	8.132.656.081	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	**12.504.038.960**	PAD
	2.24.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	3.735.738.720	PAD
	2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	100 Unit	8.768.300.240	PAD
	2.24.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	8 Indeks	**9.021.253.414**	PAD
	2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKI Jakarta	12 Laporan	4.959.184.210	PAD
	2.24.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	12 Laporan	260.969.408	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	12 Laporan	3.801.099.796	PAD
	2.24.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	**10.389.740.078**	PAD
	2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	14 Unit	276.645.068	PAD
	2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DKI Jakarta	3 Unit	10.113.095.010	PAD
	2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan	DKI Jakarta	**46,31 Persentase**	**10.187.128.347**	PAD
	2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Persentase Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) Yang Membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar	DKI Jakarta	114,58 Persentase	**6.853.072.026**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
			Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan				
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	DKI Jakarta	10000 Arsip	44.159.376	PAD
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	DKI Jakarta	25000 Arsip	5.259.550.050	PAD
	2.24.02.1.01.0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	DKI Jakarta	6 Orang	59.026.200	PAD
	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	DKI Jakarta	35 Instansi	1.134.499.040	PAD
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	DKI Jakarta	80 Lembaga	130.931.560	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.02.1.01.0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip		21	Lembaga	224.905.800	PAD
	2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	Presentase arsip statis yang dikelola	DKI Jakarta	81,92	Persentase	**1.431.878.336**	PAD
	2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai	DKI Jakarta	6	Orang	127.000.000	PAD
	2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	DKI Jakarta	2	Arsip	614.994.592	PAD
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	DKI Jakarta	4000	Arsip	689.883.744	PAD
	2.24.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	Persentase simpul jaringan sistem informasi kearsipan yang dikelola	DKI Jakarta	100	Persentase	**1.902.177.985**	PAD
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	DKI Jakarta	400	Pengguna	1.902.177.985	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	DKI Jakarta	100 Persentase	**489.277.264**	PAD
	2.24.03.1.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	DKI Jakarta	100 Persentase	**280.227.584**	PAD
	2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	DKI Jakarta	4200 Arsip	280.227.584	PAD
	2.24.03.1.04	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	Persentase autentikasi arsip statis yang dialihmediakan	DKI Jakarta	100 Persentase	**209.049.680**	PAD
	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	DKI Jakarta	1000 Arsip	209.049.680	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat						**16.177.248.918**	PAD
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**16.177.248.918**	PAD
	2,23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				6.719.419.471	PAD
	2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Jakarta Pusat	25,5 Persentase	**6.719.419.471**	PAD
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Jakarta Pusat	0,0714 Rasio		
			Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Jakarta Pusat	20 Persentase		
	2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A	Jakarta Pusat	100 Persentase	**4.637.961.751**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jakarta Pusat	1 Perpustakaan	2.326.441.935	PAD
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jakarta Pusat	78 Perpustakaan	210.882.240	PAD
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jakarta Pusat	21066 Eksemplar	2.100.637.576	PAD
	2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca	Jakarta Pusat	10,6 Persentase	**2.081.457.720**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Jakarta Pusat	35 Lokus	441.731.080	PAD
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jakarta Pusat	100 Perpustakaan	1.192.226.400	PAD
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jakarta Pusat	35 Orang	386.694.128	PAD
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Jakarta Pusat	2 Orang	60.806.112	PAD
	2,24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**9.457.829.447**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta Pusat	**4 Indeks**	**8.725.963.052**	PAD
	2.24.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Jakarta Pusat	4 Indeks	**6.000.000**	PAD
	2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jakarta Pusat	12 Dokumen	6.000.000	PAD
	2.24.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Jakarta Pusat	4 Indeks	**333.712.832**	PAD
	2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jakarta Pusat	1 Paket	103.754.616	PAD
	2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta Pusat	3 Paket	50.947.792	PAD
	2.24.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jakarta Pusat	1 Paket	42.295.120	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jakarta Pusat	1 Paket	15.456.896	PAD
	2.24.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jakarta Pusat	1 Paket	117.693.000	PAD
	2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta Pusat	12 Laporan	3.565.408	PAD
	2.24.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta Pusat	4 Indeks	**627.797.968**	PAD
	2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jakarta Pusat	38 Unit	627.797.968	PAD
	2.24.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta Pusat	4 Indeks	**1.527.270.154**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jakarta Pusat	12 Laporan	299.769.210	PAD
	2.24.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta Pusat	12 Laporan	57.931.776	PAD
	2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jakarta Pusat	12 Laporan	1.169.569.168	PAD
	2.24.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta Pusat	4 Indeks	**6.231.182.098**	PAD
	2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jakarta Pusat	16 Unit	313.581.399	PAD
	2.24.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jakarta Pusat	20 Unit	22.773.744	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jakarta Pusat	39 Unit	98.269.417	PAD
	2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jakarta Pusat	1 Unit	5.796.557.538	PAD
	2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan	Jakarta Pusat	**46,31 Persentase**	**731.866.395**	PAD
	2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Persentase Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) Yang Membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan	Jakarta Pusat	126,67 Persentase	**466.845.547**	PAD
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Jakarta Pusat	5000 Arsip	362.441.419	PAD
	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis		6 Instansi	45.677.008	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.02.1.01.0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip		3	Lembaga	58.727.120	PAD
	2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	Presentase arsip statis yang dikelola	Jakarta Pusat	81,92	Persentase	**160.102.560**	PAD
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Jakarta Pusat	4000	Arsip	160.102.560	PAD
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase simpul jaringan sistem informasi kearsipan yang dikelola	Jakarta Pusat	100	Pengguna	**234.563.152**	PAD
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jakarta Pusat	1000	Pengguna	234.563.152	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Utara						**16.905.605.521**	PAD
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**16.905.605.521**	PAD
	2,23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				8.176.210.549	
	2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Jakarta Utara	25,5 Persentase	**8.176.210.549**	PAD
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Jakarta Utara	0,0714 Rasio		
			Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Jakarta Utara	20 Persentase		
	2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A	Jakarta Utara	100 Persentase	**4.806.930.507**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jakarta Utara	1 Perpustakaan	2.674.251.683	PAD
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jakarta Utara	145 Perpustakaan	270.387.328	PAD
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jakarta Utara	23000 Eksemplar	1.862.291.496	PAD
	2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca	Jakarta Utara	10,6 Persentase	**3.369.280.042**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Jakarta Utara	45 Lokus	583.902.576	PAD
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jakarta Utara	117 Perpustakaan	2.387.896.938	PAD
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jakarta Utara	35 Orang	316.229.600	PAD
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Jakarta Utara	2 Orang	81.250.928	PAD
	2,24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**8.729.394.972**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta Utara	**4 Indeks**	**7.392.927.900**	PAD
	2.24.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Jakarta Utara	4 Indeks	**8.000.000**	PAD
	2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jakarta Utara	12 Dokumen	8.000.000	PAD
	2.24.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Jakarta Utara	4 Indeks	**482.030.328**	PAD
	2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jakarta Utara	1 Paket	107.322.992	PAD
	2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta Utara	3 Paket	96.873.400	PAD
	2.24.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jakarta Utara	1 Paket	30.553.936	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jakarta Utara	1 Paket	10.080.000	PAD
	2.24.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jakarta Utara	1 Paket	237.200.000	PAD
	2.24.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta Utara	4 Indeks	**387.679.600**	PAD
	2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jakarta Utara	10 Unit	387.679.600	PAD
	2.24.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta Utara	4 Indeks	**2.743.020.341**	PAD
	2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jakarta Utara	12 Laporan	560.416.800	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta Utara	12 Laporan	62.759.424	PAD
	2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jakarta Utara	12 Laporan	2.119.844.117	PAD
	2.24.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta Utara	4 Indeks	**3.772.197.631**	PAD
	2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jakarta Utara	23 Unit	246.613.707	PAD
	2.24.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jakarta Utara	5 Unit	8.134.560	PAD
	2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jakarta Utara	20 Unit	50.655.147	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jakarta Utara	2 Unit	3.466.794.217	PAD
	2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan	Jakarta Utara	**46,31 Persentase**	**1.336.467.072**	PAD
	2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Persentase Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) Yang Membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipam	Jakarta Utara	126,67 Persentase	**654.146.320**	PAD
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Jakarta Utara	5000 Arsip	494.469.412	PAD
	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis		5 Instansi	104.727.272	PAD
	2.24.02.1.01.0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip		1 Lembaga	54.949.636	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	Presentase arsip statis yang dikelola	Jakarta Utara	81,92	Persentase	**447.757.600**	PAD
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Jakarta Utara	4000	Arsip	447.757.600	PAD
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase simpul jaringan sistem informasi kearsipan yang dikelola	Jakarta Utara	100	Pengguna	**234.563.152**	PAD
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jakarta Utara	1000	Pengguna	234.563.152	PAD
Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat							**12.546.986.009**	PAD
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**12.546.986.009**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2,23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**8.102.299.169**	
	2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Jakarta Barat	25,5 Persentase	**8.102.299.169**	PAD
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Jakarta Barat	0,0714 Rasio		
			Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Jakarta Barat	20 Persentase		
	2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A	Jakarta Barat	100 Persentase	**4.334.390.681**	PAD
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jakarta Barat	1 Perpustakaan	2.575.476.177	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jakarta Barat	230 Perpustakaan	247.948.616	PAD
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jakarta Barat	23000 Eksemplar	1.510.965.888	PAD
	2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca	Jakarta Barat	10,6 Persentase	**3.767.908.488**	PAD
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Jakarta Barat	35 Lokus	470.070.144	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jakarta Barat	150 Perpustakaan	2.977.085.768	PAD
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jakarta Barat	35 Orang	282.612.576	PAD
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Jakarta Barat	2 Orang	38.140.000	PAD
	2,24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**4.444.686.840**	PAD
	2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta Barat	**4 Indeks**	3.114.907.096	PAD
	2.24.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Jakarta Barat	4 Indeks	**6.500.000**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jakarta Barat	12 Dokumen	6.500.000	PAD
	2.24.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Jakarta Barat	4 Indeks	**296.290.757**	PAD
	2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta Barat	1 Paket	43.592.976	PAD
	2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta Barat	3 Paket	38.126.928	PAD
	2.24.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jakarta Barat	1 Paket	46.761.904	PAD
	2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jakarta Barat	1 Paket	7.809.949	PAD
	2.24.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jakarta Barat	1 Paket	159.999.000	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta Barat	4	Indeks	**333.498.368**	PAD
	2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jakarta Barat	10	Unit	333.498.368	PAD
	2.24.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta Barat	4	Indeks	**2.004.795.430**	PAD
	2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jakarta Barat	12	Laporan	333.878.400	PAD
	2.24.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta Barat	12	Laporan	62.759.424	PAD
	2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jakarta Barat	12	Laporan	1.608.157.606	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta Barat	4 Indeks	**473.822.541**	PAD
	2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jakarta Barat	20 Unit	136.992.675	PAD
	2.24.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jakarta Barat	10 Unit	3.053.232	PAD
	2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jakarta Barat	10 Unit	35.754.880	PAD
	2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jakarta Barat	1 Unit	298.021.754	PAD
	2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan	Jakarta Barat	**46,31 Persentase**	**1.329.779.744**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Persentase Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) Yang Membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan	Jakarta Barat	102,08 Persentase	**668.802.000**	PAD
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Jakarta Barat	5000 Arsip	590.486.198	PAD
	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Jakarta Barat	44 Instansi	47.327.146	PAD
	2.24.02.1.01.0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	Jakarta Barat	1 Lembaga	30.988.656	PAD
	2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	Presentase arsip statis yang dikelola	Jakarta Barat	81,92 Persentase	**660.977.744**	PAD
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Jakarta Barat	4000 Arsip	660.977.744	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Selatan						**12.102.031.703**	PAD
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**12.102.031.703**	PAD
	2,23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**8.327.186.318**	
	2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Jakarta Selatan	25,5 Persentase	**8.327.186.318**	PAD
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Jakarta Selatan	0,0714 Rasio		
			Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Jakarta Selatan	20 Persentase		
	2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A	Jakarta Selatan	100 Persentase	**5.271.989.841**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jakarta Selatan	1 Perpustakaan	2.740.525.869	PAD
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jakarta Selatan	185 Perpustakaan	187.996.864	PAD
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jakarta Selatan	23066 Eksemplar	2.343.467.108	PAD
	2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca	Jakarta Selatan	10,6 Persentase	**3.055.196.477**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Jakarta Selatan	37 Lokus	305.126.096	PAD
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jakarta Selatan	130 Perpustakaan	2.379.644.653	PAD
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jakarta Selatan	35 Orang	329.175.568	PAD
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Jakarta Selatan	2 Orang	41.250.160	PAD
	2,24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**		Jakarta Selatan		**3.774.845.385**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta Selatan	**4 Indeks**	**3.114.659.493**	PAD
	2.24.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Jakarta Selatan	4 Indeks	**6.070.000**	PAD
	2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jakarta Selatan	12 Dokumen	6.070.000	PAD
	2.24.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Jakarta Selatan	4 Indeks	**539.308.514**	PAD
	2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jakarta Selatan	1 Paket	66.002.247	PAD
	2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta Selatan	3 Paket	81.401.599	PAD
	2.24.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jakarta Selatan	1 Paket	58.942.352	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jakarta Selatan	1 Paket	5.911.584	PAD
	2.24.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jakarta Selatan	1 Paket	280.237.900	PAD
	2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta Selatan	12 Laporan	4.209.520	PAD
	2.24.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta Selatan	4 Indeks	**41.221.936**	PAD
	2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jakarta Selatan	12 Unit	41.221.936	PAD
	2.24.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta Selatan	4 Indeks	**1.489.381.977**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jakarta Selatan	12 Laporan	188.782.960	PAD
	2.24.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta Selatan	12 Laporan	57.931.776	PAD
	2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jakarta Selatan	12 Laporan	1.242.667.241	PAD
	2.24.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta Selatan	4 Indeks	**1.081.280.378**	PAD
	2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jakarta Selatan	15 Unit	380.742.553	PAD
	2.24.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jakarta Selatan	20 Unit	9.365.104	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jakarta Selatan	10 Unit	103.931.956	PAD
	2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jakarta Selatan	2 Unit	587.240.765	PAD
	2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan	Jakarta Selatan	**46,31 Persentase**	**660.185.892**	PAD
	2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Persentase Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) Yang Membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan	Jakarta Selatan	126,67 Persentase	**570.611.156**	PAD
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Jakarta Selatan	5000 Arsip	491.193.524	PAD
	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Jakarta Selatan	5 Instansi	32.937.296	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.02.1.01.0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	Jakarta Selatan	1	Lembaga	46.480.336	PAD
	2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	Presentase arsip statis yang dikelola	Jakarta Selatan	81,92	Persentase	**57.775.856**	PAD
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Jakarta Selatan	4000	Arsip	57.775.856	PAD
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase simpul jaringan sistem informasi kearsipan yang dikelola	Jakarta Selatan	100	Pengguna	**31.798.880**	PAD
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jakarta Selatan	1000	Pengguna	31.798.880	PAD
Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur							19.328.999.880	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**15.236.236.429**	PAD
	2,23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				10.208.555.064	PAD
	2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Jakarta Timur	25,5 Persentase	**10.208.555.064**	PAD
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Jakarta Timur	0,0714 Rasio		
			Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Jakarta Timur	20 Persentase		
	2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A	Jakarta Selatan	100 Persentase	**6.530.877.938**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jakarta Timur	1 Perpustakaan	3.648.911.846	PAD
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jakarta Timur	220 Perpustakaan	221.985.856	PAD
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jakarta Timur	26354 Eksemplar	2.659.980.236	PAD
	2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca	Jakarta Timur	2,15 Persentase	**3.677.677.126**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Jakarta Timur	35 Lokus	417.621.556	PAD
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jakarta Timur	190 Perpustakaan	2.940.735.090	PAD
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jakarta Timur	35 Orang	300.566.080	PAD
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Jakarta Timur	2 Orang	18.754.400	PAD
	2,24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				5.027.681.365	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta Timur	**4 Indeks**	**3.693.520.125**	PAD
	2.24.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Jakarta Timur	4 Indeks	**6.300.000**	PAD
	2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jakarta Timur	12 Dokumen	6.300.000	PAD
	2.24.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Jakarta Timur	4 Indeks	**470.378.307**	PAD
	2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jakarta Timur	1 Paket	100.536.787	PAD
	2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta Timur	4 Paket	120.789.200	PAD
	2.24.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jakarta Timur	1 Paket	21.945.952	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jakarta Timur	1 Paket	4.150.160	PAD
	2.24.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jakarta Timur	1 Paket	176.520.000	PAD
	2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta Timur	12 Laporan	46.436.208	PAD
	2.24.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta Timur	4 Indeks	**95.511.369**	PAD
	2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jakarta Timur	5 Unit	95.511.369	PAD
	2.24.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta Timur	4 Indeks	**2.185.015.578**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jakarta Timur	12	Laporan	597.535.270	PAD
	2.24.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta Timur	12	Laporan	125.518.848	PAD
	2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jakarta Timur	12	Laporan	1.461.961.460	PAD
	2.24.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta Timur	4	Indeks	**936.314.871**	PAD
	2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jakarta Timur	24	Unit	282.815.025	PAD
	2.24.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jakarta Timur	3	Unit	27.679.008	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jakarta Timur	52	Unit	74.788.448	PAD
	2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jakarta Timur	1	Unit	551.032.390	PAD
	2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan	Jakarta Timur	**46,31**	**Persentase**	**1.334.161.240**	PAD
	2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Persentase Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) Yang Membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan	Jakarta Timur	103,33	Persentase	**866.454.456**	PAD
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Jakarta Timur	5000	Arsip	797.394.248	PAD
	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Jakarta Timur	8	Instansi	47.638.192	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.02.1.01.0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	Jakarta Timur	3	Lembaga	21.422.016	PAD
	2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	Presentase arsip statis yang dikelola	Jakarta Timur	81,92	Persentase	**423.146.784**	PAD
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Jakarta Timur	4000	Arsip	423.146.784	PAD
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase simpul jaringan sistem informasi kearsipan yang dikelola	Jakarta Timur	100	Pengguna	**44.560.000**	PAD
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jakarta Timur	1000	Pengguna	**44.560.000**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin						**40.325.150.573**	PAD
	2,23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**26.777.391.713**	PAD
	2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat**		25,5 Persentase	**26.777.391.713**	PAD
	2.23.02		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		0,0714 Rasio		
	2.23.02		**Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar**		20 Persentase		
	2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A		1 Persentase	**21.905.449.782**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya		1 Perpustakaan	15.788.107.125	PAD
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan		6500 Eksemplar	6.117.342.657	PAD
	2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca		10,6 Persentase	**4.871.941.931**	PAD
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus		8 Lokus	4.871.941.931	PAD
	2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**12 Indeks**	**13.547.758.860**	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		12 Indeks	**5.000.000**	PAD
	2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	5.000.000	PAD
	2.24.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		12 Indeks	**1.575.283.051**	PAD
	2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	160.714.176	PAD
	2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	782.041.387	PAD
	2.24.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	534.726.752	PAD
	2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	11.947.600	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1	Paket	1.403.136	PAD
	2.24.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	Laporan	84.450.000	PAD
	2.24.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7	Indeks	**1.114.694.861**	PAD
	2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7	Unit	1.114.694.861	PAD
	2.24.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	Indeks	**8.400.877.213**	PAD
	2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Laporan	1.568.941.818	PAD
	2.24.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	Laporan	126.010.752	PAD

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Aktivitas	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	6.705.924.643	PAD
	2.24.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		4 Indeks	**2.451.903.735**	PAD
	2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	25.959.745	PAD
	2.24.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		41 Unit	19.218.416	PAD
	2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	1.664.204.456	PAD
	2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	743.386.336	PAD

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan,

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DKI JAKARTA

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasruddin Djoko Surjono
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Pramono Anung	Nasruddin Djoko Surjono
	NIP 197306201999031002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Nasruddin Djoko Surjono
NIP : 197306201999031002
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat	Nilai Budaya Literasi	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 b. Peraturan Gubernur 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi Operasional: Dimensi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan yang memuat aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat Metode Pengukuran : Angka yang menunjukkan rata-rata dari: a. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir, b. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat, dan c. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	72,09	72,09	Nilai
2	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Penyelenggaraan Layanan Arsip yang Akuntabel	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi Operasional : Proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan Metode Pengukuran : Sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan nilai bobot pengawasan internal 40% dan eksternal 60%, nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi dari nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal. Nilai komposit terdiri atas dimensi : a. Kebijakan kearsipan b. Organisasi kearsipan c. SDM kearsipan d. Pengelolaan arsip e. Pendanaan. Kategori Penilaian : Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh obyek pengawasan terdiri atas : a. Nilai > 90 - 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan) b. Nilai > 80 - 90 dengan kategori A (memuaskan) c. Nilai > 70 - 80 dengan kategori BB (sangat baik) d. Nilai > 60 - 70 dengan kategori B (baik) e. Nilai > 50 - 60 dengan kategori CC (cukup) f. Nilai > 30 - 50 dengan kategori C (kurang)	N/A	N/A	N/A	93,11	93,11	Nilai

1

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				g. Nilai 0 - 30 dengan kategori D (sangat kurang) Sumber Data : Arsip Nasional Republik Indonesia						
3	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 b. Peraturan Gubernur 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi Operasional : Pengukuran terhadap usaha yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat, pengukuran dilakukan berdasarkan unsur pembangunan literasi masyarakat(UPLM) (Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan, Perpustakaan ber SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan Promosi, Anggota Perpustakaan) dan aspek masyarakat(AM). Metode Pengukuran : Semua Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi semua Aspek Masyarakat (AM) x 100% Sumber Data : BPS, Perpustakan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	19,91	19,91	Indeks
4	Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Kearsipan Daerah, Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan, Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan yang Dawasi dan Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi Operasional : Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan memuat unsur-unsur seperti persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu dalam pelayanan, kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, sikap petugas dalam memberikan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan pengguna layanan (Permen PANRB Nomor 14 thn 2017). Survei dilaksanakan terhadap responden yang menerima layanan pembinaan/konsultasi kearsipan (Perangkat Daerah dan BUMD) dan layanan pemanfaatan/penggunaan arsip (masyarakat). Metode Pengukuran : Nilai yang didapat dari pengukuran hasil survei dengan rentang nilai dan kategori mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan: 1) Nilai Interval Konversi 25,00 - 64,99 / Mutu Pelayanan D/ Tidak Baik 2) Nilai Interval Konversi 65,00 - 76,60 / Mutu Pelayanan C/ Kurang Baik 3) Nilai Interval Konversi 76,61 - 88,30 / Mutu Pelayanan B/ Baik 4) Nilai Interval Konversi 88,31 - 100 / Mutu Pelayanan A/ Sangat Baik Sumber Data : Arsip Nasional Republik Indonesia dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	93,61	93,61	93,61	93,61	93,61	Nilai
Sasaran Relevan Lainnya										
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna	5	25	55	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Metode Pengukuran: a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize)) Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/p/login						
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (*self declare*). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: *Maximize*) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: *Stabilize*). Sumber Data : a. *Bigbox*: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) PDN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim PDN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: *Maximize*) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: *Stabilize*).						
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (*Community of Practice*) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (*Community of Practice*) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV: a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id						
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100% Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)	67	N/A	N/A	100	100	Persentase
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD						
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta,

Nasruddin Djoko Surjono
NIP 19[illegible]0620199903 1002

DOKUMENTASI PENGHARGAAN

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta (Dispusip DKI Jakarta) menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atas ditetapkannya Arsip Koleksi Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin sebagai bagian dari Memori Kolektif Bangsa. Penghargaan Anugerah Memori Kolektif Bangsa ini diberikan saat acara Peringatan Puncak Kearsipan Nasional ke-54.

2. Piagam penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) dengan nomor 12404/R.MURI/IX/2025 dianugerahkan kepada Perpustakaan Jakarta dan Book A Book atas pencapaian rekor Pameran Buku Karya Anak Terbanyak. Piagam tersebut bertanggal Jakarta, 26 September 2025 dan ditandatangani oleh Prof. Dr. (H.C.) KR Jaya Suprana, Ketua Umum Museum Rekor-Dunia Indonesia.

REKOR INDONESIA

MURI

PIAGAM PENGHARGAAN
MUSEUM REKOR-DUNIA
INDONESIA

No. 12404/R.MURI/IX/2025

Dianugerahkan kepada:

PERPUSTAKAAN JAKARTA
&
BOOK A BOOK

ATAS REKOR

Pameran Buku Karya Anak Terbanyak

Jakarta, 26 September 2025